



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881
Situs Web: disdik.jabarprov.go.id
Pos-el: disdik@jabarprov.go.id/sekretariatdisdikjabar@gmail.com
BANDUNG – 40171

Bandung, 9 Februari 2026

Nomor : 20797/TU.04/SEKRE
Sifat : Segera
Lampiran : 1 berkas
Hal : Undangan

Kepada
Yth. Pimpinan pada instansi
sebagaimana undangan terlampir
di
tempat

Disampaikan dengan hormat, merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 bahwa perangkat daerah perlu melakukan Forum Perangkat Daerah yang bertujuan untuk memperoleh masukan target kinerja sasaran, program, dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran, dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2027 khususnya bidang pendidikan dengan tema “Mewujudkan Generasi Pancawaluya melalui Sinergi Pembangunan Pendidikan”.

Sehubungan hal termaksud, kami mengundang untuk hadir pada kegiatan tersebut, yang akan dilaksanakan:

hari, tanggal : Kamis, 12 Februari 2026
waktu : Pukul 08.00 WIB s.d. selesai
tempat : Aula Ki Hajar Dewantara Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Barat
Jalan Dr. Radjiman No. 6 Bandung

Dalam menjangkau masukan serta usulan dari tiap unsur, dipersilakan untuk dapat menyampaikannya melalui tautan <https://bit.ly/UsulanFPD2026>, masukan/usulan tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara Forum Perangkat Daerah Tahun 2026.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA BARAT,

Dr. H. PURWANTO, M.Pd.
Pembina Utama Muda

Tembusan Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Gubernur Jawa Barat;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat;
4. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/AD8739A790>

AD8739A790

LAMPIRAN I

NOMOR : 20797/TU.04/SEKRE

TANGGAL : 9 FEBRUARI 2026

HAL : UNDANGAN

DAFTAR UNDANGAN**I. INSTANSI VERTIKAL**

No	Unit Kerja	Jumlah Peserta
1	BBPMP Provinsi Jawa Barat, Kemdikdasmen RI	1 orang
2	BBGTK Provinsi Jawa Barat Kemdikdasmen RI	1 orang
3	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat	2 orang

II. PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

No	Unit Kerja	Jumlah Peserta
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	1 orang
2	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat	1 orang
3	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat	1 orang
4	Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat	1 orang
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat	1 orang
6	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat	1 orang
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat	1 orang
8	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat	1 orang
9	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat	1 orang
10	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	1 orang
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat	1 orang
12	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat	1 orang
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat	1 orang
14	Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat	1 orang

III. PERGURUAN TINGGI

No	Unit Kerja	Jumlah Peserta
1	Universitas Pendidikan Indonesia	1 orang
2	Universitas Padjadjaran	1 orang
3	Institut Teknologi Bandung	1 orang
4	Institut Pertanian Bogor	1 orang
5	Politeknik Negeri Bandung	1 orang
6	Politeknik Manufaktur Bandung	1 orang



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/AD8739A790>

AD8739A790

IV. UNSUR MKPS/MKKS/FKKS SMA/SMK/SLB DI PROVINSI JAWA BARAT

No	Unit Kerja	Jumlah Peserta
1	MKPS SMA Provinsi Jawa Barat	1 orang
2	MKPS SMK Provinsi Jawa Barat	1 orang
3	MKPS SLB Provinsi Jawa Barat	1 orang
4	MKKS SMA Provinsi Jawa Barat	1 orang
5	MKKS SMK Provinsi Jawa Barat	1 orang
6	MKKS SLB Provinsi Jawa Barat	1 orang
7	FKKS SMA Provinsi Jawa Barat	1 orang
8	FKKS SMK Provinsi Jawa Barat	1 orang
9	FKKS SLB Provinsi Jawa Barat	1 orang
10	MKKS SMA Kabupaten - Kota	27 orang
11	MKKS SMK Kabupaten - Kota	27 orang
12	MKKS SLB Kabupaten - Kota	27 orang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA BARAT,

Dr. H. PURWANTO, M.Pd.
Pembina Utama Muda



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/AD8739A790>

AD8739A790

LAMPIRAN II

NOMOR : 20797/TU.04/SEKRE

TANGGAL : 9 FEBRUARI 2026

HAL : UNDANGAN

**SUSUNAN ACARA KEGIATAN FORUM PERANGKAT DAERAH
 BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2026**

KAMIS, 12 FEBRUARI 2026

Waktu	Durasi	Acara	Keterangan
07.30-08.30	60'	Registrasi Peserta	Panitia dan Peserta
08.30-08.35	5'	Persiapan Pembukaan	MC
08.35-08.40	5'	Sapaan Pembuka dirangkaikan dengan tampilan rampak kendang	SMK Negeri 10 Bandung
08.40-08.45	5'	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	Panitia
08.45-08.55	10'	Pembacaan Doa	Pembaca Doa
08.55-09.05	10'	Laporan Kegiatan Forum Perangkat Daerah	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
09.05-09.10	5'	Pemutaran Video Kinerja dan Pembangunan Bidang Pendidikan Tahun 2025	Panitia
09.10-09.30	20'	Sambutan Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat	Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat
09.30-09.45	15'	Penandatanganan Berita Acara Forum Perangkat Daerah Bidang Pendidikan Tahun 2026 dan RAD Penanganan ATS di Provinsi Jawa Barat	Kepala Dinas Pendidikan dengan Instansi terkait disaksikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat dan Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat
09.45-10.30	45'	Arahan sekaligus membuka acara Forum Perangkat Daerah Bidang Pendidikan Tahun 2026	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat
10.30-11.50	80'	Diskusi Panel: 1. Kebijakan Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2026 2. Kebijakan Kebijakan Pembangunan Pendidikan Tahun 2027 3. Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Moderator: Fungsional Perencana Ahli Madya - Waluyo, S. Sos., M.Si. 1. Narasumber: Kemendikdasmen 2. Narasumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat 3. Narasumber: Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
11.50-12.00	10'	Penutupan	Panitia

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT



Ditandatangani secara elektronik oleh:
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 PROVINSI JAWA BARAT,

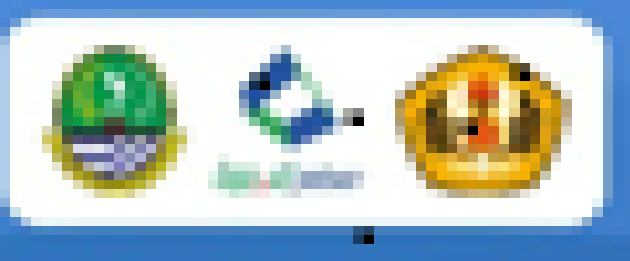
Dr. H. PURWANTO, M.Pd.
 Pembina Utama Muda



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/AD8739A790>

AD8739A790



EVALUASI PEMERATAAN MUTU PENDIDIKAN MENENGAH UMUM MENGUNAKAN INDIKATOR KUNCI DALAM KONTELASI PEMERATAAN EKONOMI JAWA BARAT

PROGRAM STUDI STATISTIKA
FMIPA
UNIVERSITAS PADJADJARAN



Ketua
Prof. Yuyun Hidayat, M.SIE., Ph.D.

Anggota
Dr. Titi Purwandari, MSIE.
Dhika Surya Pangestu, M.Mat.

TOPIK

BAHASAN

01

Pendahuluan

02

Mekanisme dan Rancangan-
Metodologi Penelitian

03

Hasil –Kesimpulan- Rekomendasi



UNIVERSITAS
PADJADJARAN

DEPARTEMEN STATISTIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN
ILMU PENGETAHUAN ALAM

Latar Belakang | Urgensi| Identifikasi -
batasan | Kajian literatur- Rasionalisasi |
Maksud -Tujuan Penelitian |

Metodologi | Data | Penetapan HDU|
Analisis Data | Hasil Analisis|

Conclusions & Recommendations

Analysis 04

Prinsip-prinsip dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang **Standar Nasional Pendidikan** (..... kurikulum ini harus **menyiapkan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi**, sekaligus mengembangkan karakter dan kemampuan intelektual siswa)

Analysis 03

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan bahwa pendidikan menengah, termasuk Sekolah Menengah Atas (SMA), bertujuan mempersiapkan peserta didik untuk **melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi**. Berbagai regulasi dan dokumen pendidikan di Indonesia menegaskan peran penting sekolah dalam mempersiapkan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi

Latar Belakang



Analysis 01

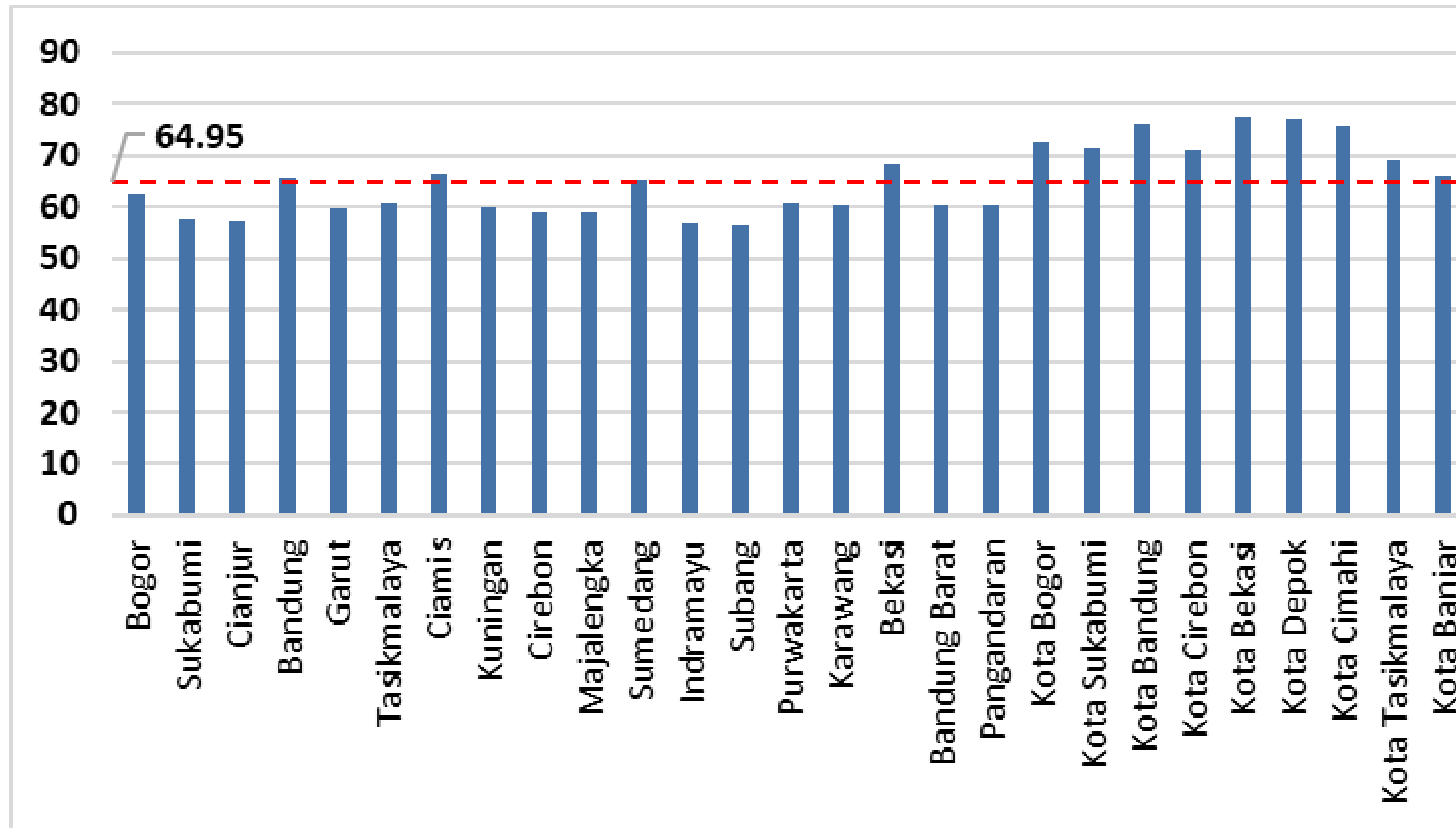
Amanat Konstitusi: Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan dan pemerintah wajib memastikan pemerataan pendidikan. Ini menjadi **dasar konstitusional untuk evaluasi pemerataan** pendidikan di Jawa Barat, memastikan hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak [bermutu] tanpa diskriminasi

Analysis 02

Sila ke 5 Pancasila: "Program pembangunan untuk mencerdaskan bangsa wajib dilakukan secara adil dan inklusif. Manfaatnya dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali, sehingga mampu menciptakan kemajuan yang berkeadilan dan berkelanjutan."

Latar Belakang

Indeks Pendidikan Provinsi Jawa Barat 2022



•Indeks Pendidikan [IP] merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan yang dilakukan pemerintah. IP menggambarkan mutu pendidikan suatu daerah, yang dihitung dengan Harapan Lama Sekolah [12,80 tahun.-2024] dan Rata-rata Lama Sekolah [8,87].

•GAP RLS 9 thn dan HLS 13 thn menunjukkan kesenjangan antara kondisi pendidikan saat ini dan target masa depan, mencerminkan perlu peningkatan kualitas dan akses pendidikan demi generasi mendatang.

Gambar 1. Indeks Pendidikan Kota/Kabupaten Jawa Barat 2022

Bank Dunia: Kualitas Pendidikan Indonesia Masih Rendah

Yuli Yanna Fauzie | CNN Indonesia

Kamis, 07 Jun 2018 11:48 WIB

Bagikan:



4791 data palsu dari pendaftar PPDB 2023

Kadisdik Jabar Pih Sekolahkan Ana SMA Swasta

Yang terjadi saat ini banyak yang memaksakan anak agar masuk ke sekolah tertentu

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Agus Yulianto

ZONASI SEKOLAH

913 Kartu Keluarga terindikasi bermasalah

PPDB an Belum

Modus praktik curang dan Maladministrasi (JPPI)

Latar Belakang

Sekolah Favorit lebih banyak diminati oleh calon siswa

1635 siswa pendaftar di Bogor didiskualifikas [2023].

199 siswa dicoret dalam PPDB karena melakukan pelanggaran aturan domisili jalur zonasi [2024]

Banyak Masalah, Bupati Subang Desak PPDB Dievaluasi

Hukum Ridwan Kamil Sikat Pema Data PPDB 2023

Tim detikJabar - detikJabar

Rabu, 02 Agu 2023 08:15 WIB

Selama dua dekade, Indonesia terus berjuang keluar dari kualitas pembelajaran dasar siswa yang stagnan.

URGENSI:

Evaluasi untuk mendeteksi disparitas mutu Pendidikan di Kab /Kota

01

Belum ada metode evaluasi yang ultimate mengukur kualitas sma sesuai dengan undang-undang. Bukti : tidak ada data tracer study yang dipublikasi oleh pemerintah

02

Oleh karena 1, maka sejatinya kita belum mengetahui keberhasilan pendidikan SMA

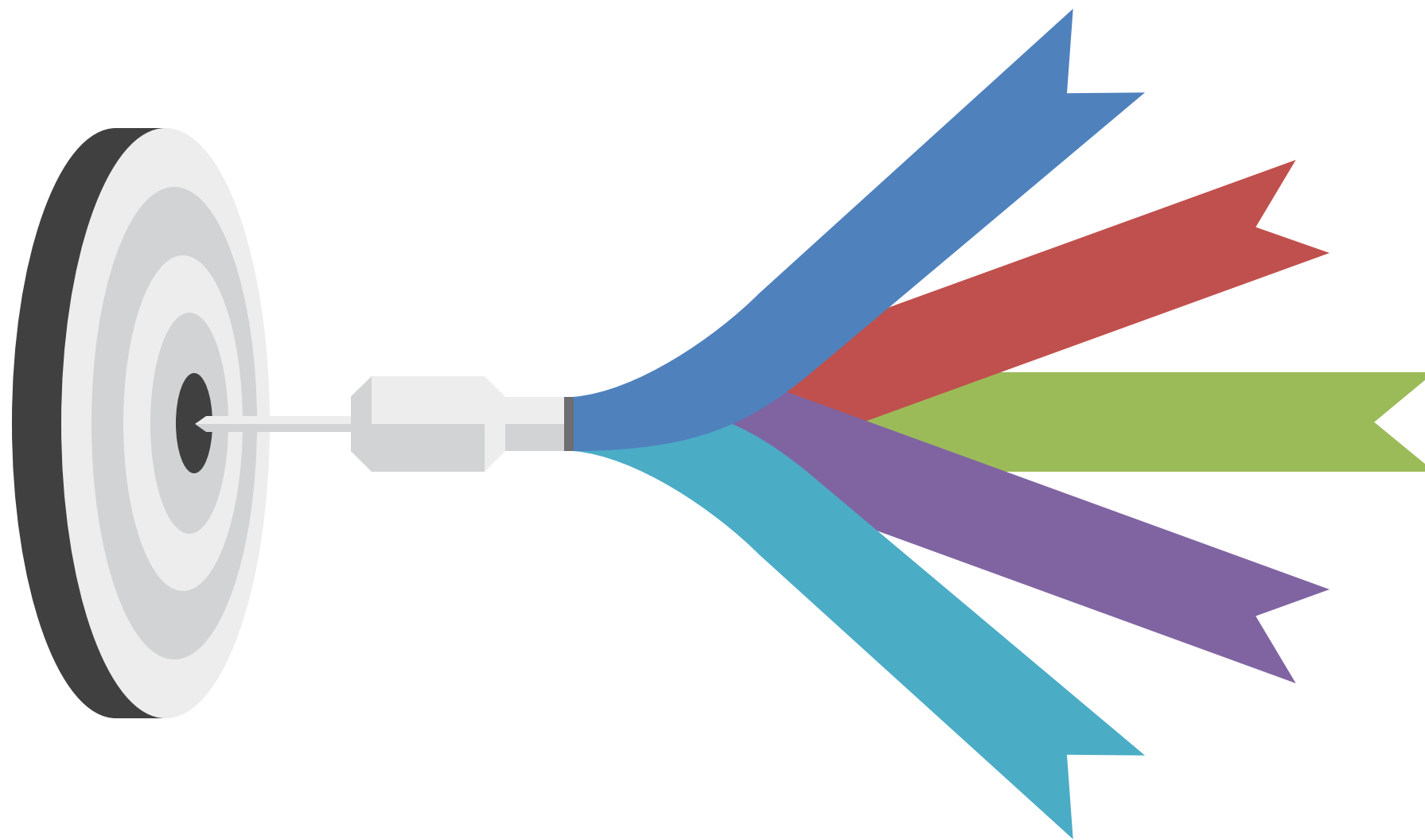
03

karena 2, kita tidak tahu sebaran kualitas pendidikan sma di antara Kabupaten-kota

04

Oleh karena 3, kita tidak dapat menentukan prioritas perbaikan pendidikan SMA berdasarkan Kabupaten-kota

IDENTIFIKASI DAN BATASAN MASALAH



Identifikasi masalah

Diperlukan riset guna memperoleh fakta ilmiah dalam rangka menguji dugaan terjadinya ketidakmerataan mutu Pendidikan [*unverified complaints*] SMA di Jawa Barat.



Batasan Masalah

Riset ini mengkaji ketimpangan Pendidikan level SMA di wilayah Jawa Barat dengan perioda observasi 5 tahun 2018-2022. [isunya pemerataan, menyoroti sila ke 5]



Kajian Literatur: Adakah indicator selain IMU-SMA yang mengukur pelaksanaan UU 20-2003 ?

Judul	Tahun	Penulis	Rangkuman
Perbandingan Analisis Agglomerative Hierarchical Clustering Berdasarkan Indikator Pendidikan di Provinsi Jawa Barat	2023	ASMA' Khoirunnisa'	Dilakukan pemetaan wilayah di Provinsi Jawa Barat berdasarkan indeks pendidikan . Provinsi ini memiliki tingkat putus sekolah tertinggi secara nasional, Distribusi sumber daya pendidikan yang tidak merata, terutama pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi, masih terus terjadi
Analisis Ketimpangan Pendidikan di Jawa Barat Dengan return to education	2023	Nenny Hendajany,	Terdapat perbedaan nilai return to education menggunakan sheepskin effect [indikator ijazah terakhir] antar dan kota di Jawa Barat. Hal ini menunjukkan tidak meratanya mutu pendidikan di Jawa Barat.
EVALUASI mutu INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DASAR DI PROVINSI JAWA BARAT MENGGUNAKAN MODEL MULTI-HAZARD DAN AKSESIBILITAS	2021	M. Rahadianto et al	Evaluasi infrastruktur pendidikan dasar berdasarkan keamanan dari bencana alam, kenyamanan dari polusi udara, serta keterjangkauan jarak sekolah dari tempat di Jawa Barat: banyak sekolah terletak di zona rawan bencana dan terpapar polusi udara, sementara aksesibilitas masih menjadi masalah di daerah pedesaan
The Returns to Education for the United Kingdom. Journal of Applied Economics,	2007	Silles	Nilai return to education [RTE] yang lebih kecil memperlihatkan bahwa pendidikan terjadi lebih merata daripada nilai RTE yang besar]. RTE terlalu tinggi , terjadi ketimpangan pendidikan dan ekonomi, RTE terlalu rendah atau nol , pendidikan tinggi kehilangan nilai ekonominya.Solusi terbaik adalah nilai RTE sedang , di mana pendidikan tinggi tetap memberikan keuntungan tetapi tidak menciptakan kesenjangan ekonomi
Does schooling cause growth? American Economic Review,90(5),1160–1183. https://doi.org/10.1257/aer.90.5.1160	(2000)	Bils & Klenow	Rata-rata negara maju memiliki nilai return to education di bawah 10%, sedangkan untuk negara berkembang banyak di atas 10%.
Estimating the returns to education: Models, methods and results.	2001	Blundell dkk	Return to education merupakan segala keuntungan/manfaat/tingkatpengembalian saat seseorang berinvestasi pada pendidikan. Pembagian return to education ada yang private return dan sosial return

Rasionalisasi

IMU-SMA : Indikator Mutu Ultimate untuk SMA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL Pasal 15: Pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Kurikulum SMA didesain agar alumninya bisa melanjutkan ke perguruan tinggi bermutu.

Apakah **Amanat Undang-undang** itu sudah diimplementasikan dengan baik ? Evaluasi jelas diperlukan dengan cara yang sesuai dengan peruntukan - desain kurikulum SMA. Dalam hal ini evaluasi dilakukan terhadap output proses Pendidikan SMA yaitu dengan cara memeriksa lulusan SMA.. Siswa SMA yang tidak berhasil melanjutkan ke perguruan tinggi bermutu di kota/ dengan mutu SMA rendah merupakan pemborosan uang negara. Oleh karena itu, mereka harus mendapatkan kesempatan untuk masuk ke perguruan tinggi bermutu. Negara sudah membiayai implementasi kurikulum, sarana prasarana, gaji guru yang semua itu didesain sedemikian rupa agar anak SMA melanjutkan ke perguruan tinggi sebagai amanat undang-undang. Apakah semua parameter desain proses SMA itu sudah berhasil? Perlu evaluasi. Dengan cara memeriksa **HASILNYA** kita bisa klaim bahwa proses SMA sudah baik. **Hasil yang baik mencerminkan proses yang baik , proses yang baik tidak menjamin hasil yang baik. Klaim proses yang baik akan menghasilkan lulusan yang baik merupakan pernyataan bersifat harapan-ekspektasi-hipotesis (tidak cukup hanya memeriksa mutu proses)**

Berdasarkan landasan konstitusional dan pemikiran di atas dikembangkan secara spesifik parameter mutu SMA baru yaitu **Indikator mutu ultimate, IMU-SMA** yang merupakan angka penerimaan alumni SMA di perguruan tinggi terkemuka. ***Ultimate indicator for senior high school quality.***

Tiga langkah evaluasi implementasi amanat UU dalam pendidikan SMA:

1. Evaluasi Mutu dan output :Pemerintah mengukur mutu lulusan SMA, terutama dalam kesiapan mereka melanjutkan ke perguruan tinggi terkemuka.
2. Program Peningkatan Mutu :Pemerintah daerah menyusun program peningkatan mutu SMA, terutama di daerah dengan mutu rendah, dengan fokus pada penguatan kurikulum agar siswa lebih siap bersaing masuk perguruan tinggi.
3. Penerapan metoda Evaluasi IMU-SMA: Menggunakan parameter baru 'IMU-SMA' untuk menilai keberhasilan SMA berdasarkan jumlah alumninya yang diterima di perguruan tinggi berkualitas.

3 langkah ini, dirancang untuk memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan sehingga pemerintah dapat lebih efektif melaksanakan amanat Undang-Undang, dengan tujuan memastikan setiap siswa SMA mendapatkan kesempatan yang adil dan optimal untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi.

Rasionalisasi Kegiatan: Poin Penting IMU-SMA dalam Evaluasi Pendidikan SMA

$IMU-SMA = \sum_{i=1}^n S_i$, adalah jumlah siswa yang diterima di universitas terkemuka dari Kab-kota di Jawa Barat (ada 27 Kab-kota), $i=1,2,3,\dots,27$

1. Keunggulan Evaluasi Spesifik: Indikator-indikator pemerataan Pendidikan, Indeks Pendidikan, Return to Education bersifat makro dan tidak memberikan informasi strategis spesifik. IMU-SMA (jumlah siswa yang diterima di **Highly demanded University**, HDU yang mencakup universitas dengan peringkat tinggi [**WUR**] dan **favorit**. **HDU** comply UU? Kita ingin ukur disparitas.kita Gunakan HQM dan berhasil. **Diskriminatif (all good-all bad-memang good/bad-bad measure)**)
2. Analisis dan Perbandingan Kinerja: IMU-SMA memperlihatkan perbedaan mutu pendidikan antar Kab-kota, mencerminkan mutu pendidikan di level SMA. Ini memungkinkan perbandingan kinerja SMA secara jelas, analogi perbandingan perolehan medali emas antar negara atau kursi DPR antar partai.
3. Peta Distribusi mutu : Berdasarkan IMU-SMA, dihasilkan **Quality Distribution Maps (QDiM)**, memberikan gambaran strategis distribusi mutu pendidikan SMA. QDiM mengidentifikasi kesenjangan dan target perbaikan mutu pendidikan.

IMU-SMA menilai secara efektif kemampuan SMA mempersiapkan siswa ke pendidikan tinggi(**output based**) dibandingkan indikator RTE(Lulusan SMA harus meneruskan ke universitas bukan memiliki penghasilan).

MAKSUD PENELITIAN

Memetakan distribusi mutu pendidikan pada seluruh kota/ di Provinsi Jawa Barat menggunakan Quality Distribution Maps (QDiM) berbasis Statistical Control Chart.

TUJUAN PENELITIAN

klasifikasi distribusi mutu pendidikan pada satuan /Kota disertai informasi fokus upaya perbaikan berupa daftar /Kota dengan urgensi perbaikan tertinggi

Mengusulkan metode yang efektif untuk evaluasi mutu SMA dan merekomendasikan Upaya pemerataan mutu SMA di Jawa barat.

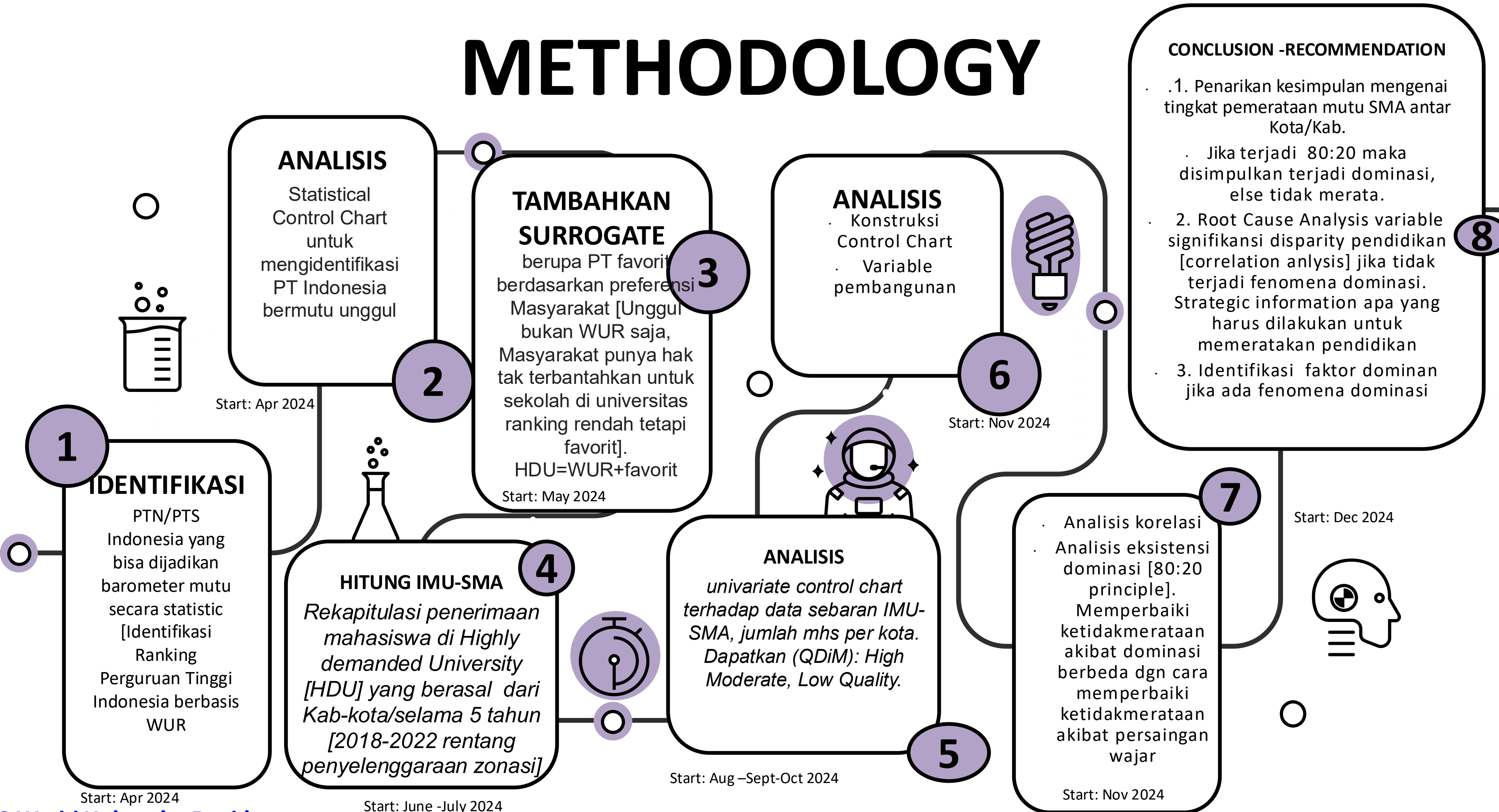
Metoda Evaluasi Ultimate diadopsi sebagai metode standar evaluasi mutu Pendidikan SMA



**UNIVERSITAS
PADJADJARAN**

PROGRAM STUDI S1 STATISTIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN
ILMU PENGETAHUAN ALAM

METHODOLOGY



1

IDENTIFIKASI

PTN/PTS Indonesia yang bisa dijadikan barometer mutu secara statistic [Identifikasi Ranking Perguruan Tinggi Indonesia berbasis WUR]

Start: Apr 2024

ANALISIS

Statistical Control Chart untuk mengidentifikasi PT Indonesia bermutu unggul

Start: Apr 2024

2

TAMBAHKAN SURROGATE

berupa PT favorit berdasarkan preferensi Masyarakat [Unggul bukan WUR saja, Masyarakat punya hak tak terbantahkan untuk sekolah di universitas ranking rendah tetapi favorit]. HDU=WUR+favorit

Start: May 2024

3

4

HITUNG IMU-SMA

Rekapitulasi penerimaan mahasiswa di Highly demanded University [HDU] yang berasal dari Kab-kota/selama 5 tahun [2018-2022 rentang penyelenggaraan zonasi]

Start: June -July 2024

5

ANALISIS

univariate control chart terhadap data sebaran IMU-SMA, jumlah mhs per kota. Dapatkan (QDiM): High Moderate, Low Quality.

Start: Aug -Sept-Oct 2024

6

ANALISIS

Konstruksi Control Chart Variable pembangunan

Start: Nov 2024

7

Analisis korelasi Analisis eksistensi dominasi [80:20 principle]. Memperbaiki ketidakmerataan akibat dominasi berbeda dgn cara memperbaiki ketidakmerataan akibat persaingan wajar

Start: Nov 2024

8

CONCLUSION -RECOMMENDATION

- .1. Penarikan kesimpulan mengenai tingkat pemerataan mutu SMA antar Kota/Kab.
 - . Jika terjadi 80:20 maka disimpulkan terjadi dominasi, else tidak merata.
- . 2. Root Cause Analysis variable signifikansi disparity pendidikan [correlation anlysis] jika tidak terjadi fenomena dominasi. Strategic information apa yang harus dilakukan untuk memeratakan pendidikan
- . 3. Identifikasi faktor dominan jika ada fenomena dominasi

Data Penelitian

Data Jumlah Siswa yang diterima di HDU (Highly Demanded University)

Tabel 1. Data Jumlah Siswa yang Diterima di HDU

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Mahasiswa				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kabupaten Bandung	1191	1693	1935	5083	5508
2	Kabupaten Bandung Barat	536	653	782	2168	2418
3	Kabupaten Bekasi	496	588	720	1257	1519
4	Kabupaten Bogor	772	833	1082	1935	2280
5	Kabupaten Ciamis	211	201	224	680	673
6	Kabupaten Cianjur	223	231	322	870	918
7	Kabupaten Cirebon	326	283	347	906	862
8	Kabupaten Garut	366	425	489	1446	1249
9	Kabupaten Indramayu	209	182	197	561	531
10	Kabupaten Karawang	197	230	265	660	687
11	Kabupaten Kuningan	209	208	232	609	652
12	Kabupaten Majalengka	204	231	243	721	761
13	Kabupaten Pangandaran	20	11	13	10	4
14	Kabupaten Purwakarta	169	208	237	719	787
15	Kabupaten Subang	222	250	294	832	905
16	Kabupaten Sukabumi	334	349	408	1079	1165
17	Kabupaten Sumedang	374	593	638	1539	1738
18	Kabupaten Tasikmalaya	232	210	299	924	946
19	Kota Bandung	2339	3296	3417	8285	8948
20	Kota Banjar	39	35	37	85	95
21	Kota Bekasi	881	1082	1201	1800	2056
22	Kota Bogor	699	841	932	1260	1477
23	Kota Cimahi	356	535	568	1428	1542
24	Kota Cirebon	148	152	174	388	409
25	Kota Depok	509	682	694	935	1124
26	Kota Sukabumi	143	182	197	503	612
27	Kota Tasikmalaya	196	248	238	658	712

HDU: UNPAD, UPI, ITB,
UI, IPB, UGM

Data Jumlah Mahasiswa yang diterima di HDU (Highly Demanded University)

Tabel 2. Data Jumlah Siswa yang Diterima di HDU (Per Universitas)

No	UGM					IPB					ITB					UPI					UI	UNPAD					
	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kabupaten Bandung	45	54	52	73	80	38	24	46	44	50	155	149	153	157	187	771	994	1162	4339	4641	340	182	472	522	470	550
2	Kabupaten Bandung Barat	21	32	25	11	13	15	25	49	42	54	105	85	76	75	107	351	394	508	1917	2092	168	44	117	124	123	152
3	Kabupaten Bekasi	165	115	162	121	107	76	77	86	93	124	66	77	80	70	92	134	191	259	860	1036	1,139	55	128	133	113	160
4	Kabupaten Bogor	162	152	183	117	100	211	208	292	354	475	89	109	107	126	145	219	232	311	1141	1337	2,364	91	132	189	197	223
5	Kabupaten Ciamis	20	28	23	57	47	19	14	18	18	28	10	2	5	8	11	133	112	147	570	557	66	29	45	31	27	30
6	Kabupaten Cianjur	13	7	12	19	16	48	37	48	45	63	9	8	13	9	15	136	142	202	744	761	108	17	37	47	53	63
7	Kabupaten Cirebon	55	39	59	81	56	21	7	19	26	34	52	43	28	41	56	168	129	181	694	671	235	30	65	60	64	45
8	Kabupaten Garut	12	15	21	45	35	41	30	48	59	62	30	14	22	26	34	235	278	306	1237	1035	125	48	88	92	79	83
9	Kabupaten Indramayu	23	30	31	28	37	56	33	36	39	33	7	6	14	21	15	104	83	92	452	424	87	19	30	24	21	22
10	Kabupaten Karawang	34	39	37	39	34	19	17	23	21	31	15	14	13	18	22	100	111	137	532	556	206	29	49	55	50	44
11	Kabupaten Kuningan	16	14	25	26	31	45	36	38	54	46	21	22	12	21	22	101	93	120	474	517	107	26	43	37	34	36
12	Kabupaten Majalengka	21	14	19	20	18	10	14	17	13	25	5	10	7	13	13	143	149	157	644	665	67	25	44	43	31	40
13	Kabupaten Pangandaran	0	0	0	0	0	20	11	13	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kabupaten Purwakarta	14	14	9	17	20	4	6	12	12	18	10	11	14	15	17	118	135	160	632	695	100	23	42	42	43	37
15	Kabupaten Subang	12	15	11	13	20	39	24	34	25	32	10	7	15	7	20	141	170	194	758	801	60	20	34	40	29	32
16	Kabupaten Sukabumi	12	20	20	25	16	88	70	110	116	138	11	7	6	14	10	185	173	218	851	937	179	38	79	54	73	64
17	Kabupaten Sumedang	12	7	7	11	10	27	25	28	25	34	26	17	22	19	24	238	269	346	1322	1432	69	71	275	235	162	238
18	Kabupaten Tasikmalaya	13	12	17	19	21	8	5	10	13	20	11	7	6	4	8	179	151	236	853	870	63	21	35	30	35	27
19	Kota Bandung	119	183	112	262	268	90	81	142	164	150	614	598	552	601	690	1159	1533	1562	6360	6755	1,103	357	901	1049	898	1085
20	Kota Banjar	7	12	3	2	3	8	0	4	6	5	1	0	0	0	1	11	8	15	64	76	16	12	15	15	13	10
21	Kota Bekasi	283	310	299	256	211	149	133	158	209	230	217	203	222	238	280	127	179	230	808	986	4,551	105	257	292	289	349
22	Kota Bogor	82	108	113	102	79	448	404	479	539	608	65	96	106	80	101	57	97	125	422	524	1,596	47	136	109	117	165
23	Kota Cimahi	21	30	25	14	18	15	14	14	17	16	80	81	72	85	92	202	272	316	1202	1291	191	38	138	141	110	125
24	Kota Cirebon	38	25	32	43	55	26	19	16	29	26	19	31	29	27	36	45	56	72	261	263	176	20	21	25	28	29
25	Kota Depok	147	189	160	84	82	109	148	161	176	221	116	134	120	136	171	68	72	100	370	424	5,526	69	139	153	169	226
26	Kota Sukabumi	14	16	8	17	20	32	30	35	38	54	8	9	11	13	22	72	80	110	399	456	105	17	47	33	36	60
27	Kota Tasikmalaya	32	46	45	46	57	18	17	26	28	24	11	20	15	23	21	115	124	117	528	575	100	20	41	35	33	35

Data 10 Variabel Ekonomi

Tabel 3. PDRB Harga Konstan

No	Kota/Kabupaten	PDRB 2018	PDRB 2019	PDRB 2020	PDRB 2021	PDRB 2022
1	Kabupaten Bandung	20879	22321	22433	22898	23782
2	Kabupaten Bandung Barat	17752	18773	17198	17474	18080
3	Kabupaten Bekasi	66636	68158	78345	79728	82472
4	Kabupaten Bogor	25373	26709	28476	29072	30173
5	Kabupaten Ciamis	17565	18329	17898	18401	19169
6	Kabupaten Cianjur	13412	13900	12869	13124	13590
7	Kabupaten Cirebon	14779	15421	14696	14897	15342
8	Kabupaten Garut	14282	14939	14949	15349	15991
9	Kabupaten Indramayu	33904	34629	32336	32162	32727
10	Kabupaten Karawang	67345	70240	64852	67627	70840
11	Kabupaten Kuningan	14725	15560	14495	14812	15426
12	Kabupaten Majalengka	16682	17759	16704	17278	18197
13	Kabupaten Pangandaran	18401	19307	18304	18762	19488
14	Kabupaten Purwakarta	46508	48924	45549	46309	47924
15	Kabupaten Subang	17358	18264	17797	18004	18580
16	Kabupaten Sukabumi	17938	18651	17010	17359	17953
17	Kabupaten Sumedang	19574	20490	20552	21059	21972
18	Kabupaten Tasikmalaya	13316	13789	13081	13367	13829
19	Kota Bandung	20879	77545	79032	81704	85820
20	Kota Banjar	16777	17291	16229	16544	16983
21	Kota Bekasi	22458	23580	26629	27212	28283
22	Kota Bogor	27729	29643	30893	31712	33153
23	Kota Cimahi	34867	38002	39336	40718	42857
24	Kota Cirebon	50011	53245	50074	50928	52838
25	Kota Depok	19731	20802	23497	23945	24756
26	Kota Sukabumi	25162	26527	24724	25231	26161
27	Kota Tasikmalaya	22421	23320	21601	22075	22879

Tabel 4. PDRB Harga Berlaku

No	Kota/Kabupaten	PDRB 2018	PDRB 2019	PDRB 2020	PDRB 2021	PDRB 2022
1	Kabupaten Bandung	30394	33527	34206	35590	38455
2	Kabupaten Bandung Barat	26019	28209	26088	26879	28653
3	Kabupaten Bekasi	84155	88370	102419	107788	114338
4	Kabupaten Bogor	37535	40389	43586	45339	48096
5	Kabupaten Ciamis	24474	26273	26048	27218	29472
6	Kabupaten Cianjur	19009	20373	19241	20002	21232
7	Kabupaten Cirebon	20908	22506	21869	22833	24468
8	Kabupaten Garut	20349	22116	22480	23356	25346
9	Kabupaten Indramayu	43579	46279	43308	44072	48494
10	Kabupaten Karawang	92272	98626	91873	98726	107067
11	Kabupaten Kuningan	21186	23152	21996	22805	24682
12	Kabupaten Majalengka	23429	25812	24708	25930	28289
13	Kabupaten Pangandaran	26064	28206	27195	28366	30445
14	Kabupaten Purwakarta	66201	71580	67349	69976	74345
15	Kabupaten Subang	23762	25983	25209	26292	28386
16	Kabupaten Sukabumi	25040	26968	24836	25616	27165
17	Kabupaten Sumedang	28292	30341	30821	32130	34464
18	Kabupaten Tasikmalaya	19428	20925	20120	20855	22378
19	Kota Bandung	105601	113177	116056	121126	133378
20	Kota Banjar	22463	23508	22184	22892	23812
21	Kota Bekasi	31031	33330	37999	39527	42421
22	Kota Bogor	38530	42403	44100	45921	49755
23	Kota Cimahi	48107	54268	56715	59906	65257
24	Kota Cirebon	68419	74398	70468	72749	78004
25	Kota Depok	27620	30079	34358	35659	38226
26	Kota Sukabumi	35163	37928	35926	37209	39820
27	Kota Tasikmalaya	30145	32213	30223	31556	34050

Tabel 5. Gini Ratio

No	Kabupaten/Kota	Gini 2018	Gini 2019	Gini 2020	Gini 2021	Gini 2022
1	Kabupaten Bandung	0.418	0.355	0.414	0.386	0.37
2	Kabupaten Bandung Barat	0.394	0.362	0.376	0.356	0.368
3	Kabupaten Bekasi	0.356	0.354	0.372	0.34	0.373
4	Kabupaten Bogor	0.416	0.404	0.381	0.396	0.4
5	Kabupaten Ciamis	0.309	0.354	0.336	0.342	0.337
6	Kabupaten Cianjur	0.37	0.363	0.35	0.372	0.313
7	Kabupaten Cirebon	0.364	0.344	0.338	0.339	0.355
8	Kabupaten Garut	0.371	0.352	0.352	0.322	0.302
9	Kabupaten Indramayu	0.316	0.284	0.319	0.321	0.3
10	Kabupaten Karawang	0.331	0.357	0.327	0.374	0.353
11	Kabupaten Kuningan	0.397	0.435	0.361	0.349	0.345
12	Kabupaten Majalengka	0.365	0.347	0.336	0.354	0.367
13	Kabupaten Pangandaran	0.303	0.31	0.335	0.32	0.294
14	Kabupaten Purwakarta	0.397	0.399	0.414	0.388	0.367
15	Kabupaten Subang	0.334	0.333	0.35	0.329	0.36
16	Kabupaten Sukabumi	0.329	0.347	0.334	0.343	0.309
17	Kabupaten Sumedang	0.42	0.344	0.384	0.359	0.394
18	Kabupaten Tasikmalaya	0.353	0.322	0.343	0.378	0.378
19	Kota Bandung	0.423	0.442	0.402	0.427	0.459
20	Kota Banjar	0.322	0.302	0.312	0.341	0.362
21	Kota Bekasi	0.336	0.352	0.352	0.401	0.441
22	Kota Bogor	0.389	0.386	0.412	0.441	0.43
23	Kota Cimahi	0.364	0.437	0.38	0.415	0.408
24	Kota Cirebon	0.432	0.408	0.421	0.489	0.468
25	Kota Depok	0.365	0.344	0.344	0.367	0.394
26	Kota Sukabumi	0.41	0.419	0.397	0.436	0.482
27	Kota Tasikmalaya	0.39	0.36	0.366	0.414	0.405

Tabel 6. Indeks Pembangunan Manusia

No	Kabupaten/Kota	IPM 2018	IPM 2019	IPM 2020	IPM 2021	IPM 2022
1	Kabupaten Bandung	72	72	72.39	72.73	73.16
2	Kabupaten Bandung Barat	67	68	68.08	68.29	69.04
3	Kabupaten Bekasi	73	74	74.07	74.45	75.22
4	Kabupaten Bogor	70	71	70.4	70.6	71.2
5	Kabupaten Ciamis	70	70	70.49	70.93	71.45
6	Kabupaten Cianjur	65	65	65.36	65.56	65.94
7	Kabupaten Cirebon	68	69	68.75	69.12	70.06
8	Kabupaten Garut	65	66	66.12	66.45	67.41
9	Kabupaten Indramayu	66	67	67.29	67.64	68.55
10	Kabupaten Karawang	70	71	70.66	70.94	71.74
11	Kabupaten Kuningan	69	69	69.38	69.71	70.16
12	Kabupaten Majalengka	67	68	67.59	67.81	68.56
13	Kabupaten Pangandaran	67	68	68.06	68.28	69.03
14	Kabupaten Purwakarta	70	71	70.82	70.98	71.56
15	Kabupaten Subang	68	69	68.95	69.13	69.87
16	Kabupaten Sukabumi	66	67	66.88	67.07	67.64
17	Kabupaten Sumedang	71	71	71.64	71.8	72.69
18	Kabupaten Tasikmalaya	65	66	65.67	65.9	66.84
19	Kota Bandung	81	82	81.51	81.96	82.5
20	Kota Banjar	71	72	71.7	71.92	72.55
21	Kota Bekasi	81	82	81.5	81.95	82.46
22	Kota Bogor	76	76	76.11	76.59	77.17
23	Kota Cimahi	78	78	77.83	78.06	78.77
24	Kota Cirebon	74	75	74.89	75.25	75.89
25	Kota Depok	80	81	80.97	81.37	81.86
26	Kota Sukabumi	74	74	74.21	74.6	75.4
27	Kota Tasikmalaya	72	73	73.04	73.31	73.83

Tabel 7. Indeks Kedalaman Kemiskinan

No	Kabupaten/Kota	IKM 2018	IKM 2019	IKM 2020	IKM 2021	IKM 2022
1	Kabupaten Bandung	0.87	1.04	0.92	1.23	0.9
2	Kabupaten Bandung Barat	1.45	1.54	1.4	1.62	1.7
3	Kabupaten Bekasi	0.65	0.6	0.72	0.91	0.74
4	Kabupaten Bogor	1.12	0.83	0.83	1.36	1.49
5	Kabupaten Ciamis	1.18	0.76	0.92	0.88	1.07
6	Kabupaten Cianjur	1.34	0.74	1.38	1.83	1.35
7	Kabupaten Cirebon	2.04	1.29	1.3	1.94	2.27
8	Kabupaten Garut	1.49	0.87	0.97	1.4	1.81
9	Kabupaten Indramayu	2.23	1.66	2.18	2.46	1.72
10	Kabupaten Karawang	1.21	1.06	1.28	1.27	1.58
11	Kabupaten Kuningan	1.73	1.24	2.41	2.02	2.14
12	Kabupaten Majalengka	1.96	1.39	1.41	2.44	1.55
13	Kabupaten Purwakarta	0.87	1.24	1.04	1.31	1.19
14	Kabupaten Subang	1.7	1.39	1.29	1.93	1.55
15	Kabupaten Sukabumi	0.86	0.66	0.8	1.04	0.93
16	Kabupaten Sumedang	1.72	1.05	1.72	1.72	1.98
17	Kabupaten Tasikmalaya	1.19	0.84	0.83	1.57	1.42
18	Kota Bandung	0.48	0.53	0.61	0.78	0.7
19	Kota Banjar	0.79	0.57	0.7	1.19	1.02
20	Kota Bekasi	0.72	0.47	0.6	0.66	0.96
21	Kota Bogor	0.77	0.72	1.08	1.1	1.27
22	Kota Cimahi	0.84	0.6	0.75	0.93	0.67
23	Kota Cirebon	0.99	1.23	1.68	2.22	1.34
24	Kota Depok	0.31	0.24	0.29	0.34	0.42
25	Kota Sukabumi	1.09	1.08	1.17	1.39	1.27
26	Kota Tasikmalaya	1.52	1.98	1.75	2.42	2.34

Tabel 8. Tingkat Pengangguran Terbuka

No	Kabupaten/Kota	TPK 2018	TPK 2019	TPK 2020	TPK 2021	TPK 2022
1	Kabupaten Bandung	5.07	5.51	8.58	8.32	6.98
2	Kabupaten Bandung Barat	8.55	8.24	12.25	11.65	9.63
3	Kabupaten Bekasi	9.74	9	11.54	10.09	10.31
4	Kabupaten Bogor	9.83	9.11	14.29	12.22	10.64
5	Kabupaten Ciamis	4.64	5.16	5.66	5.06	3.75
6	Kabupaten Cianjur	10.23	9.81	11.05	9.32	8.41
7	Kabupaten Cirebon	10.64	10.35	11.52	10.38	8.11
8	Kabupaten Garut	7.12	7.35	8.95	8.68	7.6
9	Kabupaten Indramayu	8.46	8.35	9.21	8.3	6.49
10	Kabupaten Karawang	9.12	9.68	11.52	11.83	9.87
11	Kabupaten Kuningan	9.1	9.68	11.22	11.68	9.81
12	Kabupaten Majalengka	5	4.37	5.84	5.71	4.16
13	Kabupaten Purwakarta	9.94	9.73	11.07	10.7	8.75
14	Kabupaten Subang	8.71	8.68	9.48	9.77	7.77
15	Kabupaten Sukabumi	7.84	8.05	9.6	9.51	7.77
16	Kabupaten Sumedang	7.54	7.7	9.89	9.18	7.72
17	Kabupaten Tasikmalaya	6.92	6.31	7.12	6.16	4.17
18	Kota Bandung	8.05	8.18	11.19	11.46	9.55
19	Kota Banjar	5.95	6.16	6.73	6.09	5.53
20	Kota Bekasi	9.14	8.3	10.68	10.88	8.81
21	Kota Bogor	9.74	9.16	12.68	11.79	10.78
22	Kota Cimahi	8	8.09	13.3	13.07	10.77
23	Kota Cirebon	9.07	9.04	10.97	10.53	8.42
24	Kota Depok	6.66	6.12	9.87	9.76	7.82
25	Kota Sukabumi	8.57	8.49	12.17	10.78	8.83
26	Kota Tasikmalaya	6.89	6.78	7.99	7.66	6.62

Tabel 9. Jumlah Penduduk Miskin

No	Kota/Kabupaten	JPM 2018	JPM 2019	JPM 2020	JPM 2021	JPM 2022
1	Kabupaten Bandung	246.1	223.2	263.6	269.2	258.6
2	Kabupaten Bandung Barat	169	159	179.5	190.8	183.7
3	Kabupaten Bekasi	157.2	149.4	186.3	202.7	201.1
4	Kabupaten Bogor	415	395	465.7	491.2	474.7
5	Kabupaten Ciamis	85.7	79.4	91.4	96.6	94
6	Kabupaten Cianjur	221.6	207.1	234.5	260	246.8
7	Kabupaten Cirebon	232.4	217.6	247.9	271	266.1
8	Kabupaten Garut	241.3	235.2	262.8	281.4	276.7
9	Kabupaten Indramayu	204.2	191.9	220.3	228.6	225
10	Kabupaten Karawang	188	173.7	195.4	210.8	199.9
11	Kabupaten Kuningan	131.2	123.2	139.2	143.4	140.3
12	Kabupaten Majalengka	129.3	121.1	138.2	151.1	147.1
13	Kabupaten Pangandaran	32.2	30.7	36.1	39.1	37.9
14	Kabupaten Purwakarta	75.9	71.9	80.2	84.3	83.4
15	Kabupaten Subang	136.6	129.2	149.8	159	155.3
16	Kabupaten Sukabumi	166.3	153.3	175.1	194.4	186.3
17	Kabupaten Sumedang	112.1	104.2	118.4	126.3	120.1
18	Kabupaten Tasikmalaya	172.4	159.9	181.5	200.6	194.1
19	Kota Bandung	89.4	84.7	100	112.5	109.8
20	Kota Banjar	10.4	10.1	11.2	13.4	12.7
21	Kota Bekasi	119.8	113.7	134	144.1	137.4
22	Kota Bogor	64.9	64	75	80.1	79.2
23	Kota Cimahi	29.9	26.9	31.6	32.5	31.2
24	Kota Cirebon	28	26.8	30.6	32	31.5
25	Kota Depok	49.4	49.4	60.4	63.9	64.4
26	Kota Sukabumi	23.2	21.9	25.4	27.2	26.6
27	Kota Tasikmalaya	84.2	77	86.1	89.5	87.1

Tabel 10. Partisipasi Angkatan Kerja

No	Kota/Kabupaten	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kabupaten Bandung	61.79	65.32	62.2	65.12	63.64
2	Kabupaten Bandung Barat	61.26	61.97	59.91	60.75	64.37
3	Kabupaten Bekasi	61.43	64.02	64.23	65.87	65.41
4	Kabupaten Bogor	62.75	65.41	62.65	62.55	63.75
5	Kabupaten Ciamis	66.67	67.39	71.41	69.83	68.47
6	Kabupaten Cianjur	60.22	66	69.26	67.98	69.98
7	Kabupaten Cirebon	61.75	65.23	63.79	64.49	65.53
8	Kabupaten Garut	60.06	62.6	61.11	62.76	68.84
9	Kabupaten Indramayu	64.88	67.69	69.53	69.86	69.08
10	Kabupaten Karawang	64.77	63.57	64.9	64.19	65.51
11	Kabupaten Kuningan	58.53	61.2	61.98	63.82	61.8
12	Kabupaten Majalengka	65.64	67.83	69.66	67.63	66.21
13	Kabupaten Pangandaran	77.74	75.08	76.79	74.75	79.92
14	Kabupaten Purwakarta	63.12	63.88	60.91	61.13	65.21
15	Kabupaten Subang	64.35	67.67	66.7	67.78	68.87
16	Kabupaten Sukabumi	62.71	62.65	61.56	64.93	69.11
17	Kabupaten Sumedang	61.93	63.9	68.96	68.51	64.63
18	Kabupaten Tasikmalaya	64.07	66.46	69.54	68.18	67.83
19	Kota Bandung	61.86	65.9	64.71	65.31	69.42
20	Kota Banjar	64.93	67.59	67.35	64.07	63.76
21	Kota Bekasi	65.23	65.66	64.74	64.76	65.33
22	Kota Bogor	63.11	63.68	60.81	61.77	64.21
23	Kota Cimahi	64.4	63.26	62.67	61.79	67.22
24	Kota Cirebon	67.89	62.71	63.76	62.87	65.42
25	Kota Depok	62.51	64.96	63.96	62.62	63.35
26	Kota Sukabumi	59.62	62.48	55.74	56.86	62.48
27	Kota Tasikmalaya	62.63	65.26	66.54	65.75	65.99

Tabel 11. Jumlah Angkatan Kerja

No	Kota/kabupaten	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kabupaten Bandung	1653796	1776063	1717376	1824927	1808799
2	Kabupaten Bandung Barat	747616	764951	747644	765935	819559
3	Kabupaten Bekasi	1629297	1771709	1840666	1953408	2006507
4	Kabupaten Bogor	2622517	2793841	2733670	2786372	2897332
5	Kabupaten Ciamis	620036	633945	679192	671063	664523
6	Kabupaten Cianjur	1007714	1117349	1185595	1175885	1222589
7	Kabupaten Cirebon	1004732	1073047	1060362	1082691	1110529
8	Kabupaten Garut	1109996	1170994	1156180	1200346	1330353
9	Kabupaten Indramayu	859123	906315	940706	954521	952841
10	Kabupaten Karawang	1136301	1127198	1162633	1161202	1195947
11	Kabupaten Kuningan	481807	509531	521677	542782	530825
12	Kabupaten Majalengka	612392	639995	664374	651599	644128
13	Kabupaten Pangandaran	243293	237582	245619	241542	260761
14	Kabupaten Purwakarta	438515	448735	432428	438371	472075
15	Kabupaten Subang	778386	827714	824467	846262	868132
16	Kabupaten Sukabumi	1142067	1154199	1146833	1222156	1313905
17	Kabupaten Sumedang	560360	584647	637668	639867	609471
18	Kabupaten Tasikmalaya	850644	892701	944706	936109	940713
19	Kota Bandung	1232747	1326370	1314930	1339128	1435635
20	Kota Banjar	92618	97471	98212	94378	94831
21	Kota Bekasi	1452009	1496488	1509841	1544421	1592545
22	Kota Bogor	519693	531597	514323	529003	556541
23	Kota Cimahi	296075	293749	293754	292252	320574
24	Kota Cirebon	163184	152379	156500	155798	163639
25	Kota Depok	1096952	1176722	1195632	1207111	1258739
26	Kota Sukabumi	146230	154907	139657	143914	159618
27	Kota Tasikmalaya	316261	333149	343285	342585	347063

Tabel 12. Angka Ketergantungan

No	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2022
1	Kabupaten Bandung	49.53	49.38	49.27	45.31
2	Kabupaten Bandung Barat	51.6	51.49	51.44	44.52
3	Kabupaten Bekasi	43.04	42.88	42.75	39.64
4	Kabupaten Bogor	49.14	48.96	48.83	41.25
5	Kabupaten Ciamis	49.27	49.26	49.34	46.53
6	Kabupaten Cianjur	52.13	51.97	51.88	45.8
7	Kabupaten Cirebon	47.16	47.07	47.04	40.78
8	Kabupaten Garut	57.75	57.59	57.5	47.16
9	Kabupaten Indramayu	44.62	44.51	44.48	39.54
10	Kabupaten Karawang	44.72	44.61	44.55	40.95
11	Kabupaten Kuningan	50.83	50.82	50.89	46.55
12	Kabupaten Majalengka	48.21	48.19	48.24	43.1
13	Kabupaten Pangandaran	46.93	46.91	46.97	44.6
14	Kabupaten Purwakarta	49.05	48.93	48.86	43.95
15	Kabupaten Subang	46.4	46.37	46.41	41.08
16	Kabupaten Sukabumi	52.11	51.97	51.9	44.28
17	Kabupaten Sumedang	47.76	47.78	47.87	46.26
18	Kota Bandung	38.32	38.27	38.25	41.87
19	Kota Banjar	48.07	48.02	48.05	44.64
20	Kota Bekasi	36.93	36.74	36.58	38.63
21	Kota Bogor	42.11	41.99	41.91	42.62
22	Kota Cimahi	40.39	40.29	40.22	39.84
23	Kota Cirebon	42.72	42.59	42.51	43.48
24	Kota Depok	40.07	39.91	39.78	40.94
25	Kota Sukabumi	46.86	46.76	46.72	45.38
26	Kota Tasikmalaya	46.72	46.61	46.55	45.57

PENENTUAN HDU

Penentuan Universitas yang dijadikan barometer mutu berbasis World University Ranking (WUR)

Control Chart Barometer Kualitas

Nilai UCL = 34,063 Sigma = 1.3

Nilai LCL = 3,15

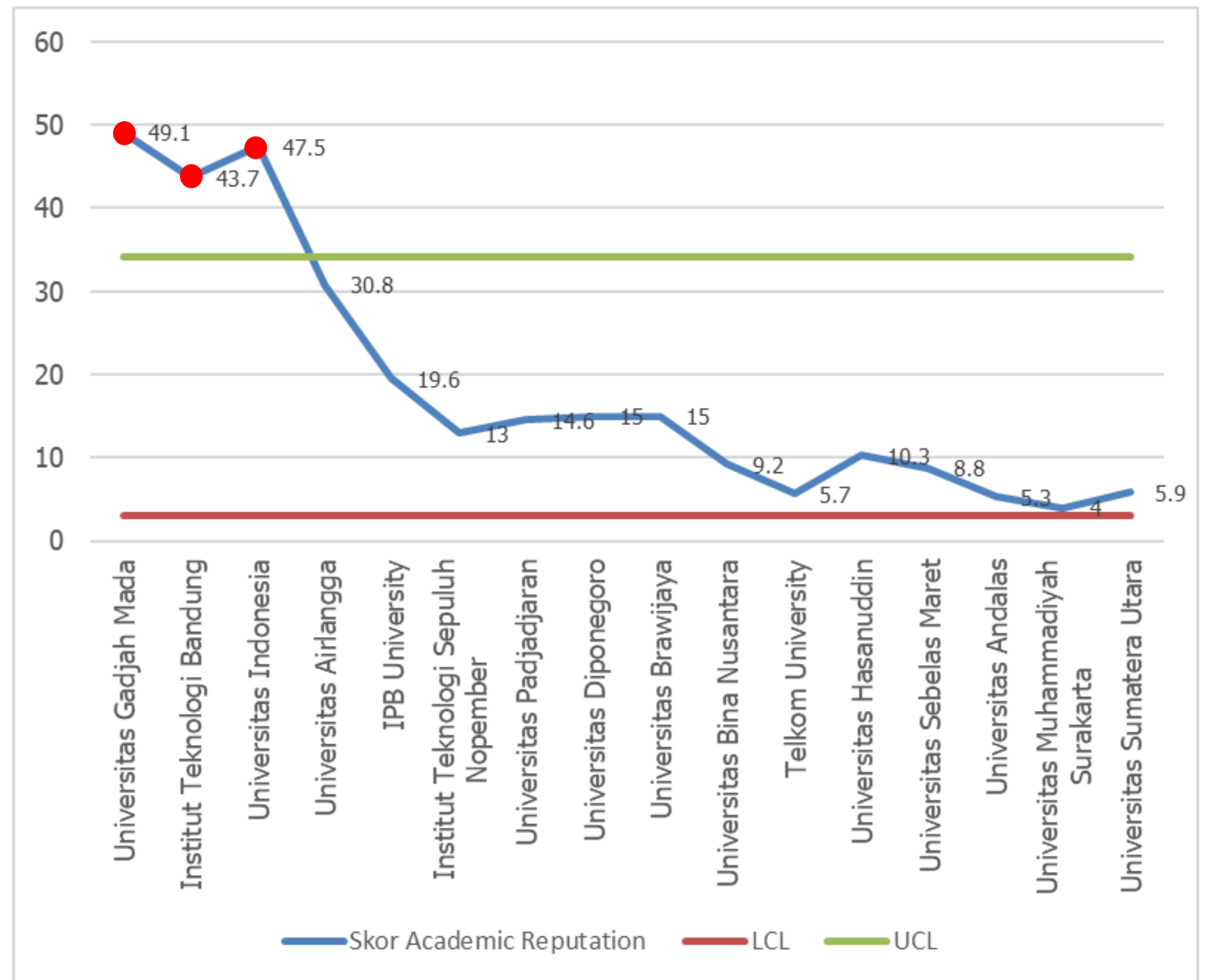
3 dari 16 perguruan tinggi

UGM, ITB, UI

Perguruan Tinggi Favorit:

UNPAD, UPI, IPB

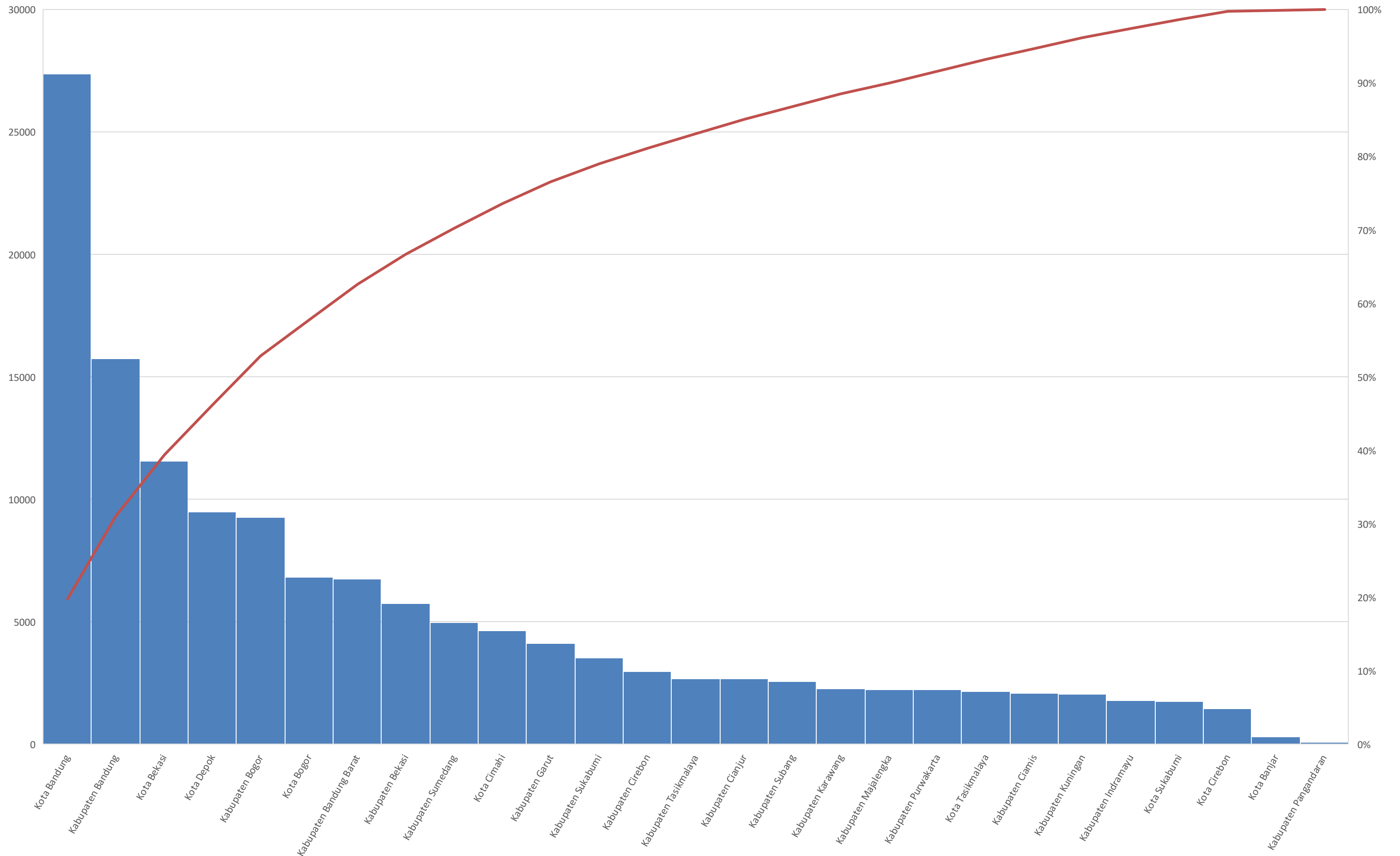
HDU: UGM, ITB, UI, UNPAD, UPI, IPB



Gambar 3. Control Chart Academic Reputation WUR

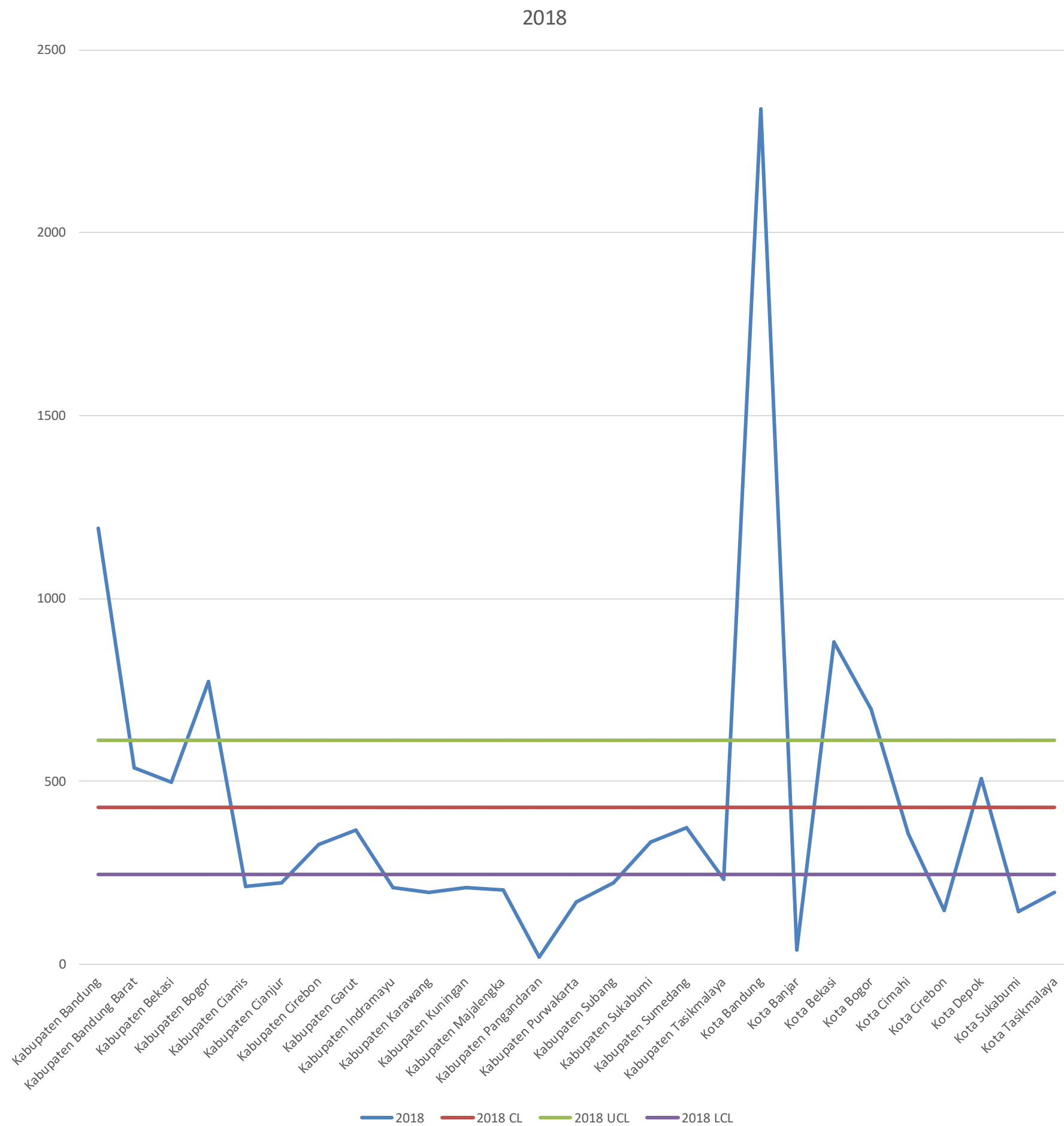
Analisis Variabel Pendidikan

Gambar 2 menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa terbesar di Jawa Barat berasal dari Kota Bandung, dengan jumlah mahasiswa sebanyak 27.388. Selanjutnya diikuti oleh Kabupaten Bandung dengan jumlah mahasiswa sebanyak 15.750 mahasiswa.

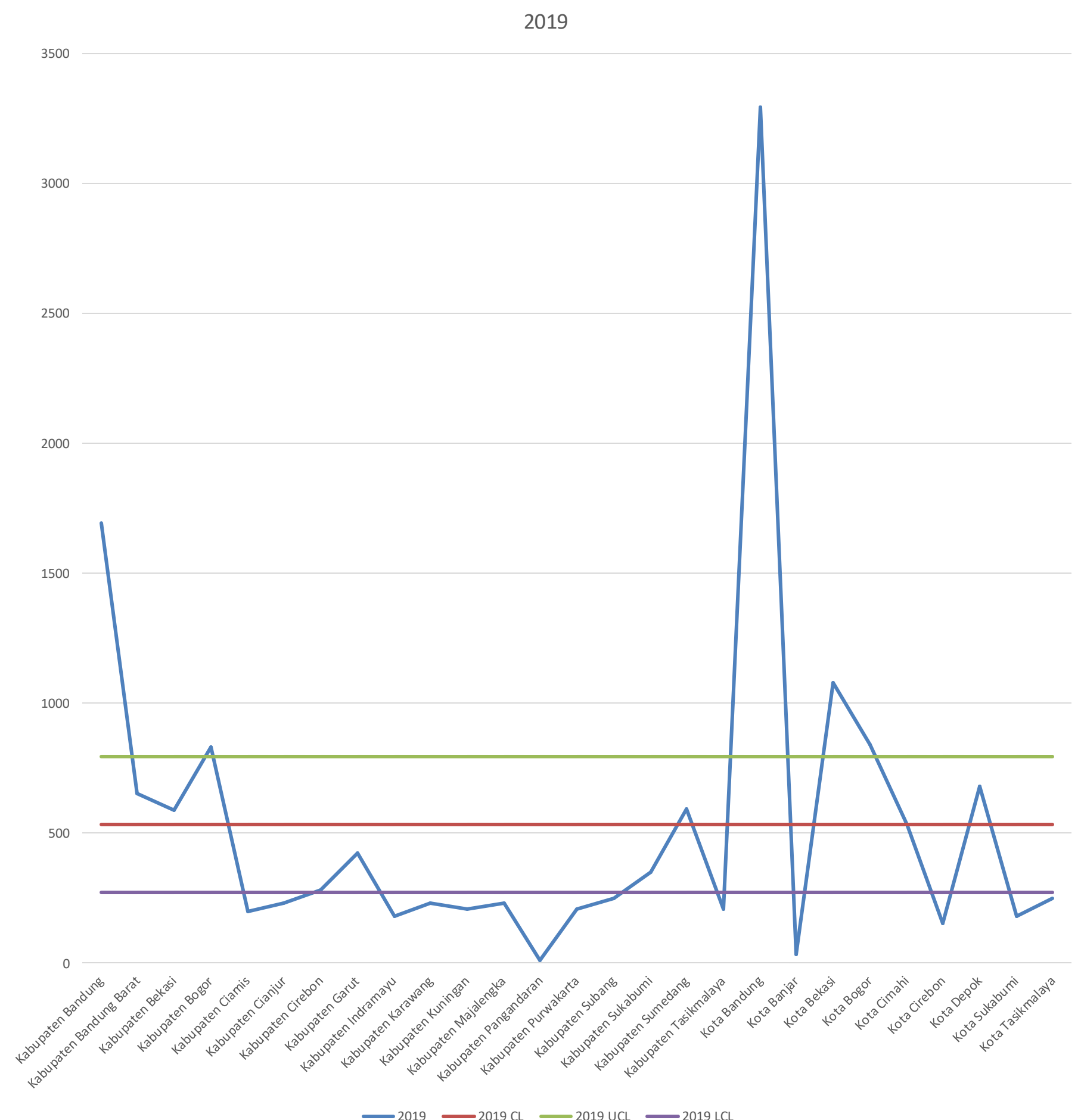


Gambar 4. Jumlah Siswa di HDU Tahun 2018-2022

Control Chart Variabel Pendidikan (sigma = 0.4)

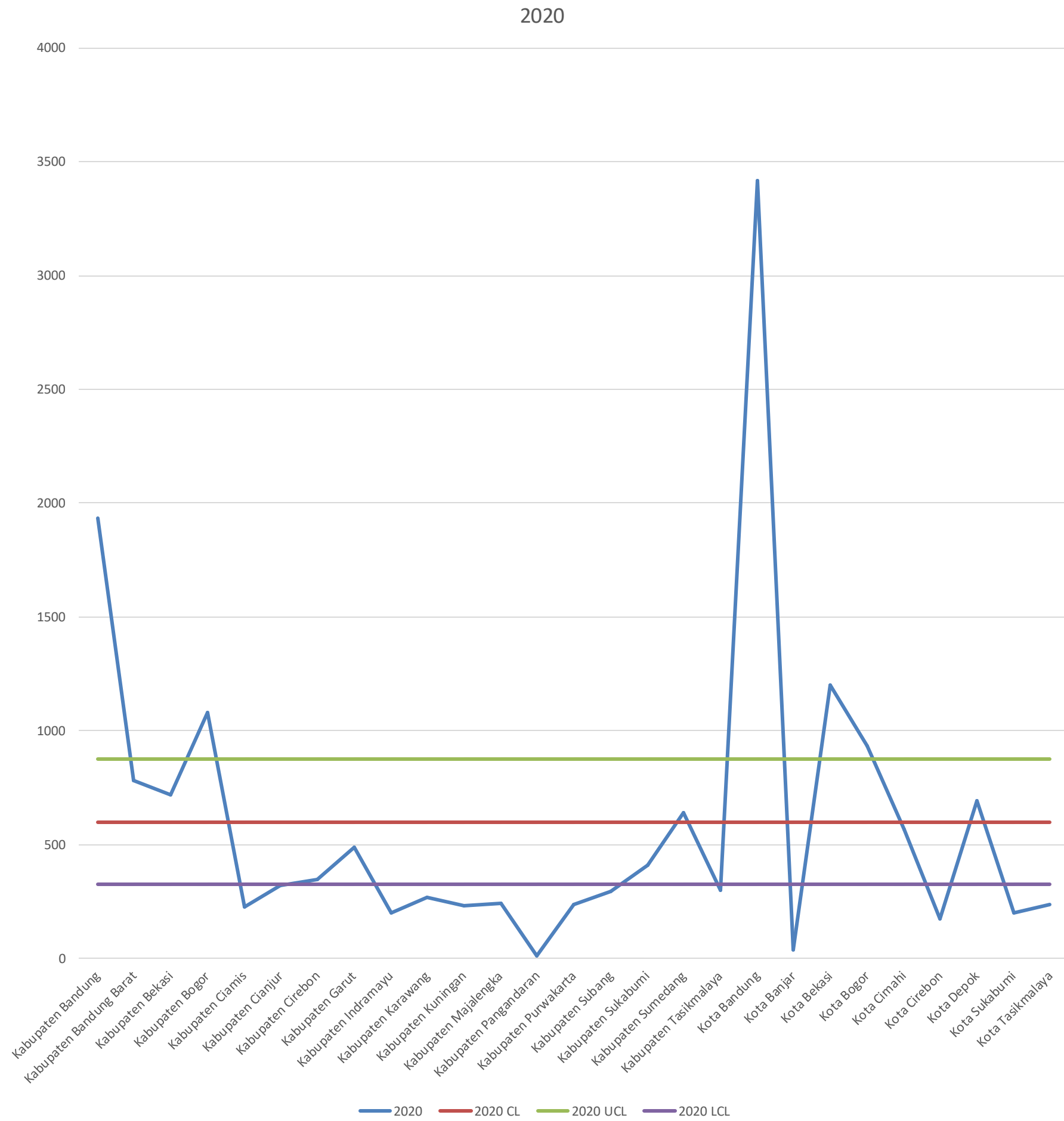


Gambar 5. Control Chart Variabel Pendidikan (Tahun 2018)

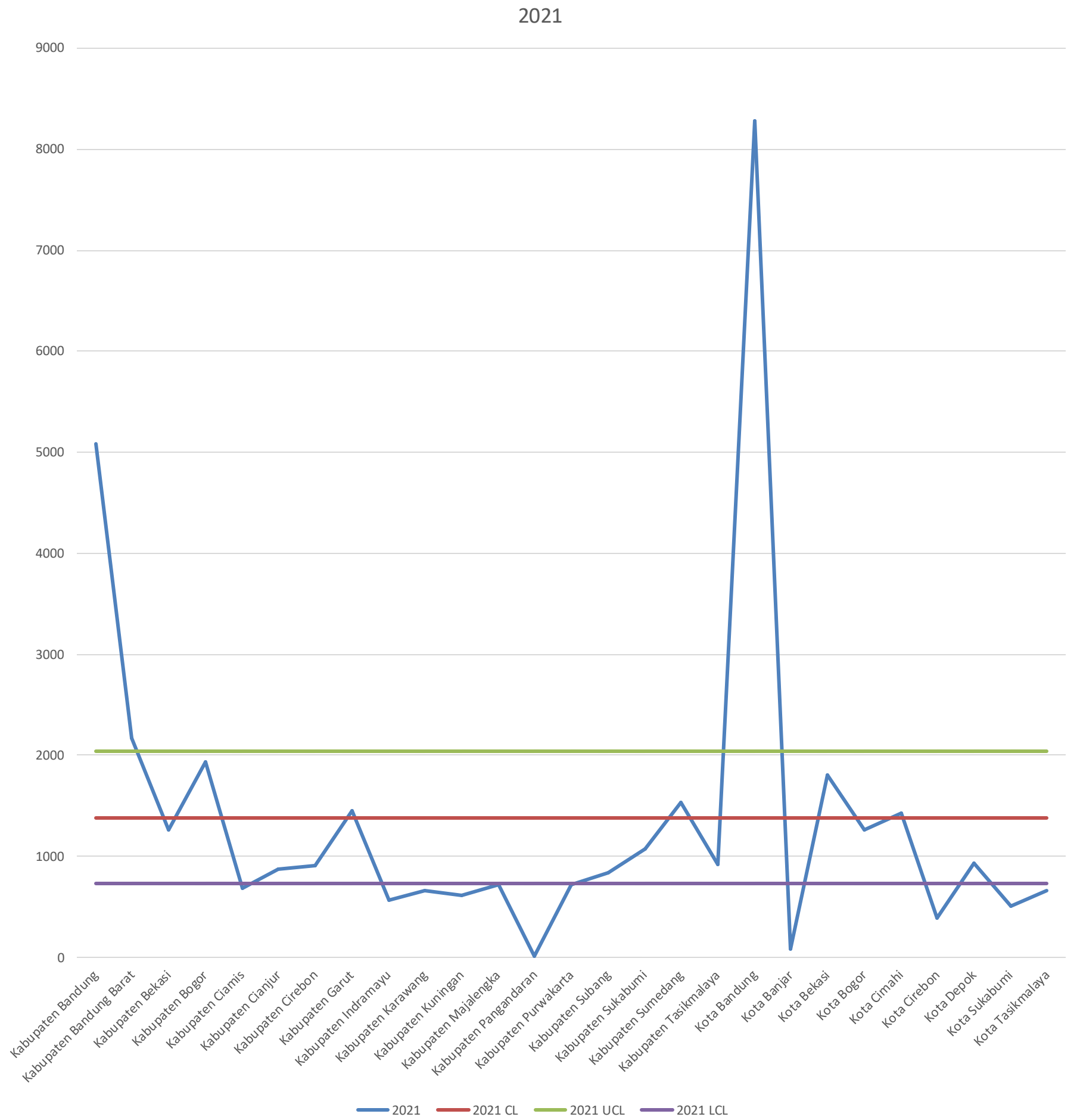


Gambar 6. Control Chart Variabel Pendidikan (Tahun 2019)

Control Chart Variabel Pendidikan (sigma = 0.4)



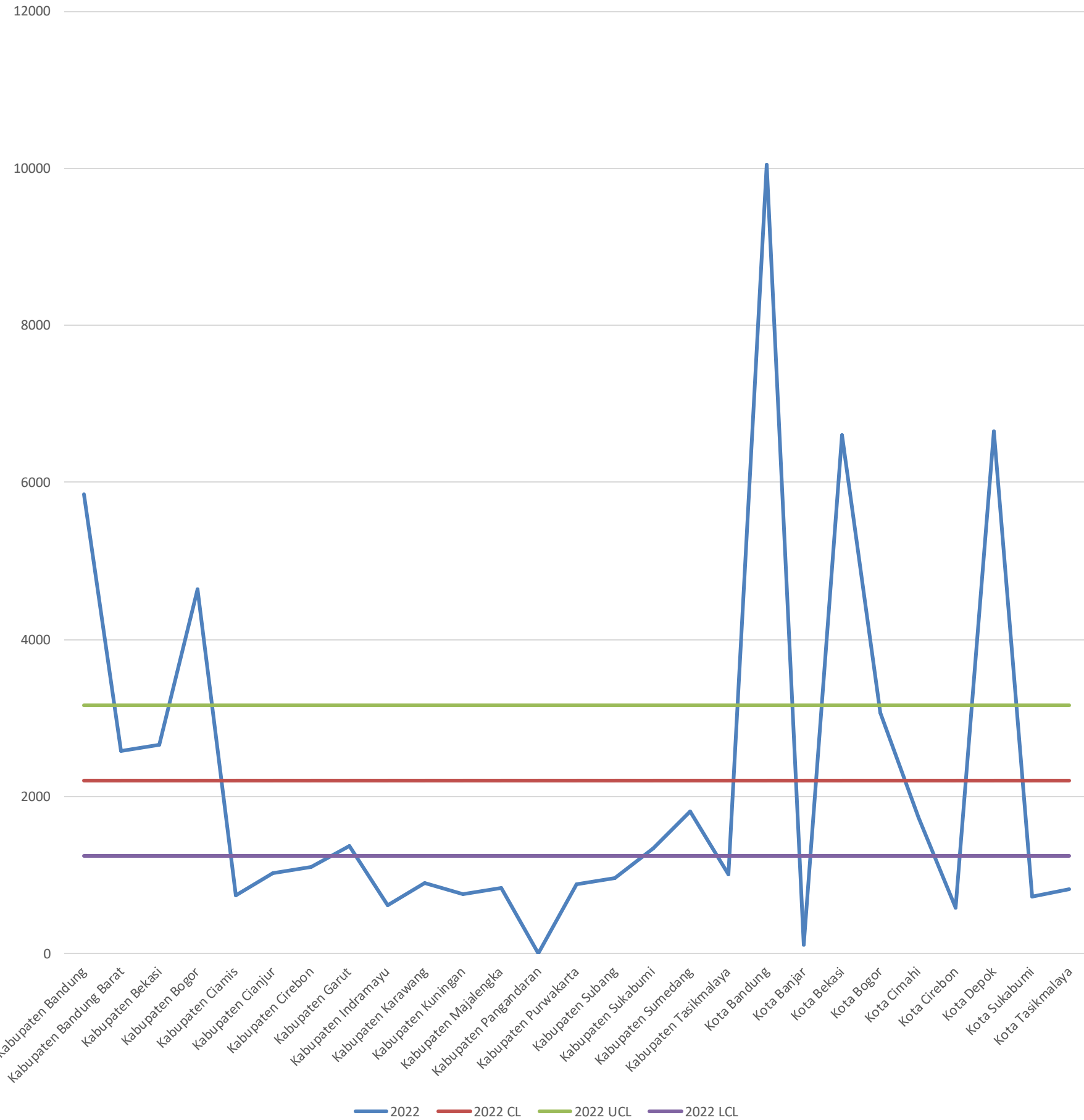
Gambar 7. Control Chart Variabel Pendidikan (Tahun 2020)



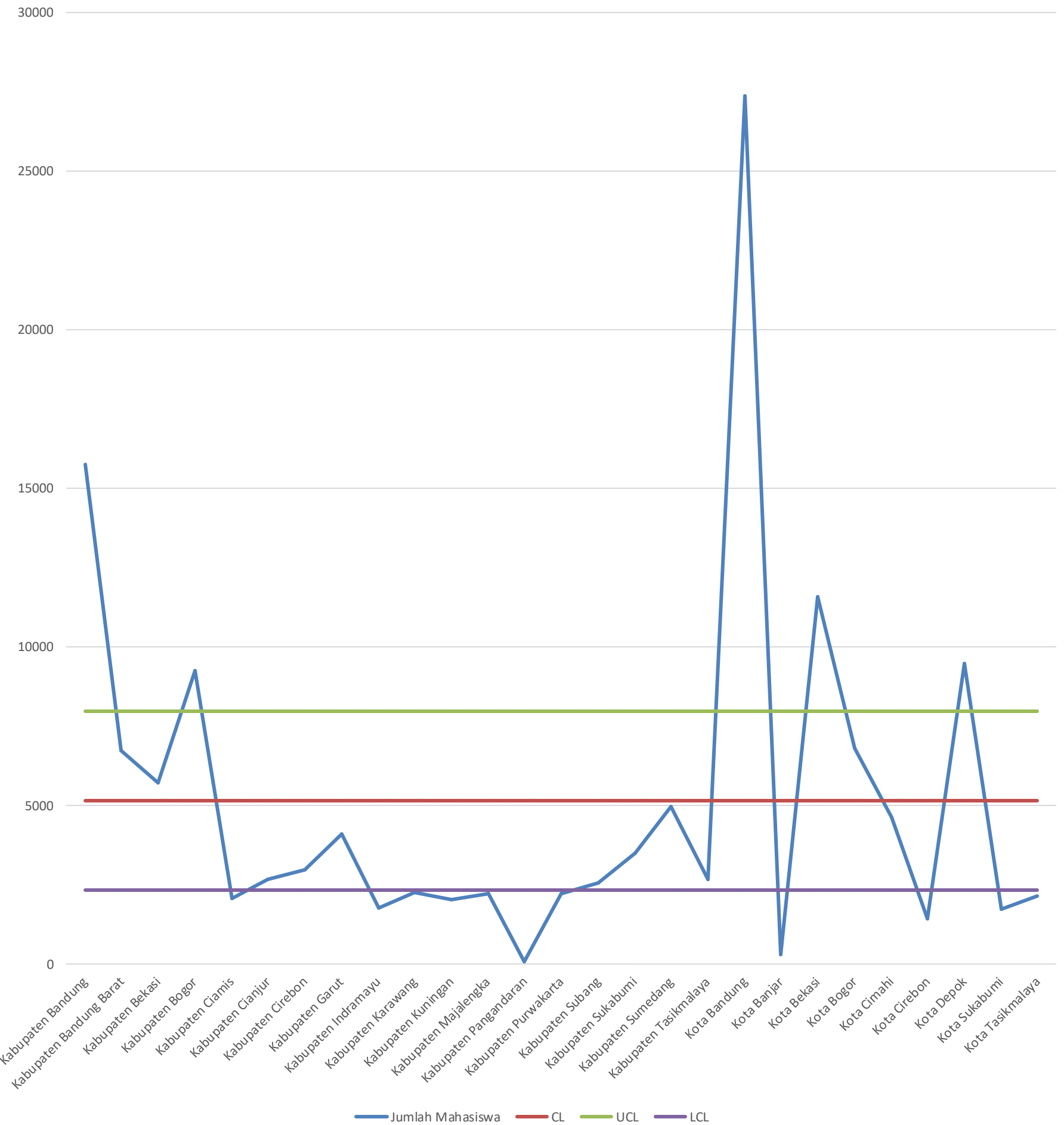
Gambar 8. Control Chart Variabel Pendidikan (Tahun 2021)

Control Chart Variabel Pendidikan (sigma = 0.4)

2022



Gambar 9. Control Chart Variabel Pendidikan (Tahun 2022)



Gambar 10. Control Chart Variabel Pendidikan (Total)

Tabel 13. Kategori Kota/Kabupaten berdasarkan variabel pendidikan Tahun 2018-2022

No	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kabupaten Bandung	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH
2	Kabupaten Bandung Barat	MODERATE	MODERATE	MODERATE	HIGH	HIGH
3	Kabupaten Bekasi	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE
4	Kabupaten Bogor	HIGH	HIGH	HIGH	MODERATE	HIGH
5	Kabupaten Ciamis	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW
6	Kabupaten Cianjur	LOW	LOW	LOW	MODERATE	MODERATE
7	Kabupaten Cirebon	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE
8	Kabupaten Garut	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE
9	Kabupaten Indramayu	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW
10	Kabupaten Karawang	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW
11	Kabupaten Kuningan	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW
12	Kabupaten Majalengka	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW
13	Kabupaten Pangandaran	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW
14	Kabupaten Purwakarta	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW
15	Kabupaten Subang	LOW	LOW	LOW	MODERATE	MODERATE
16	Kabupaten Sukabumi	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE
17	Kabupaten Sumedang	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE
18	Kabupaten Tasikmalaya	LOW	LOW	LOW	MODERATE	MODERATE
19	Kota Bandung	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH
20	Kota Banjar	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW
21	Kota Bekasi	HIGH	HIGH	HIGH	MODERATE	MODERATE
22	Kota Bogor	HIGH	HIGH	HIGH	MODERATE	MODERATE
23	Kota Cimahi	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE
24	Kota Cirebon	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW
25	Kota Depok	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE
26	Kota Sukabumi	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW
27	Kota Tasikmalaya	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW

Berdasarkan Tabel 13, diketahui bahwa Kabupaten Bandung, Kabupaten Bogor, Kota Bandung, Kota Bekasi, dan Kota Bogor termasuk ke dalam kategori *High* pada variabel pendidikan di tahun 2018-2020.

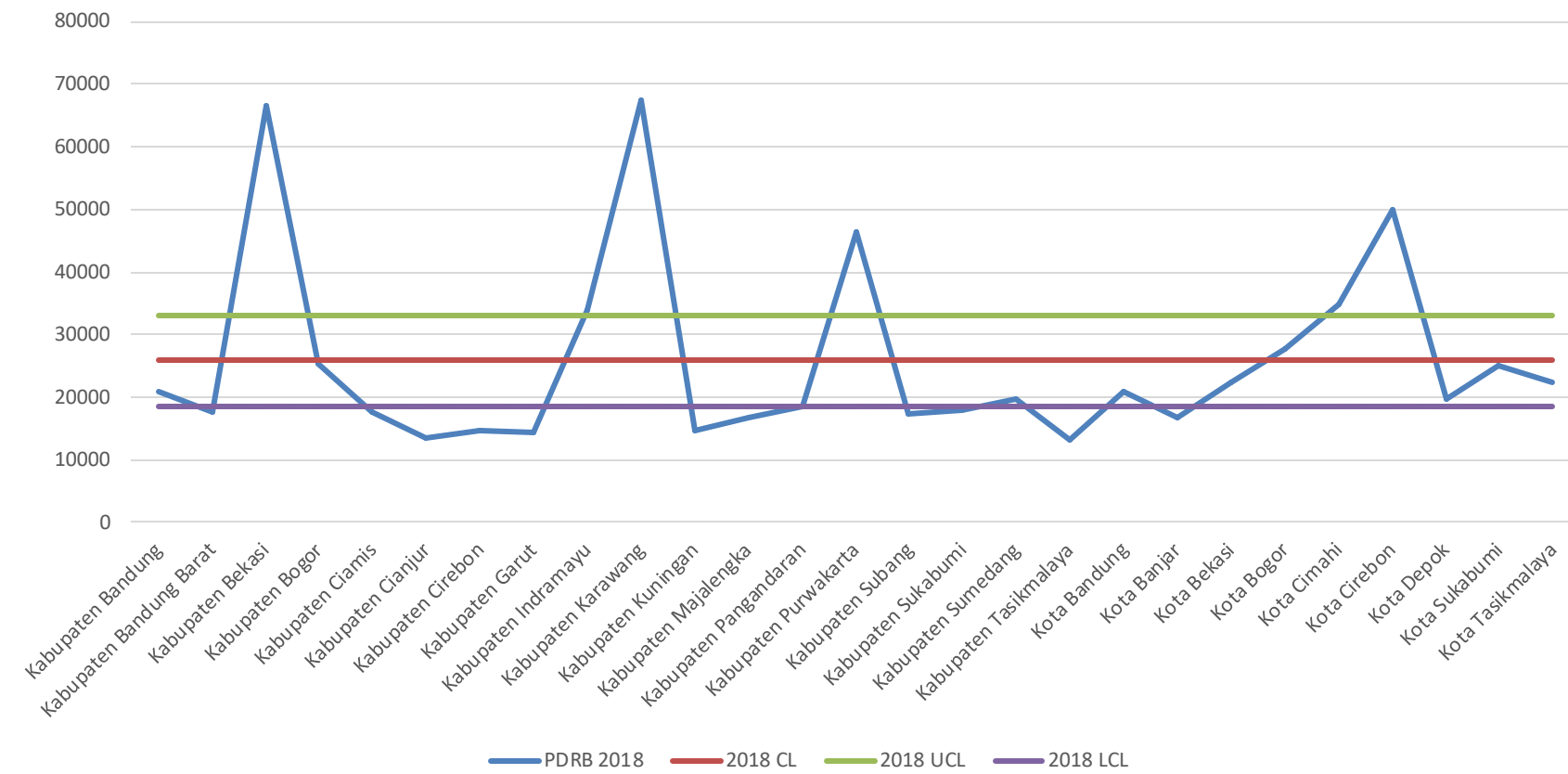
Pada Tahun 2021-2022 Kota Bekasi dan Kota Bogor mengalami perubahan kategori menjadi *moderate*.

Kota bandung dan Kabupaten Bandung konsisten termasuk pada kategori *High* hingga tahun 2022.

Kabupaten Bogor mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi kategori *moderate*, dan kembali menjadi kategori *High* pda tahun 2022.

Analisis Variabel Ekonomi

PDRB Harga Konstan

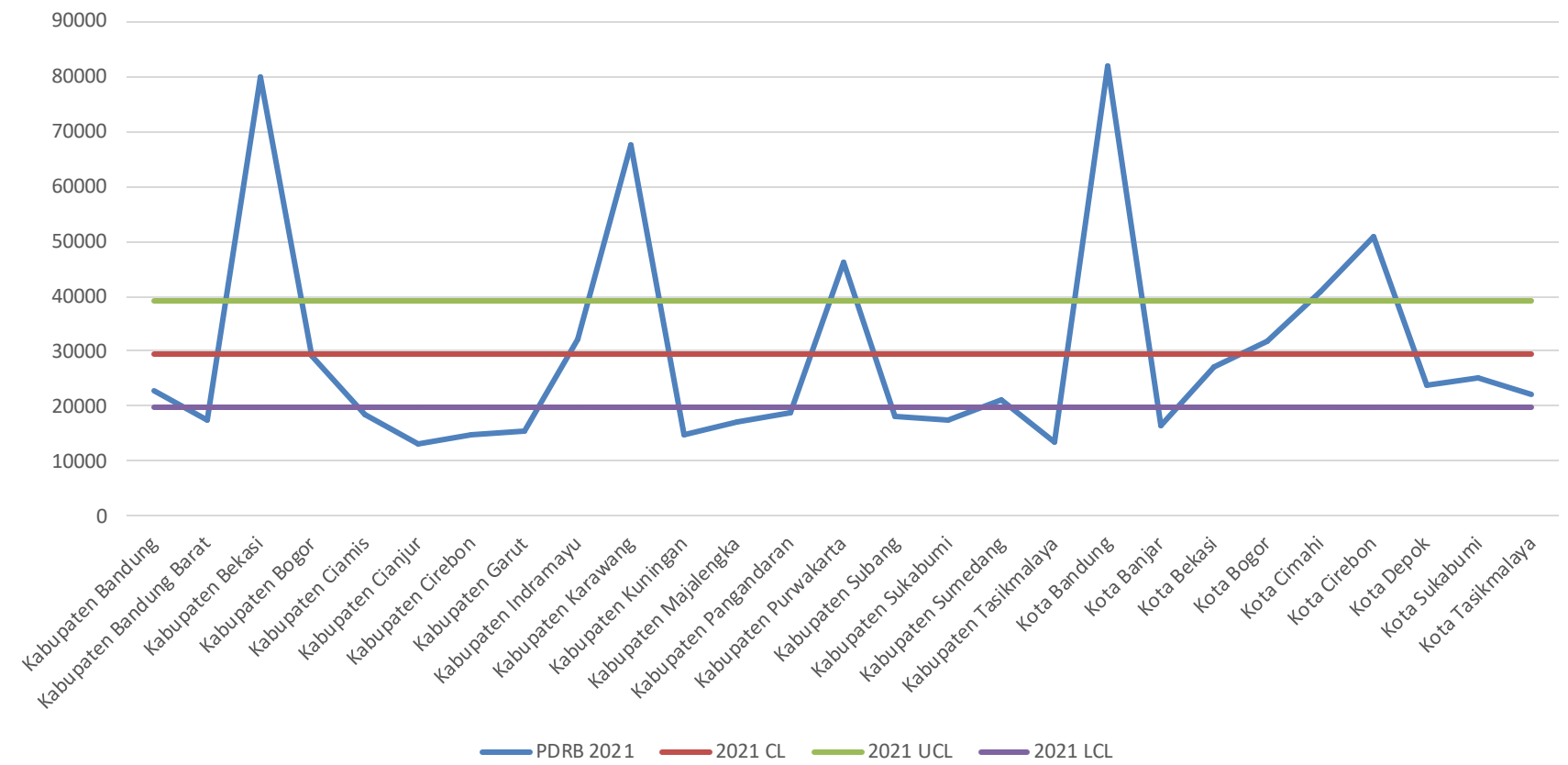


Gambar 11. Control Chart PDRB Harga Konstan (2018)

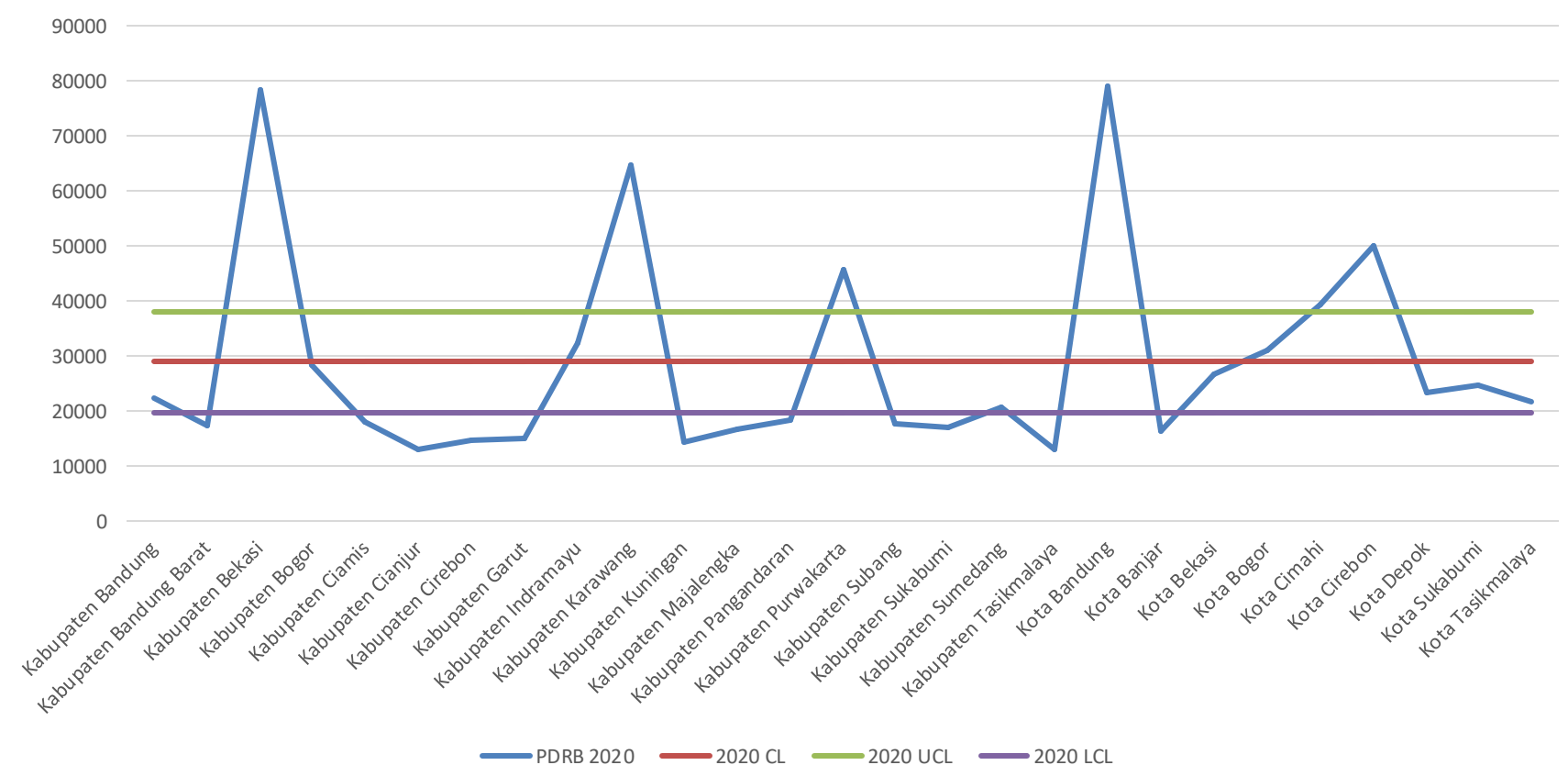


Gambar 12. Control Chart PDRB Harga Konstan (2019)

Sigma: 0.5



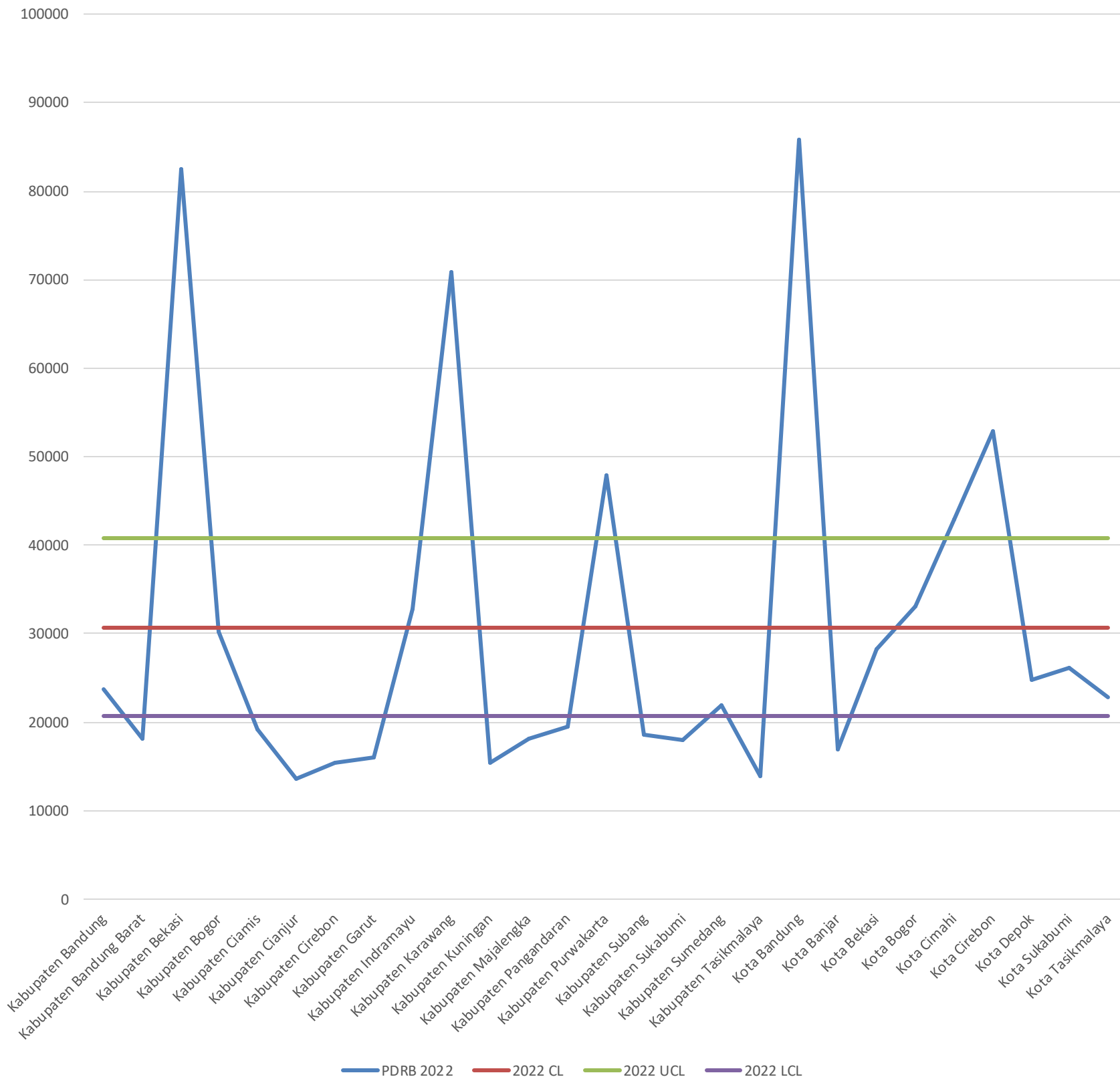
Gambar 14. Control Chart PDRB Harga Konstan (2021)



Gambar 13. Control Chart PDRB Harga Konstan (2020)

Tabel 14. Summary Hasil Analisis Variabel PDRB Harga Konstan

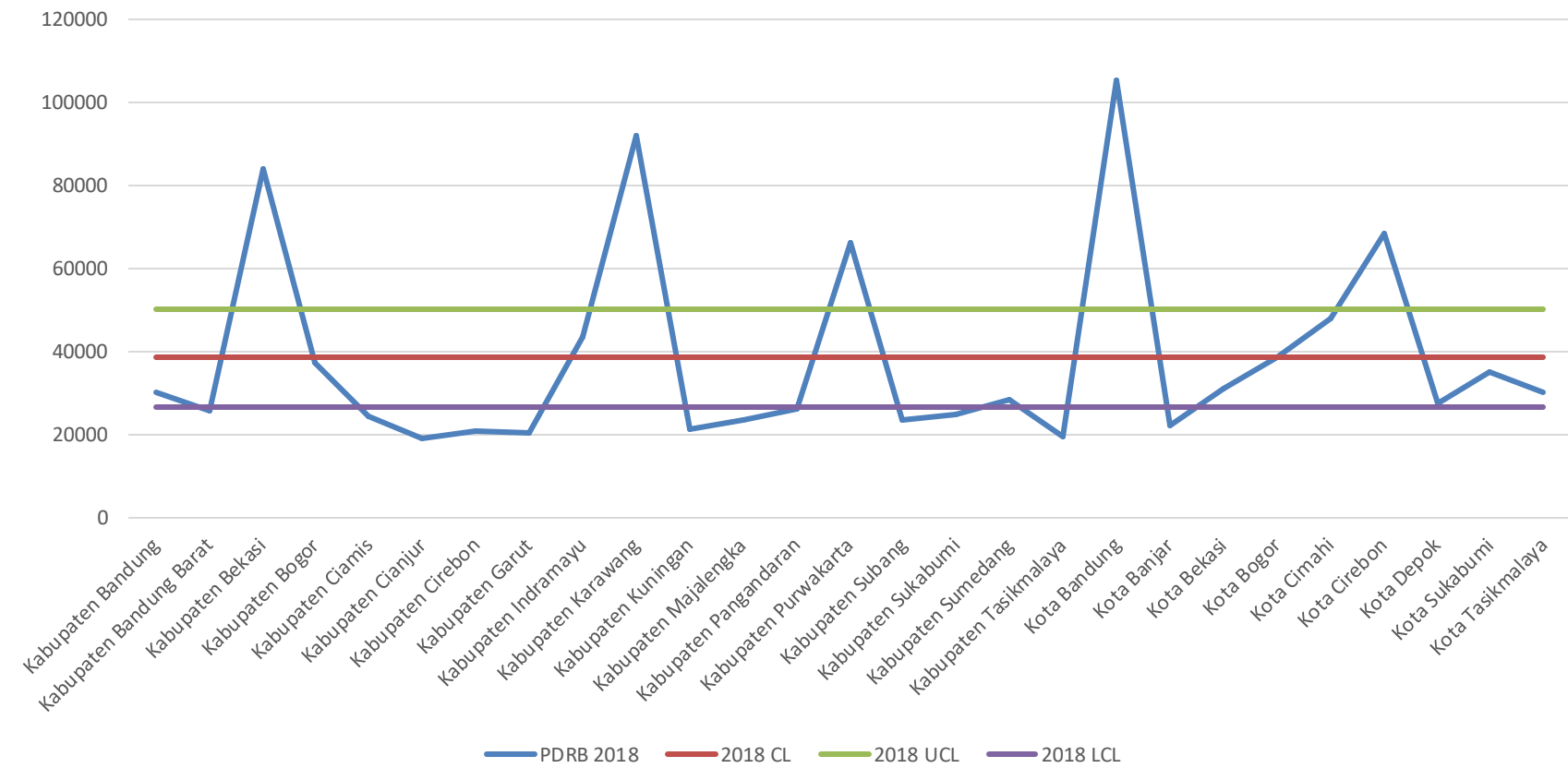
No	Kota/Kabupaten	Kategori PDRB				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kabupaten Bandung	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE
2	Kabupaten Bandung Barat	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW
3	Kabupaten Bekasi	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH
4	Kabupaten Bogor	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE
5	Kabupaten Ciamis	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW
6	Kabupaten Cianjur	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW
7	Kabupaten Cirebon	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW
8	Kabupaten Garut	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW
9	Kabupaten Indramayu	HIGH	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE
10	Kabupaten Karawang	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH
11	Kabupaten Kuningan	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW
12	Kabupaten Majalengka	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW
13	Kabupaten Pangandaran	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW
14	Kabupaten Purwakarta	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH
15	Kabupaten Subang	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW
16	Kabupaten Sukabumi	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW
17	Kabupaten Sumedang	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE
18	Kabupaten Tasikmalaya	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW
19	Kota Bandung	MODERATE	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH
20	Kota Banjar	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW
21	Kota Bekasi	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE
22	Kota Bogor	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE
23	Kota Cimahi	HIGH	MODERATE	HIGH	HIGH	HIGH
24	Kota Cirebon	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH
25	Kota Depok	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE
26	Kota Sukabumi	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE
27	Kota Tasikmalaya	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE



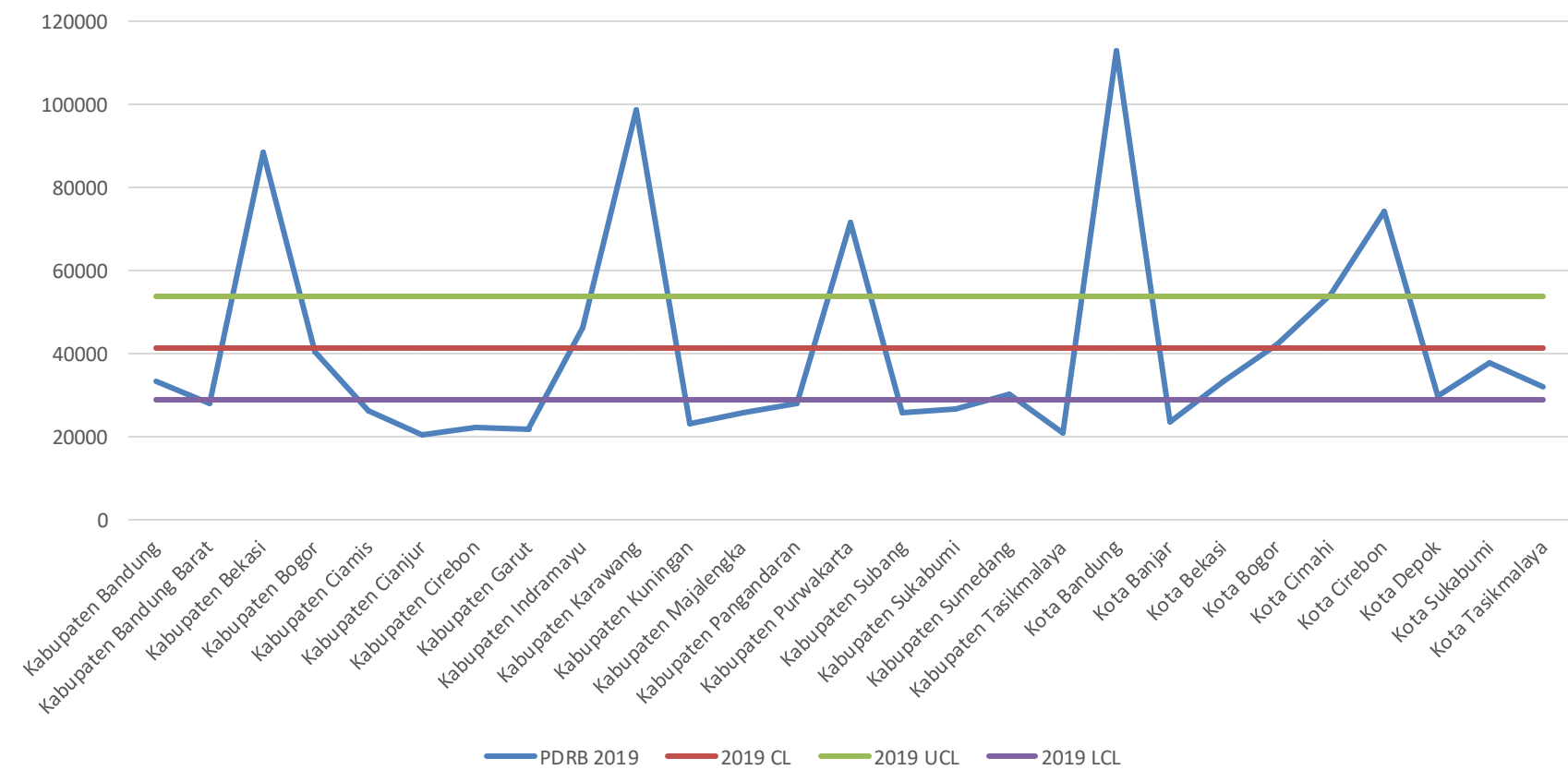
Gambar 15. Control Chart PDRB Harga Konstan (2022)

Analisis Variabel Ekonomi

PDRB Harga Berlaku

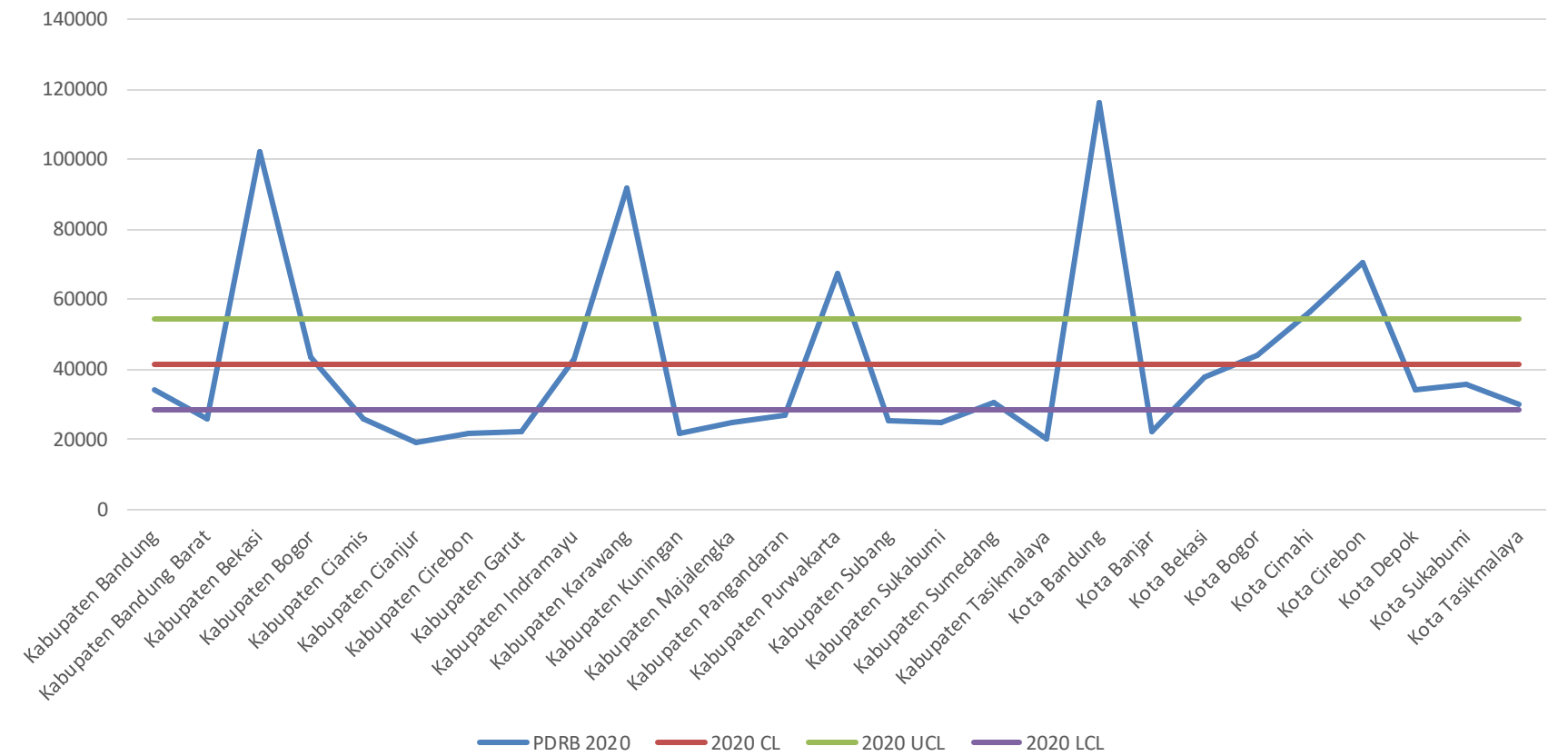


Gambar 16. Control Chart PDRB Harga Konstan (2018)

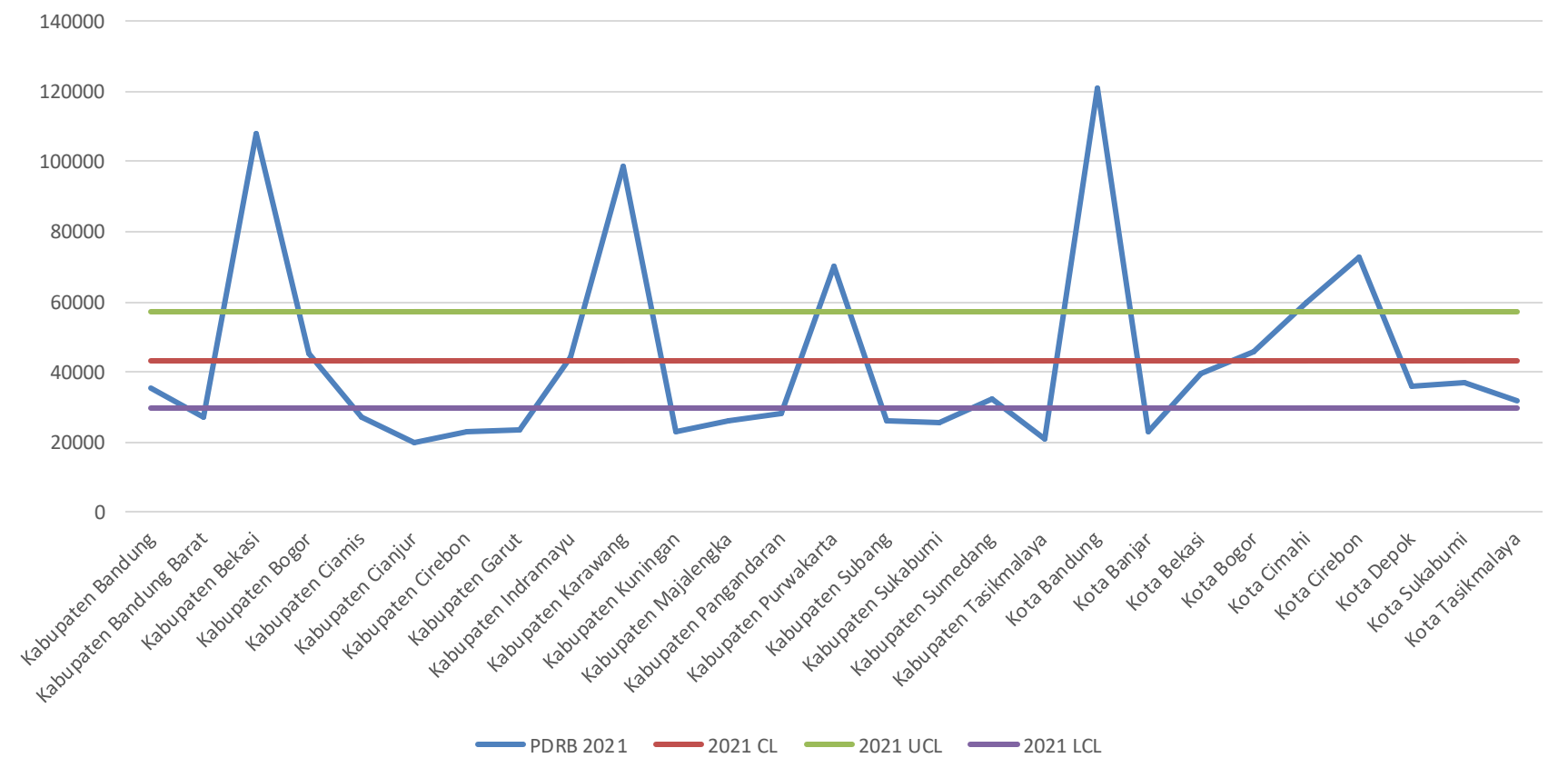


Gambar 17. Control Chart PDRB Harga Konstan (2019)

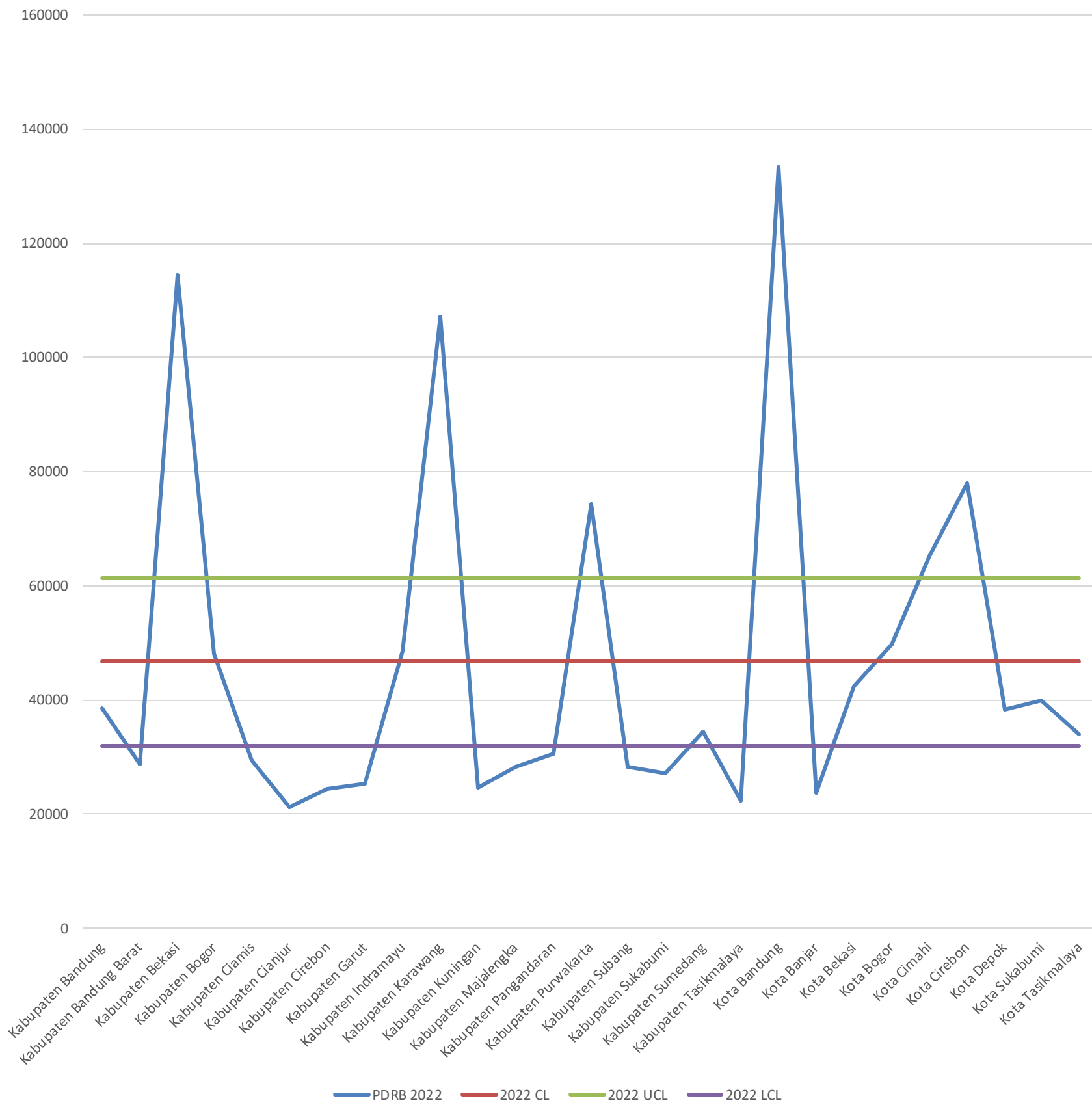
Sigma: 0.5



Gambar 18. Control Chart PDRB Harga Konstan (2020)



Gambar 19. Control Chart PDRB Harga Konstan (2021)



Gambar 20. Control Chart PDRB Harga Konstan (2022)

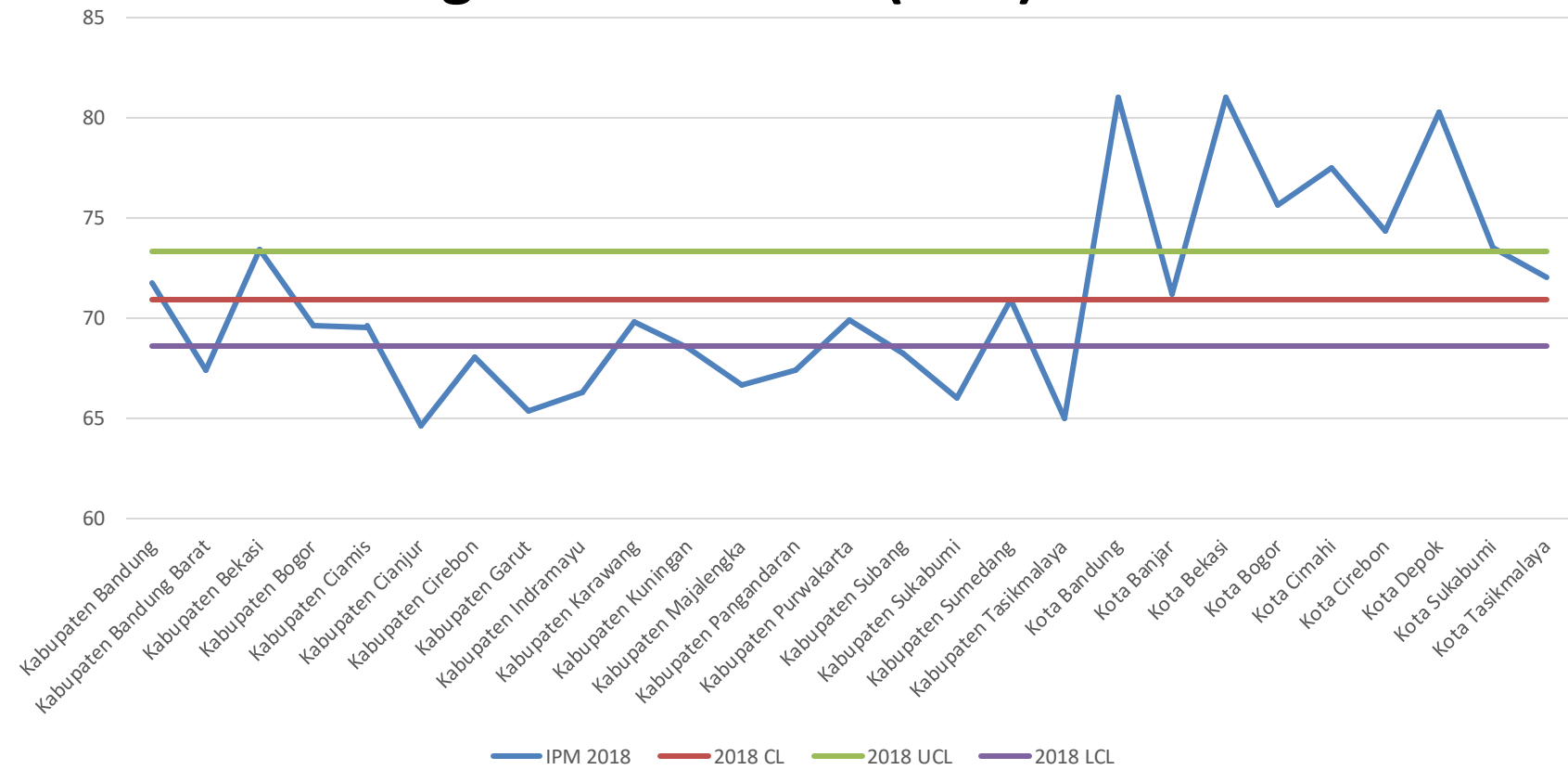
Tabel 15. Summary Hasil Analisis Variabel PDRB Harga Berlaku

Nomor	Kota/Kabupaten	Kategori PDRB				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kabupaten Bandung	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE
2	Kabupaten Bandung Barat	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW
3	Kabupaten Bekasi	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH
4	Kabupaten Bogor	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE
5	Kabupaten Ciamis	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW
6	Kabupaten Cianjur	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW
7	Kabupaten Cirebon	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW
8	Kabupaten Garut	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW
9	Kabupaten Indramayu	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE
10	Kabupaten Karawang	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH
11	Kabupaten Kuningan	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW
12	Kabupaten Majalengka	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW
13	Kabupaten Pangandaran	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW
14	Kabupaten Purwakarta	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH
15	Kabupaten Subang	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW
16	Kabupaten Sukabumi	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW
17	Kabupaten Sumedang	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE
18	Kabupaten Tasikmalaya	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW
19	Kota Bandung	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH
20	Kota Banjar	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW
21	Kota Bekasi	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE
22	Kota Bogor	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE
23	Kota Cimahi	MODERATE	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH
24	Kota Cirebon	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH
25	Kota Depok	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE
26	Kota Sukabumi	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE
27	Kota Tasikmalaya	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE

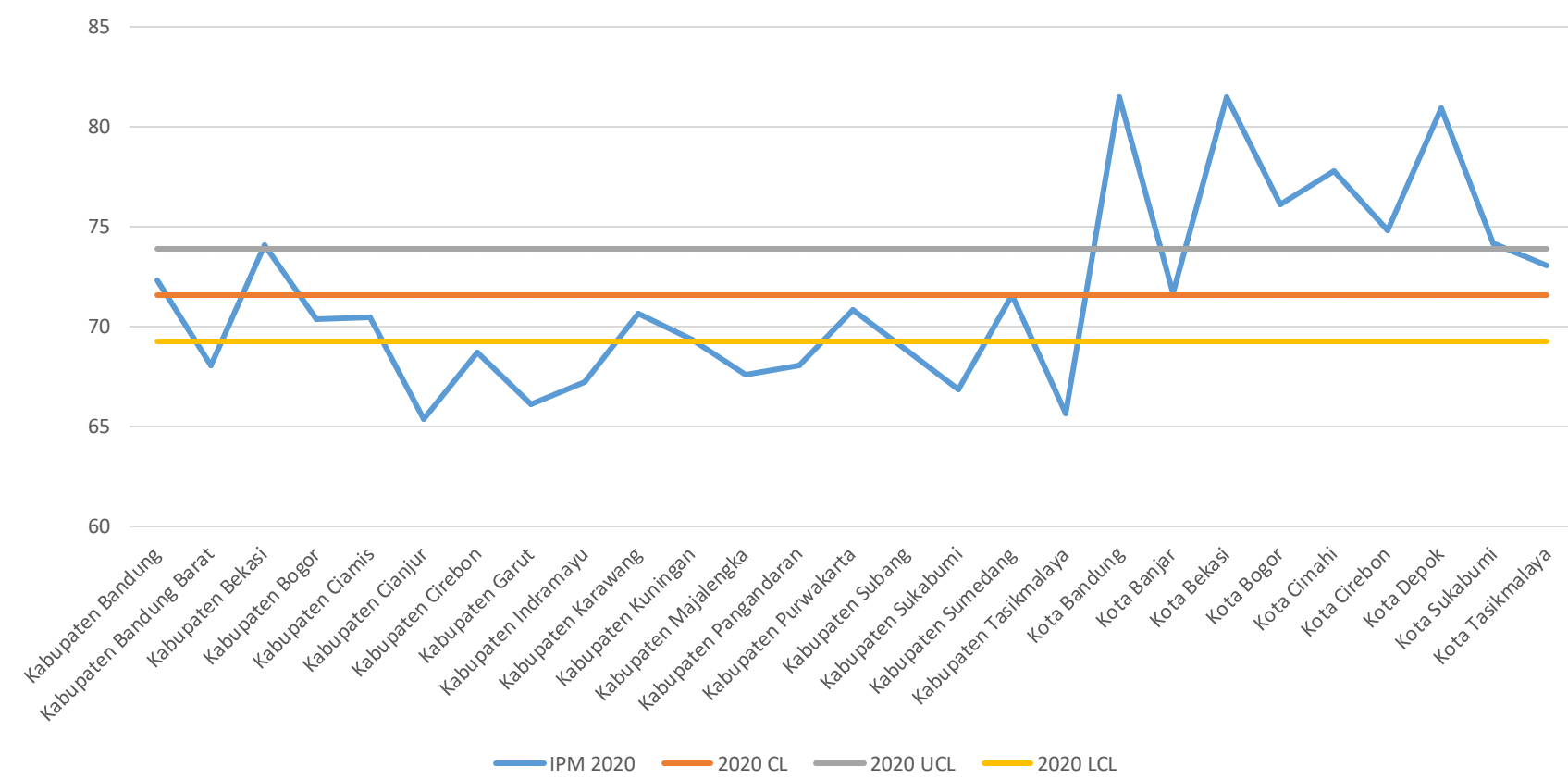
Analisis Variabel Ekonomi

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

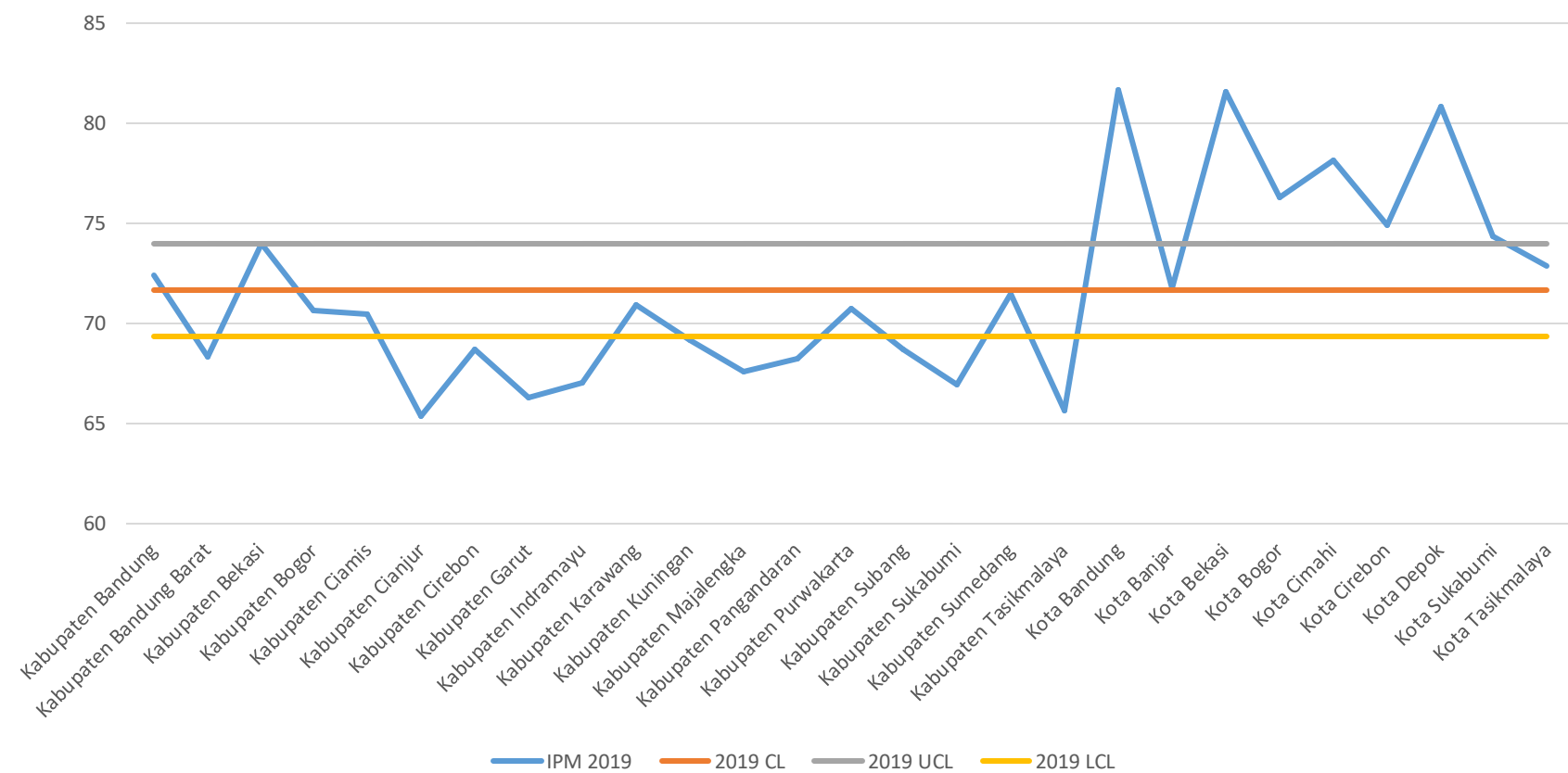
Sigma: 0.5



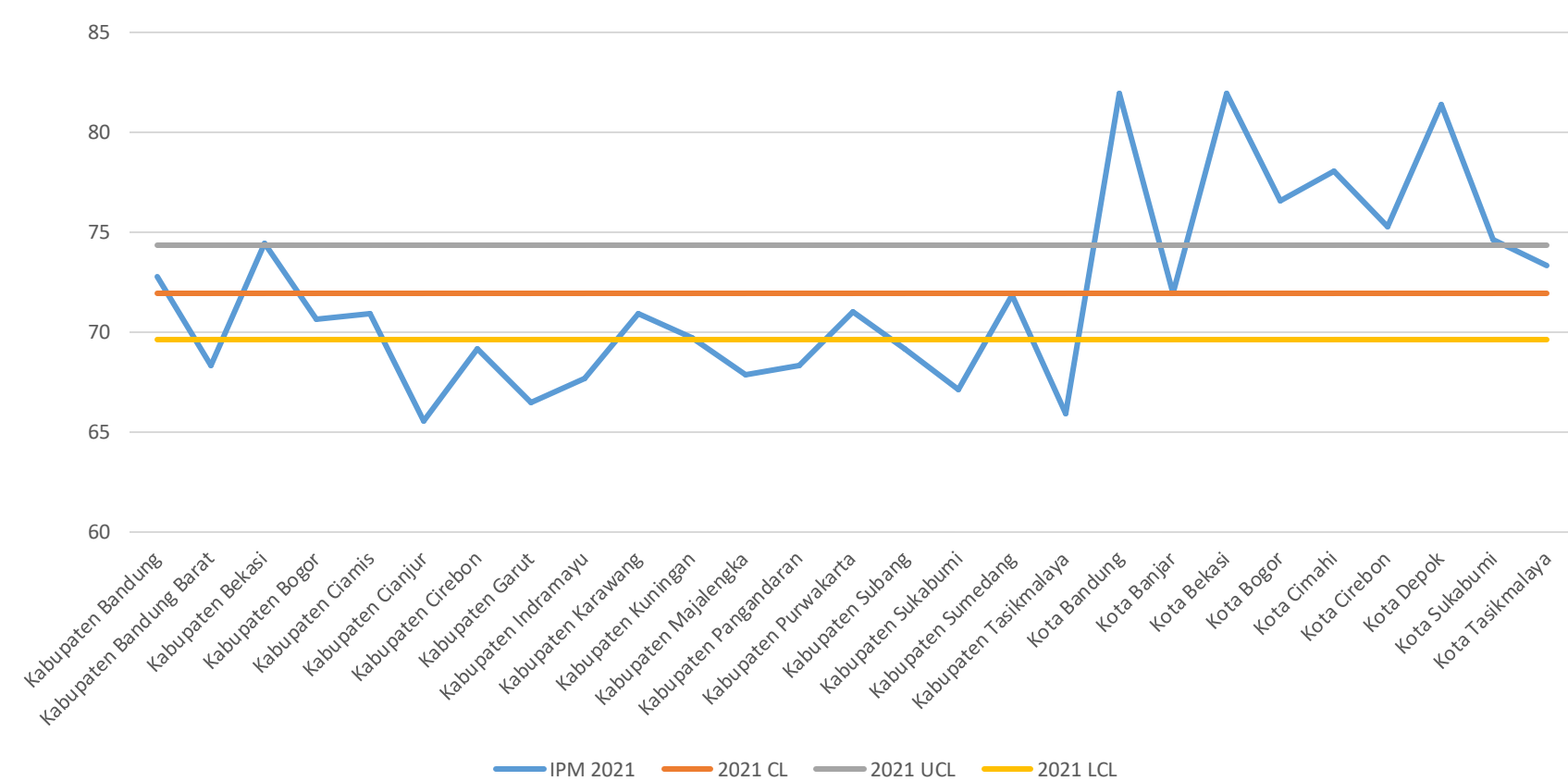
Gambar 21. Control Chart IPM (2018)



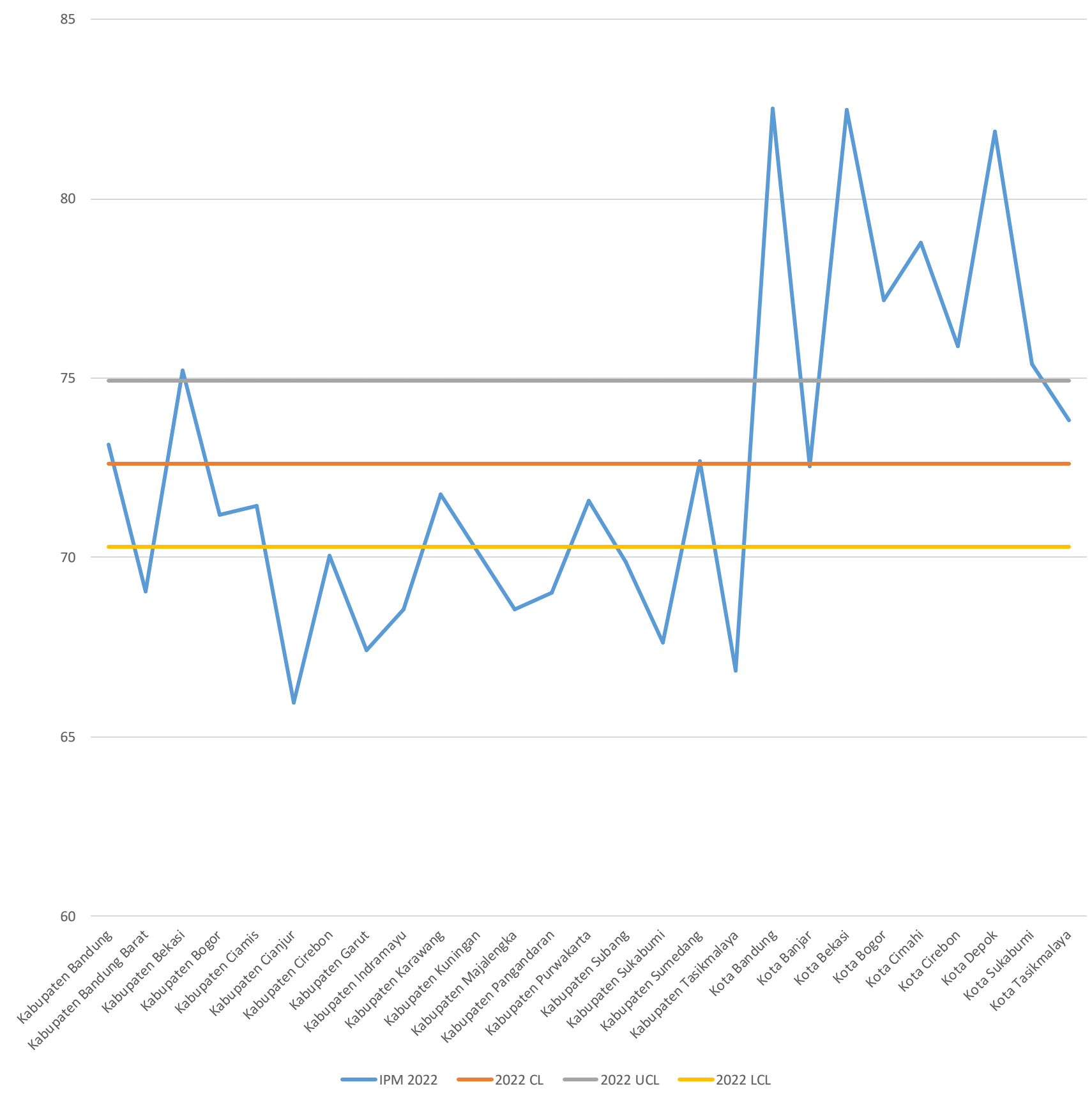
Gambar 23. Control Chart IPM (2020)



Gambar 22. Control Chart IPM (2019)



Gambar 24. Control Chart IPM (2021)



Gambar 25. Control Chart IPM (2022)

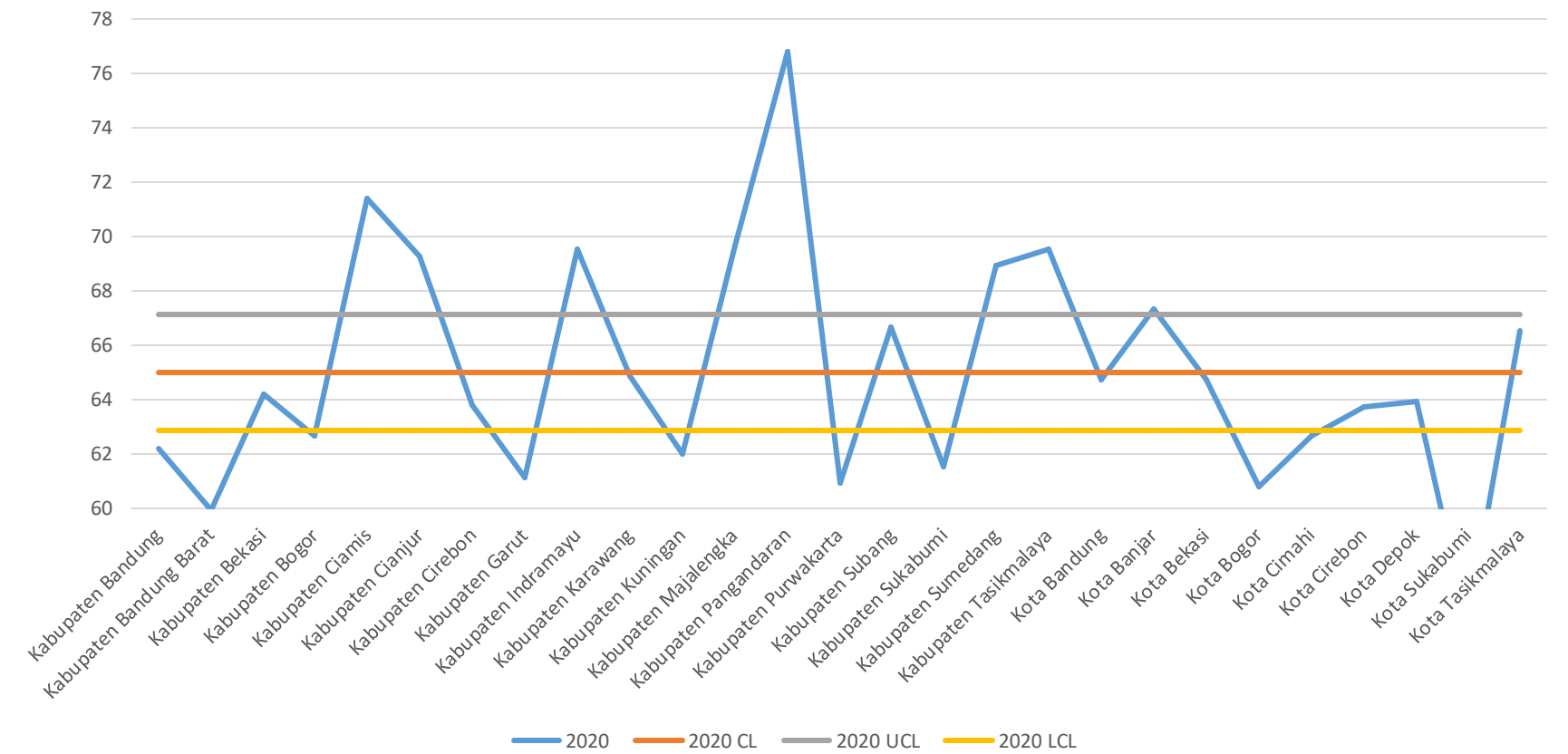
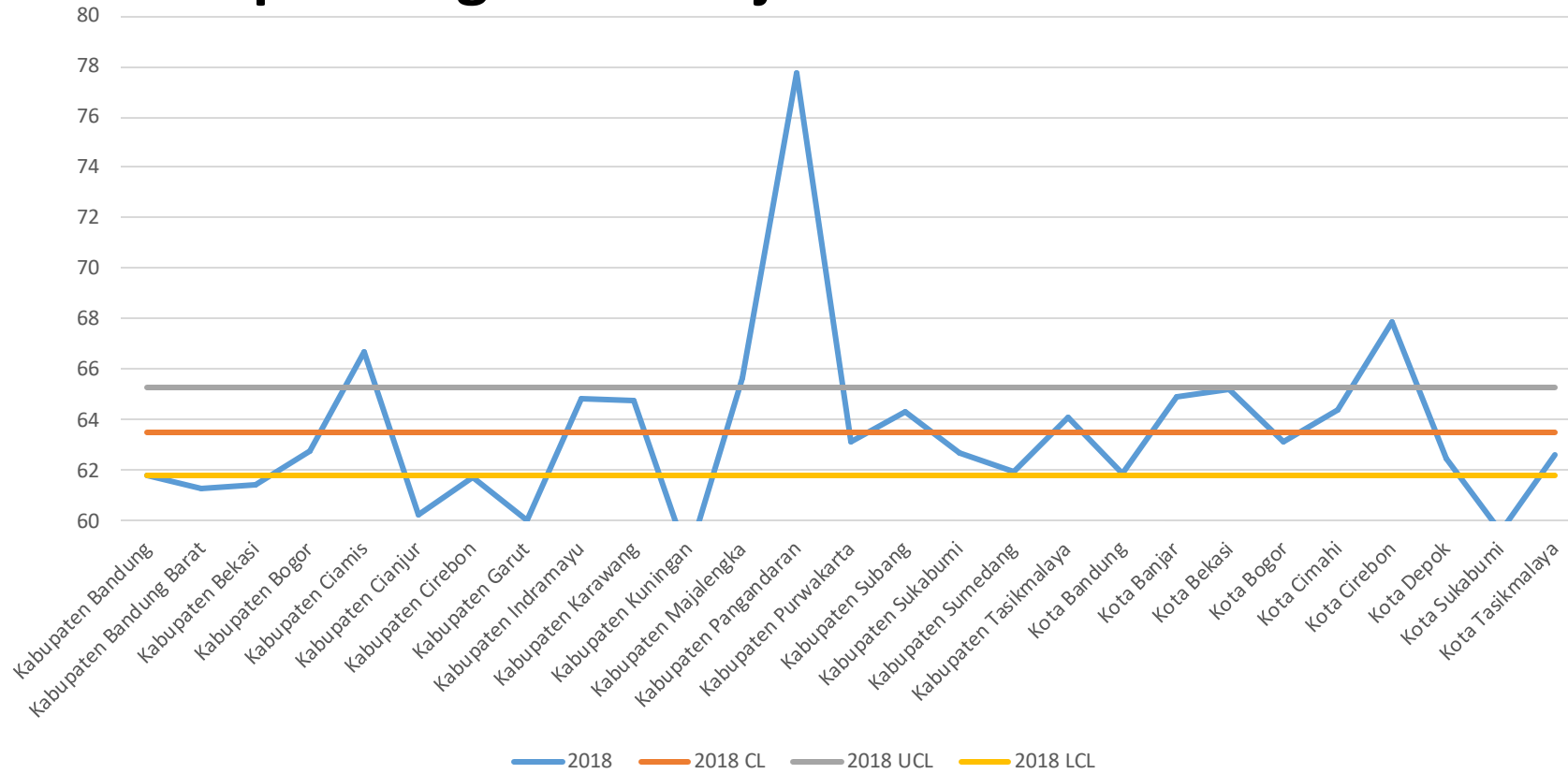
Tabel 16. Summary Hasil Analisis Variabel IPM

No	Kabupaten/Kota	Kategori IPM				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kabupaten Bandung	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE
2	Kabupaten Bandung Barat	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW
3	Kabupaten Bekasi	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH
4	Kabupaten Bogor	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE
5	Kabupaten Ciamis	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE
6	Kabupaten Cianjur	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW
7	Kabupaten Cirebon	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW
8	Kabupaten Garut	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW
9	Kabupaten Indramayu	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW
10	Kabupaten Karawang	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE
11	Kabupaten Kuningan	LOW	LOW	MODERATE	MODERATE	LOW
12	Kabupaten Majalengka	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW
13	Kabupaten Pangandaran	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW
14	Kabupaten Purwakarta	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE
15	Kabupaten Subang	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW
16	Kabupaten Sukabumi	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW
17	Kabupaten Sumedang	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE
18	Kabupaten Tasikmalaya	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW
19	Kota Bandung	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH
20	Kota Banjar	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE
21	Kota Bekasi	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH
22	Kota Bogor	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH
23	Kota Cimahi	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH
24	Kota Cirebon	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH
25	Kota Depok	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH
26	Kota Sukabumi	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH
27	Kota Tasikmalaya	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE

Analisis Variabel Ekonomi

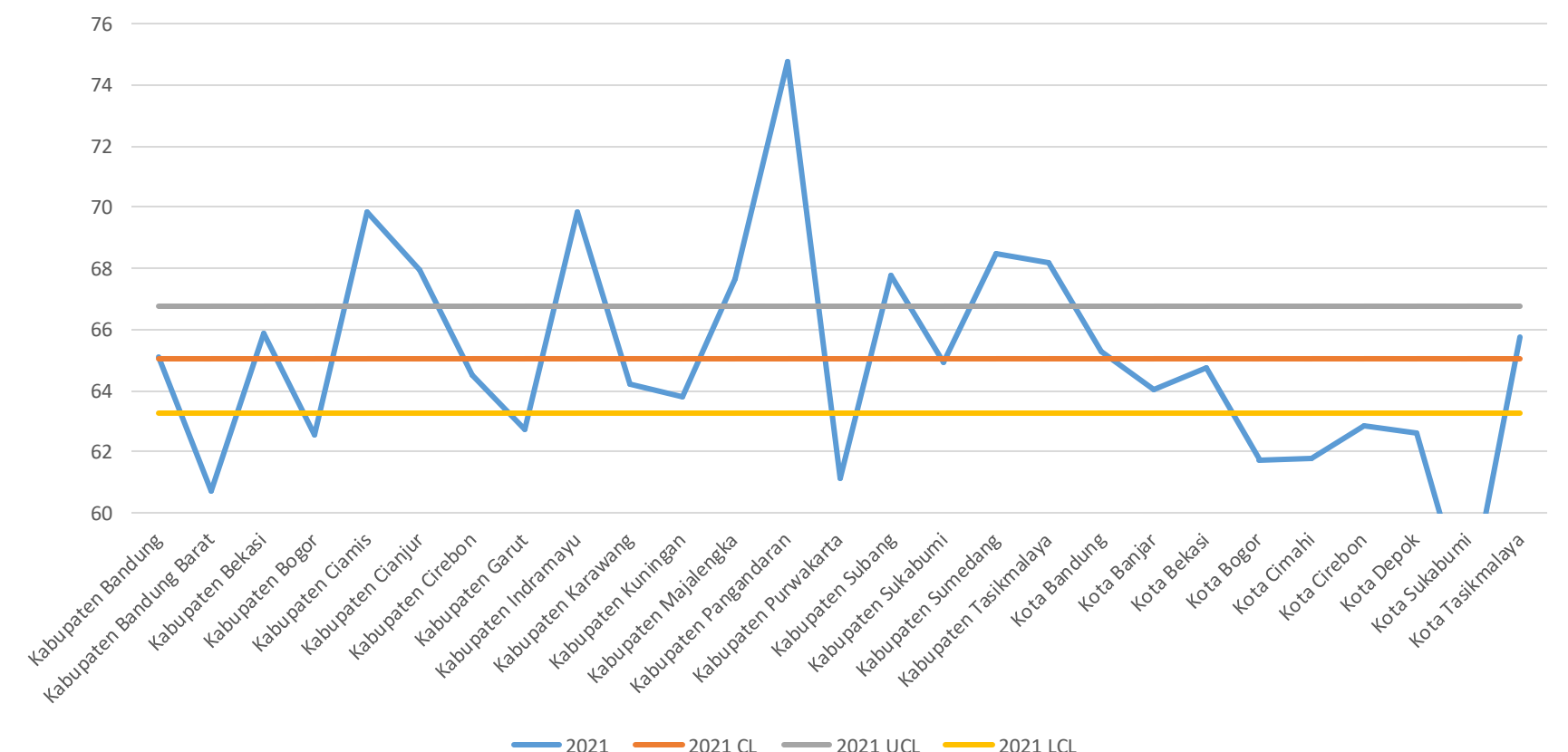
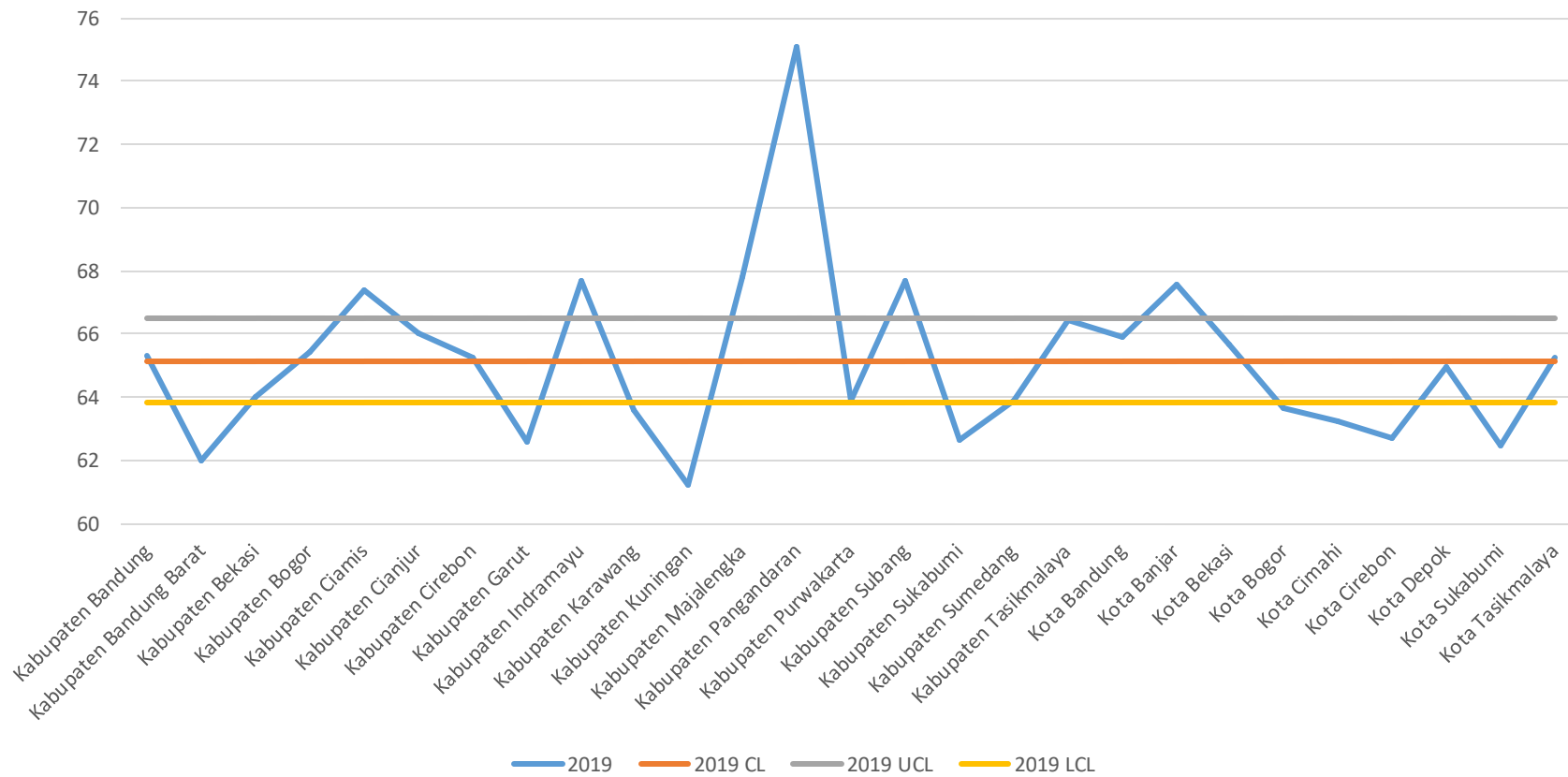
Partisipasi Angkatan Kerja

Sigma: 0.5



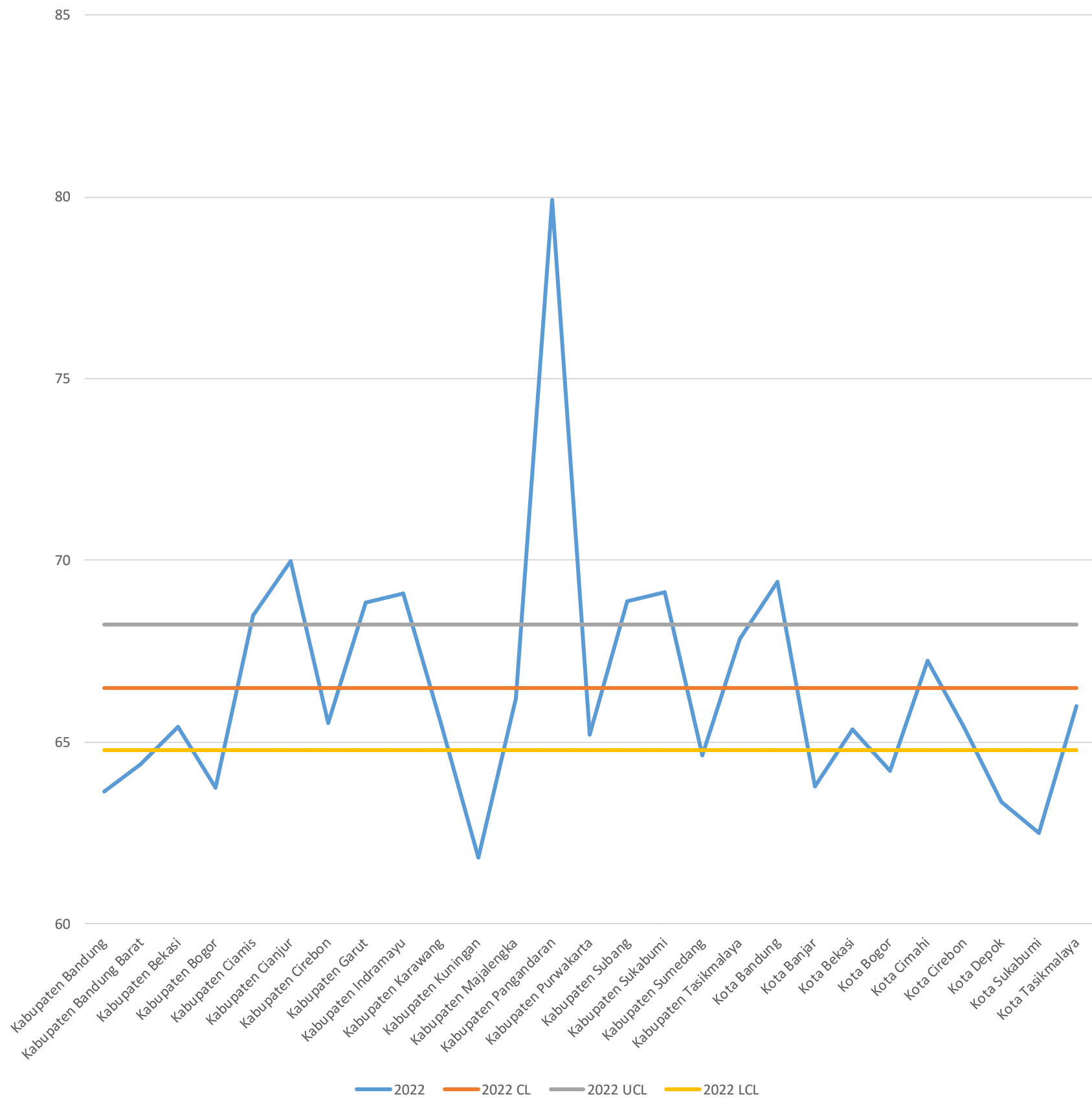
Gambar 26. Control Chart Partisipasi Angkatan Kerja (2018)

Gambar 28. Control Chart Partisipasi Angkatan Kerja (2020)



Gambar 27. Control Chart Partisipasi Angkatan Kerja (2019)

Gambar 29. Control Chart Partisipasi Angkatan Kerja (2021)



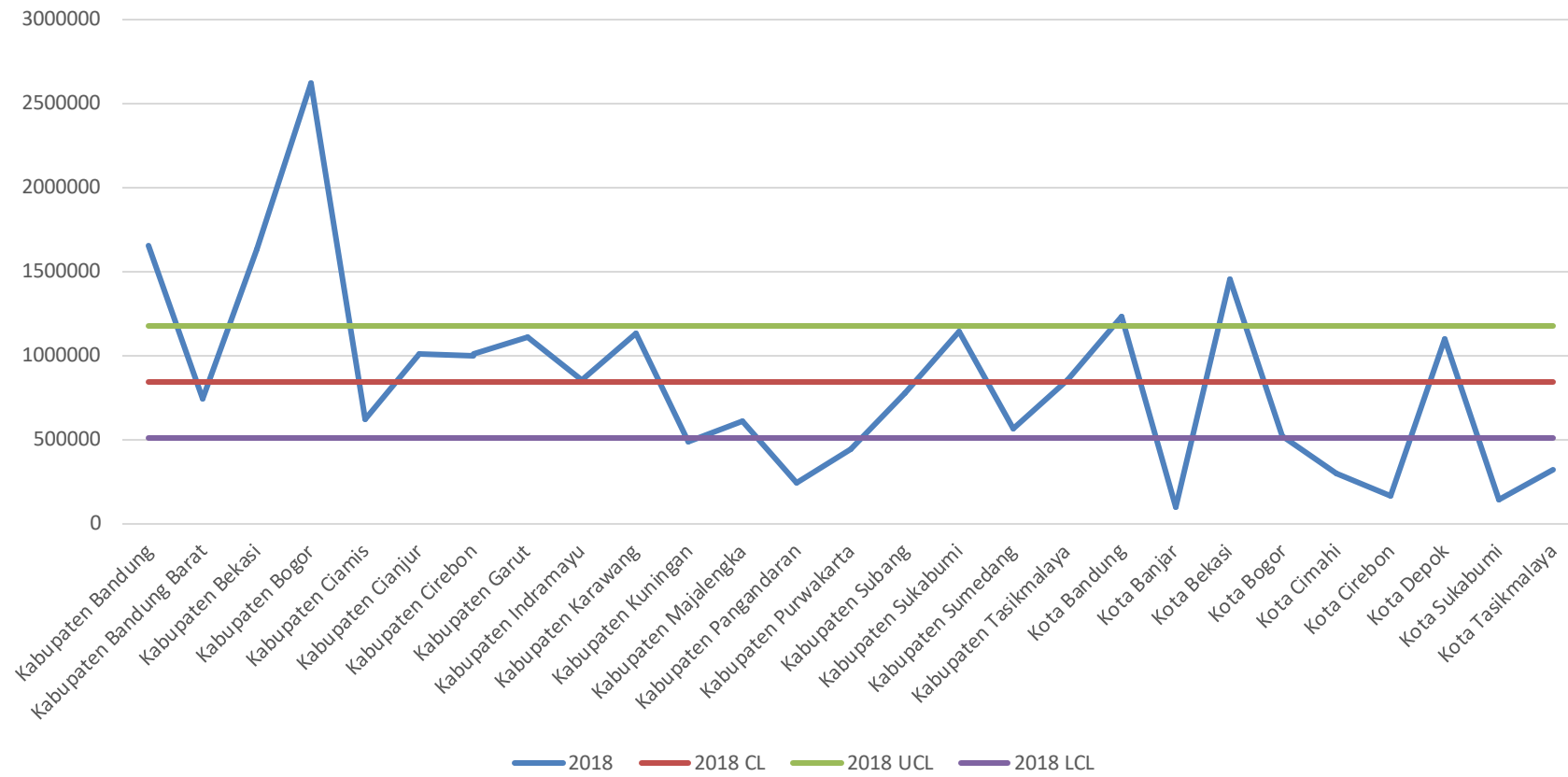
Gambar 30. Control Chart Partisipasi Angkatan Kerja (2022)

Tabel 16. Summary Hasil Analisis Variabel TPAK

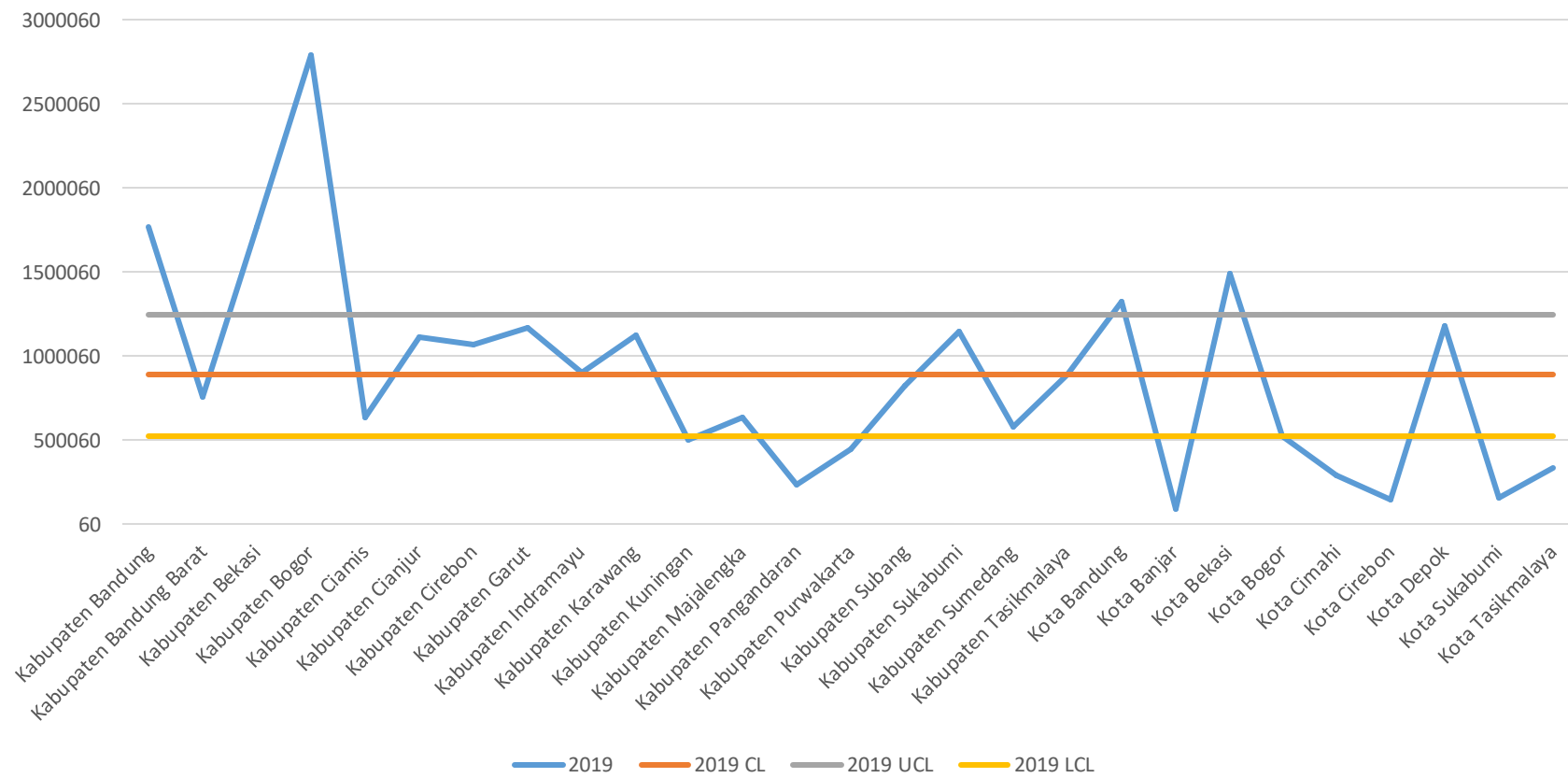
No	Kota/Kabupaten	Kategori TPAK				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kabupaten Bandung	LOW	MODERATE	LOW	MODERATE	LOW
2	Kabupaten Bandung Barat	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW
3	Kabupaten Bekasi	LOW	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE
4	Kabupaten Bogor	MODERATE	MODERATE	LOW	LOW	LOW
5	Kabupaten Ciamis	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH
6	Kabupaten Cianjur	LOW	MODERATE	HIGH	HIGH	HIGH
7	Kabupaten Cirebon	LOW	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE
8	Kabupaten Garut	LOW	LOW	LOW	LOW	HIGH
9	Kabupaten Indramayu	MODERATE	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH
10	Kabupaten Karawang	MODERATE	LOW	MODERATE	MODERATE	MODERATE
11	Kabupaten Kuningan	LOW	LOW	LOW	MODERATE	LOW
12	Kabupaten Majalengka	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	MODERATE
13	Kabupaten Pangandaran	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH
14	Kabupaten Purwakarta	MODERATE	MODERATE	LOW	LOW	MODERATE
15	Kabupaten Subang	MODERATE	HIGH	MODERATE	HIGH	HIGH
16	Kabupaten Sukabumi	MODERATE	LOW	LOW	MODERATE	HIGH
17	Kabupaten Sumedang	MODERATE	MODERATE	HIGH	HIGH	LOW
18	Kabupaten Tasikmalaya	MODERATE	MODERATE	HIGH	HIGH	MODERATE
19	Kota Bandung	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE	HIGH
20	Kota Banjar	MODERATE	HIGH	HIGH	MODERATE	LOW
21	Kota Bekasi	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE
22	Kota Bogor	MODERATE	LOW	LOW	LOW	LOW
23	Kota Cimahi	MODERATE	LOW	LOW	LOW	MODERATE
24	Kota Cirebon	HIGH	LOW	MODERATE	LOW	MODERATE
25	Kota Depok	MODERATE	MODERATE	MODERATE	LOW	LOW
26	Kota Sukabumi	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW
27	Kota Tasikmalaya	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE

Analisis Variabel Ekonomi

Jumlah Angkatan Kerja

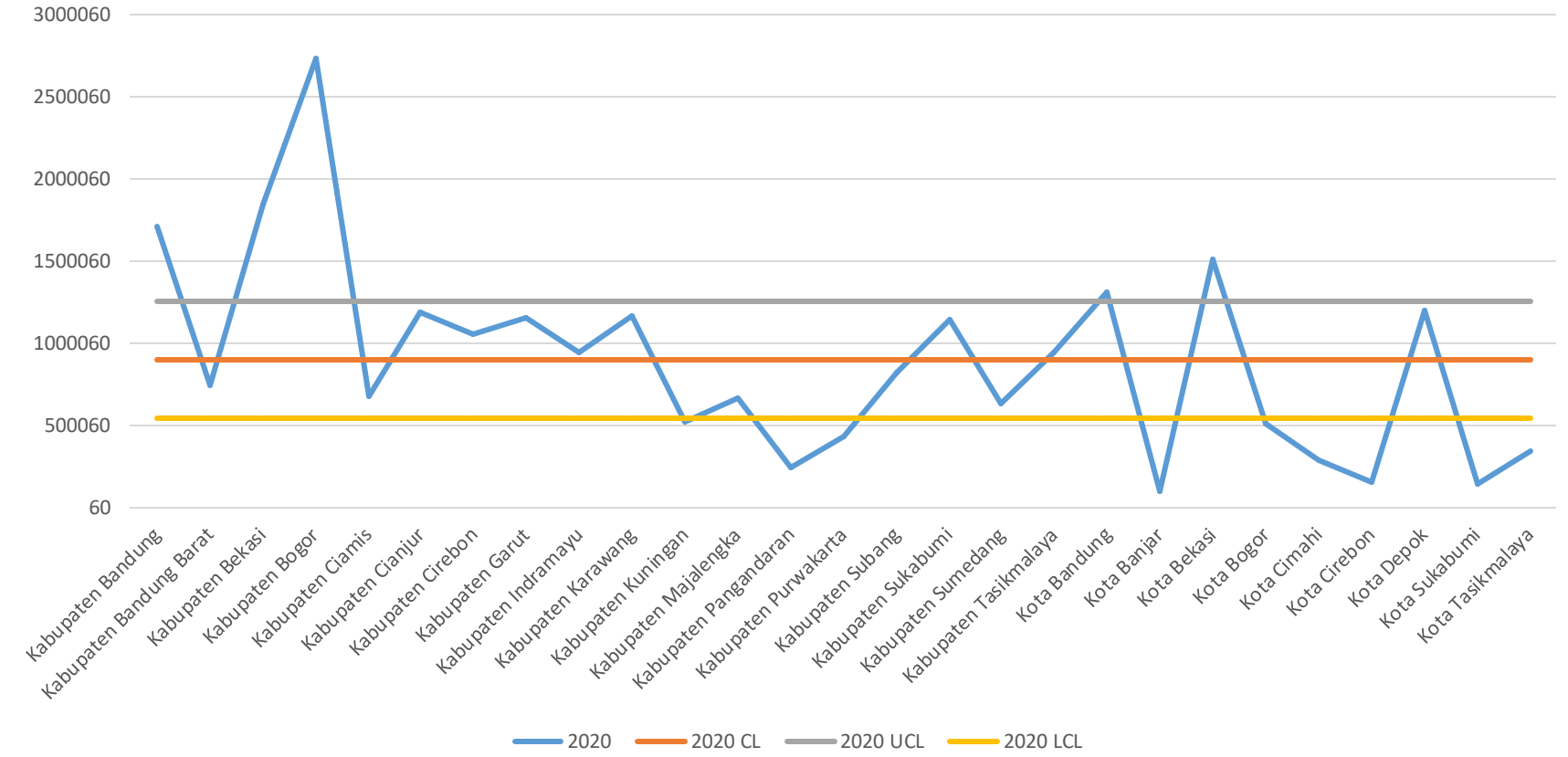


Gambar 31. Control Chart Jumlah Angkatan Kerja (2018)

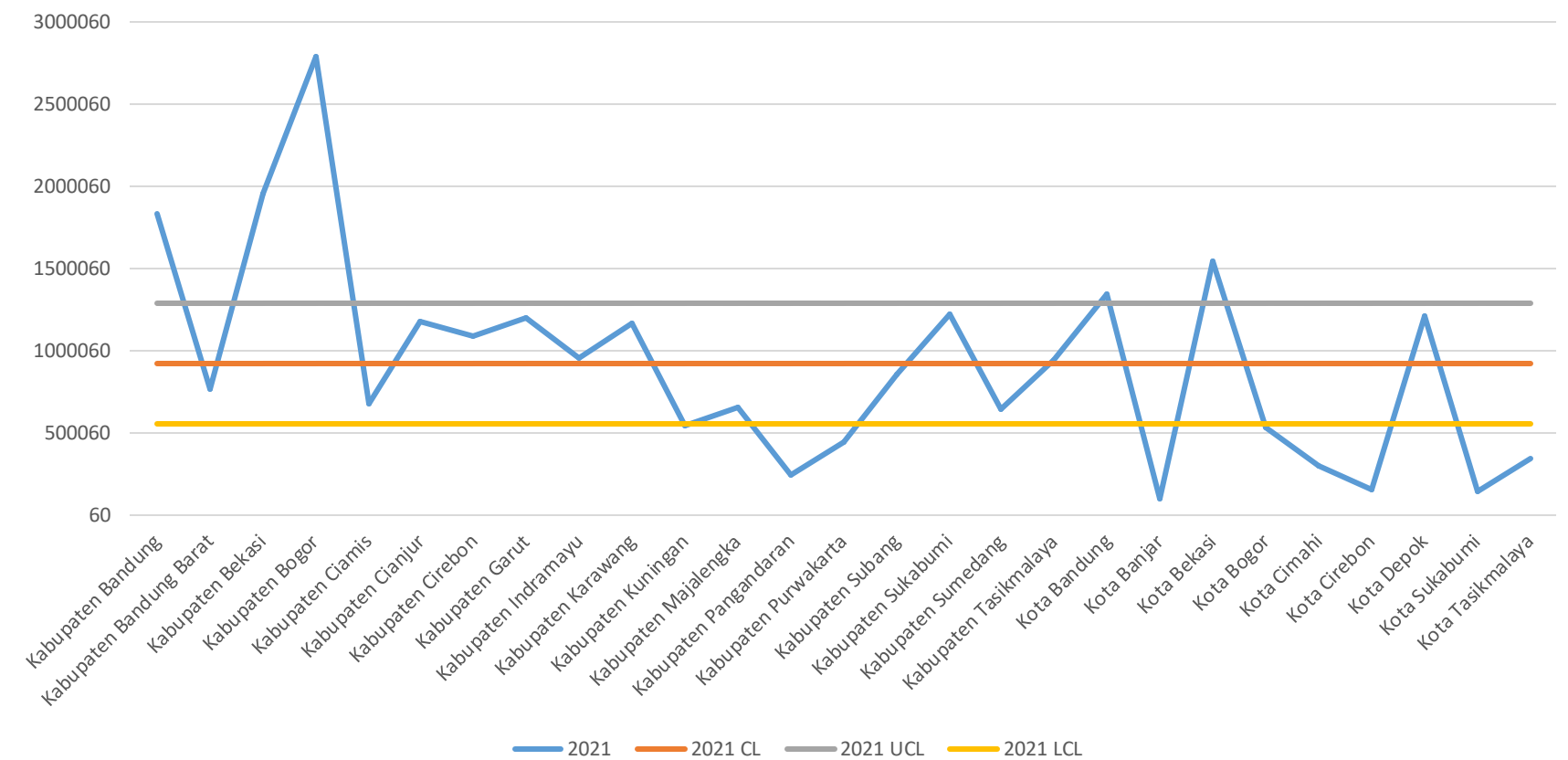


Gambar 32. Control Chart Jumlah Angkatan Kerja (2019)

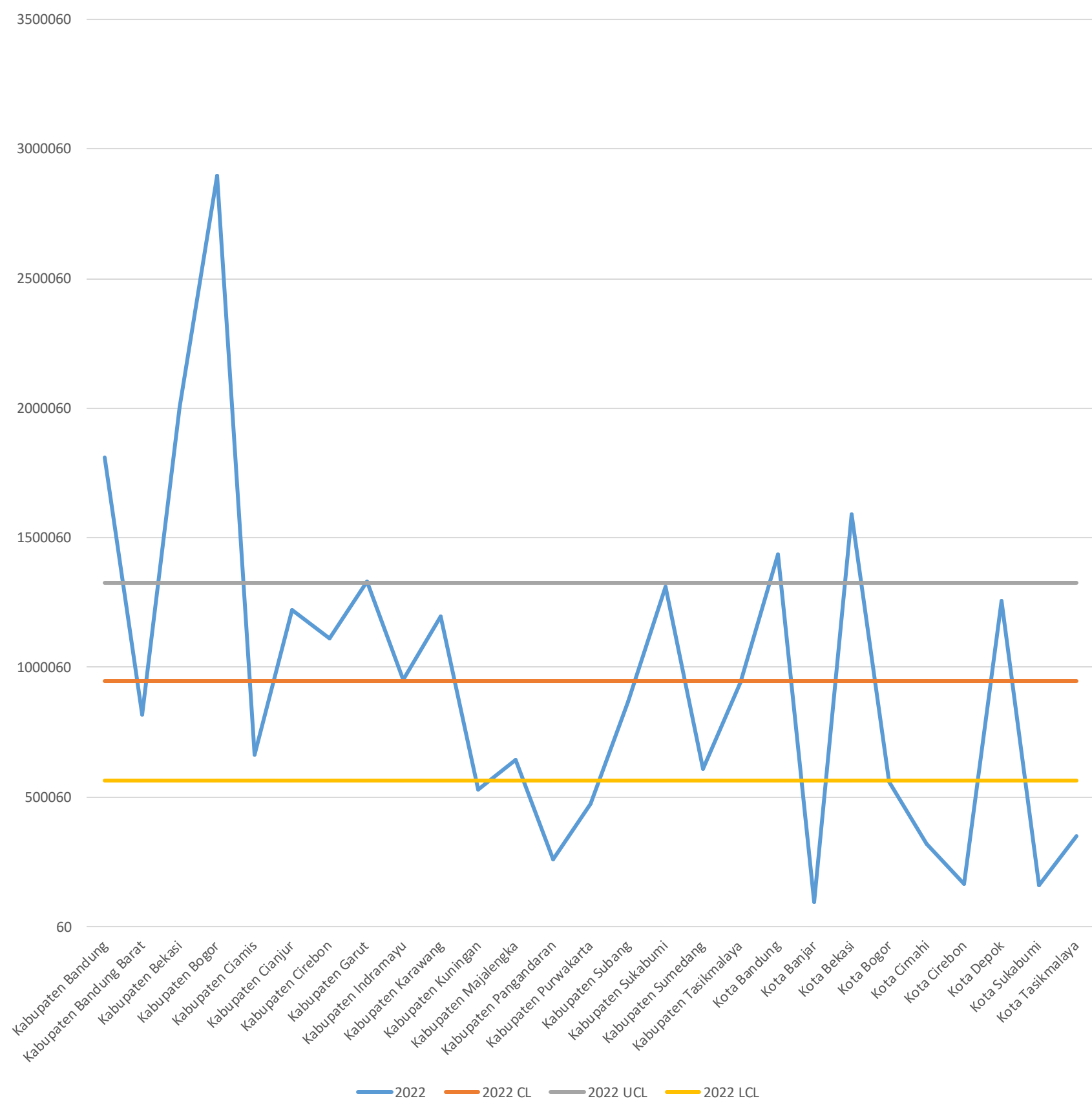
Sigma: 0.6



Gambar 33. Control Chart Jumlah Angkatan Kerja (2020)



Gambar 34. Control Chart Jumlah Angkatan Kerja (2021)



Gambar 35. Control Chart Jumlah Angkatan Kerja (2022)

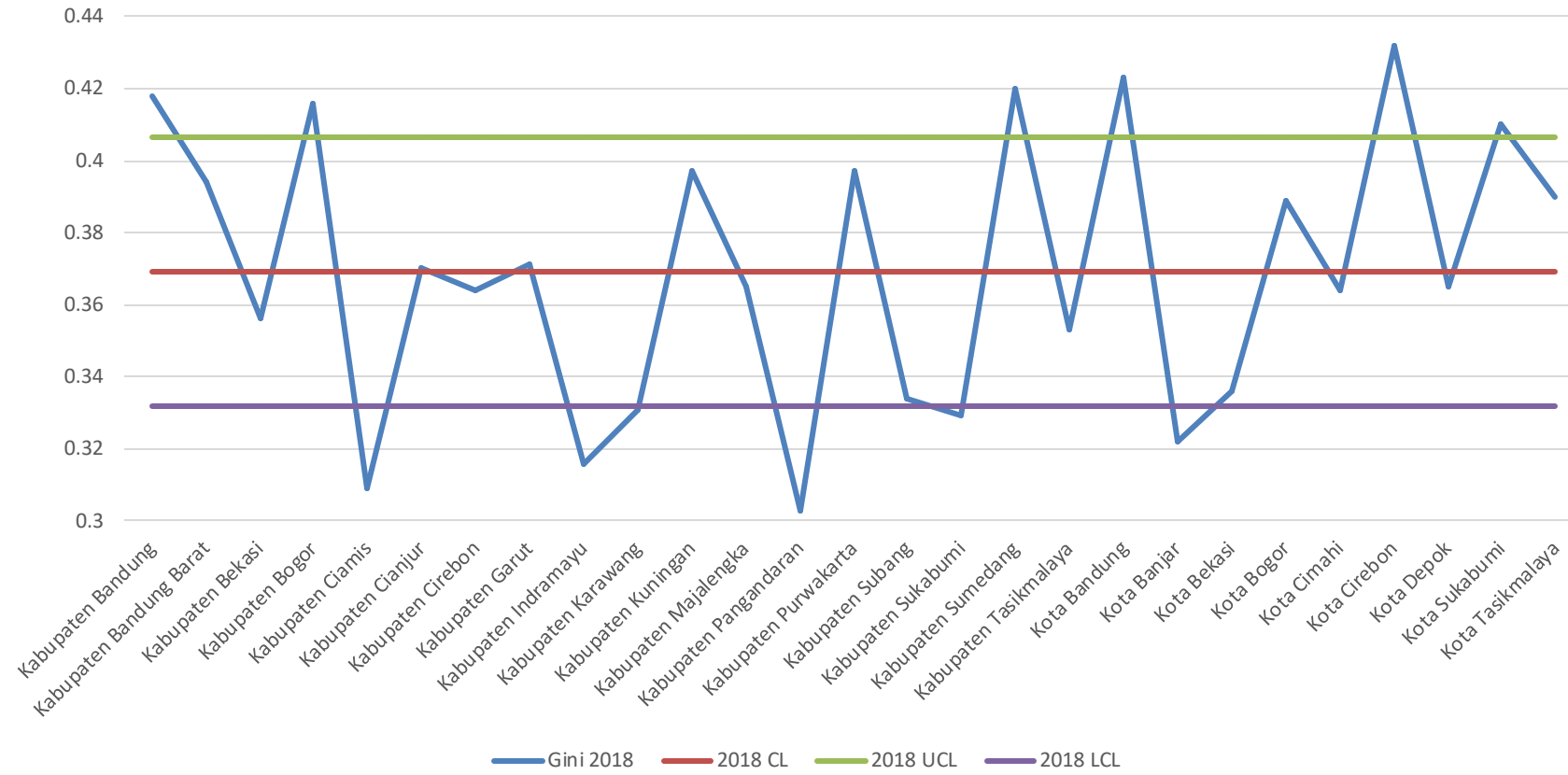
Tabel 17. Summary Hasil Analisis Variabel Jumlah Angkatan Kerja

No	Kota/Kabupaten	Kategori JAK				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kabupaten Bandung	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH
2	Kabupaten Bandung Barat	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE
3	Kabupaten Bekasi	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH
4	Kabupaten Bogor	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH
5	Kabupaten Ciamis	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE
6	Kabupaten Cianjur	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE
7	Kabupaten Cirebon	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE
8	Kabupaten Garut	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE	HIGH
9	Kabupaten Indramayu	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE
10	Kabupaten Karawang	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE
11	Kabupaten Kuningan	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW
12	Kabupaten Majalengka	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE
13	Kabupaten Pangandaran	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW
14	Kabupaten Purwakarta	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW
15	Kabupaten Subang	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE
16	Kabupaten Sukabumi	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE
17	Kabupaten Sumedang	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE
18	Kabupaten Tasikmalaya	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE
19	Kota Bandung	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH
20	Kota Banjar	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW
21	Kota Bekasi	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH
22	Kota Bogor	MODERATE	MODERATE	LOW	LOW	LOW
23	Kota Cimahi	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW
24	Kota Cirebon	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW
25	Kota Depok	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE
26	Kota Sukabumi	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW
27	Kota Tasikmalaya	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW

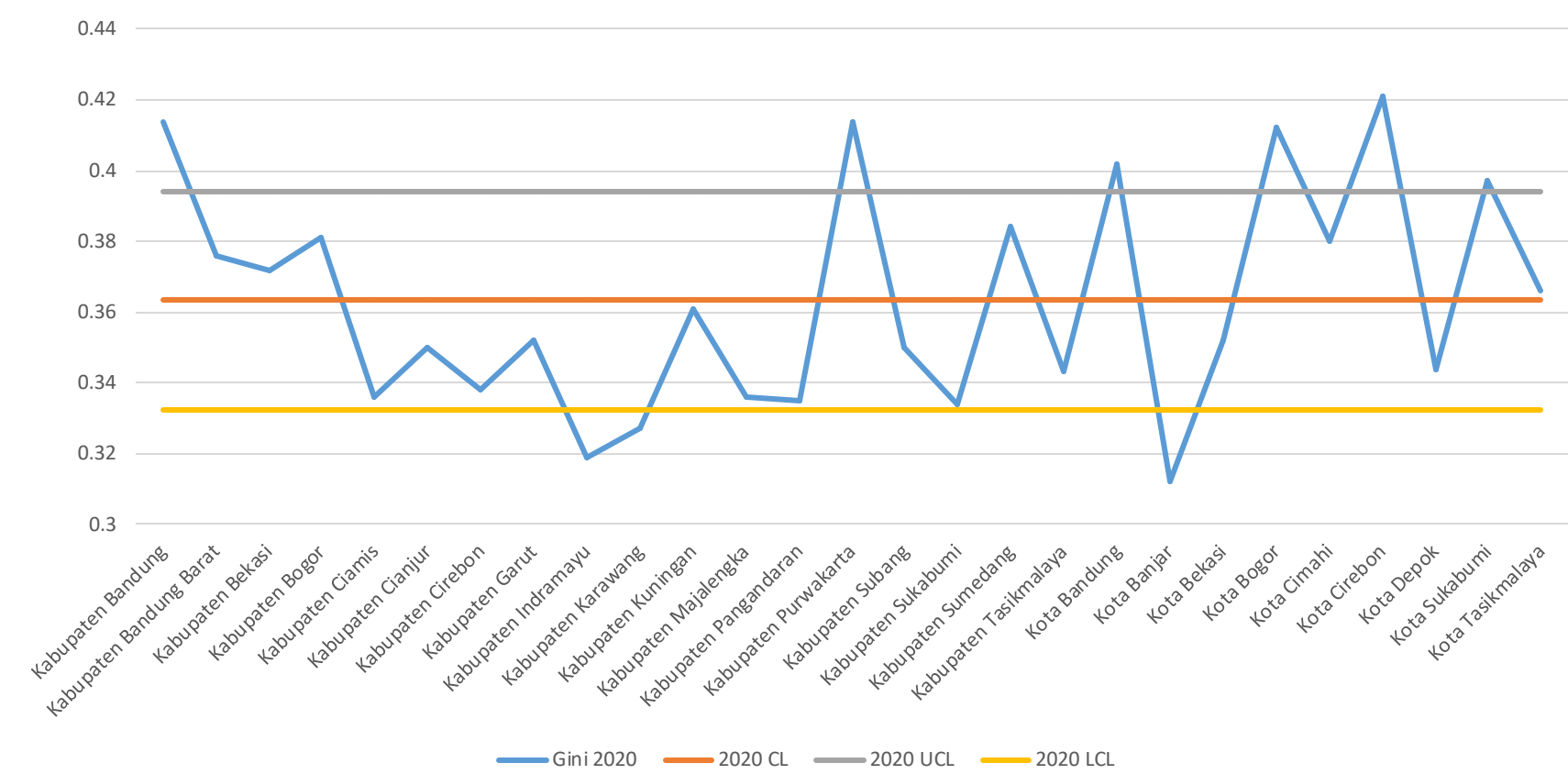
Analisis Variabel Ekonomi

Gini Ratio

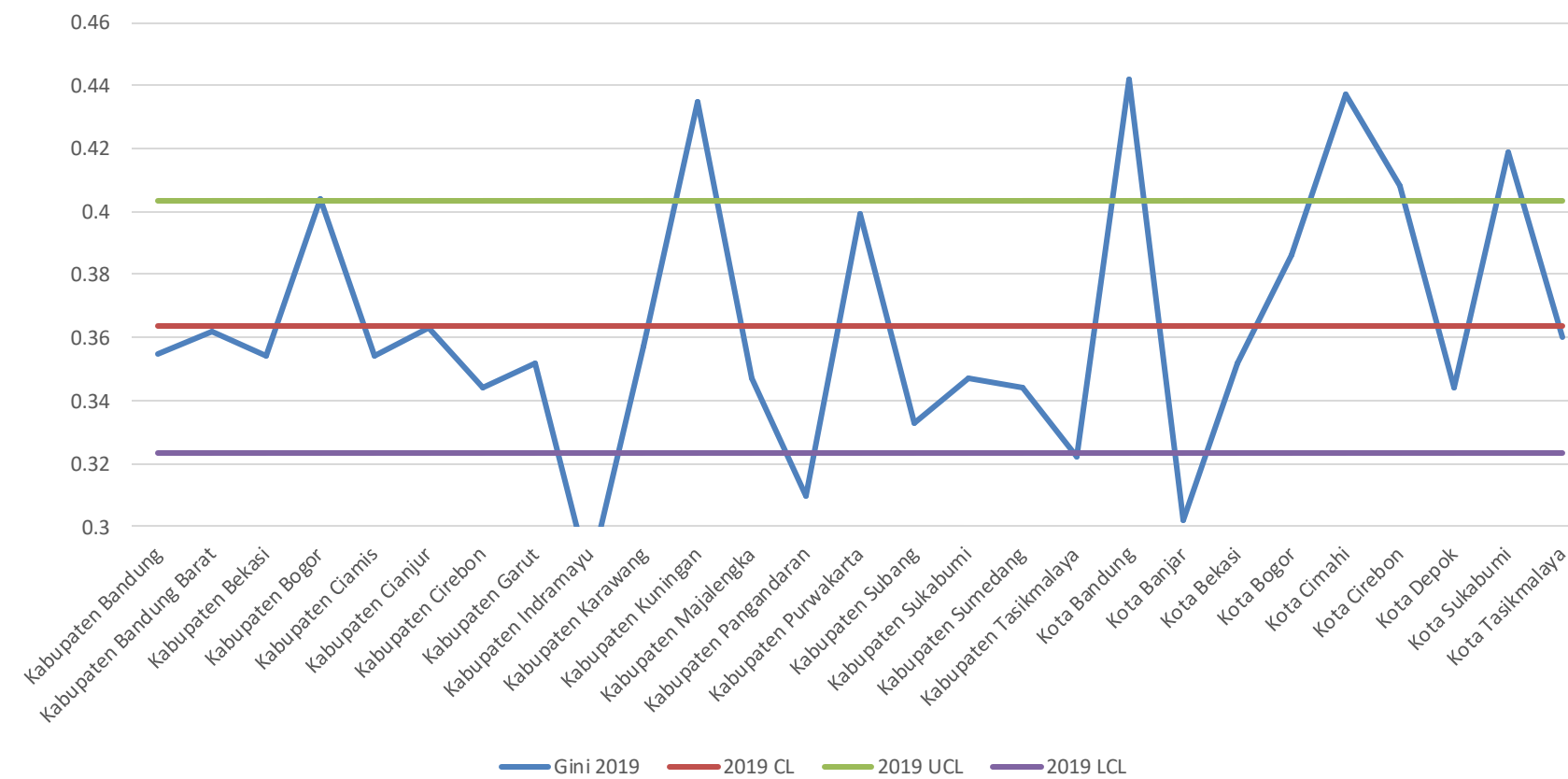
Sigma: 1



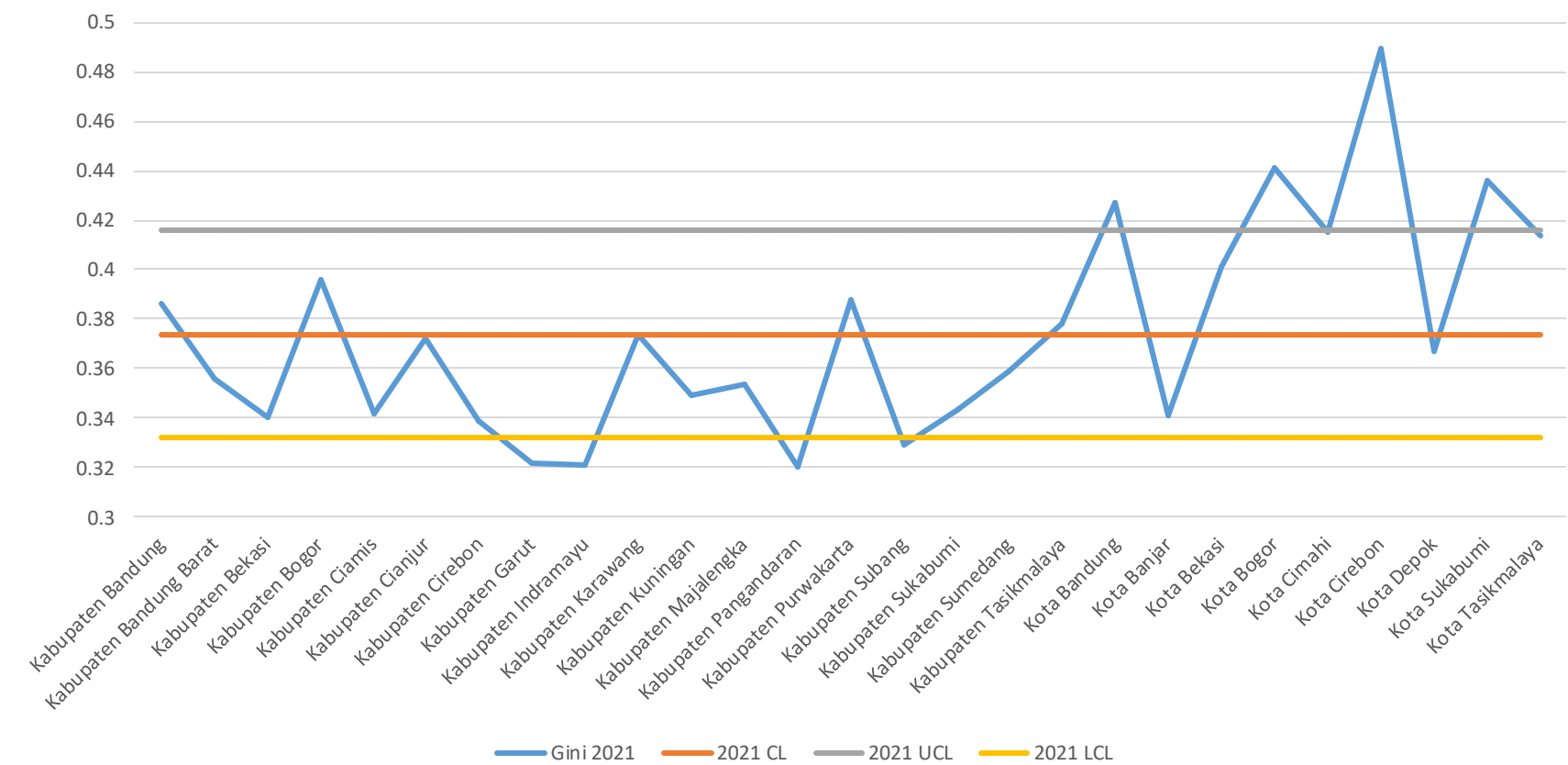
Gambar 36. Control Chart Gini Ratio (2018)



Gambar 38. Control Chart Gini Ratio (2020)



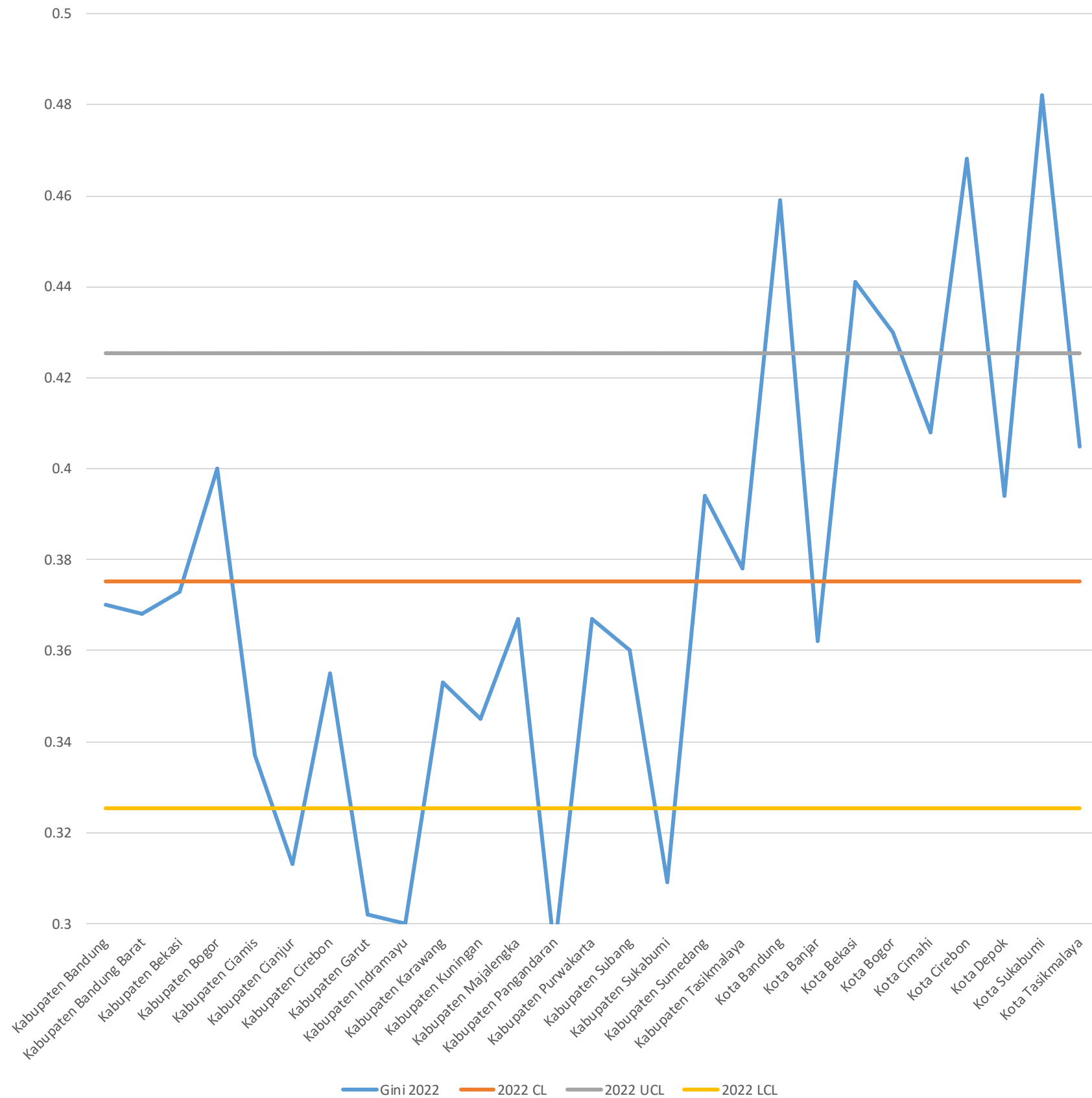
Gambar 37. Control Chart Gini Ratio (2019)



Gambar 39. Control Chart Gini Ratio (2021)

Tabel 18. Summary Hasil Analisis Variabel Gini Ratio

No	Kabupaten/Kota	Kategori Gini Ratio				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kabupaten Bandung	HIGH	MODERATE	HIGH	MODERATE	MODERATE
2	Kabupaten Bandung Barat	HIGH	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE
3	Kabupaten Bekasi	MODERATE	MODERATE	MODERATE	LOW	MODERATE
4	Kabupaten Bogor	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	MODERATE
5	Kabupaten Ciamis	LOW	MODERATE	LOW	LOW	LOW
6	Kabupaten Cianjur	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE	LOW
7	Kabupaten Cirebon	MODERATE	MODERATE	LOW	LOW	MODERATE
8	Kabupaten Garut	MODERATE	MODERATE	MODERATE	LOW	LOW
9	Kabupaten Indramayu	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW
10	Kabupaten Karawang	LOW	MODERATE	LOW	MODERATE	MODERATE
11	Kabupaten Kuningan	HIGH	HIGH	MODERATE	LOW	LOW
12	Kabupaten Majalengka	MODERATE	MODERATE	LOW	MODERATE	MODERATE
13	Kabupaten Pangandaran	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW
14	Kabupaten Purwakarta	HIGH	HIGH	HIGH	MODERATE	MODERATE
15	Kabupaten Subang	LOW	LOW	MODERATE	LOW	MODERATE
16	Kabupaten Sukabumi	LOW	MODERATE	LOW	LOW	LOW
17	Kabupaten Sumedang	HIGH	MODERATE	HIGH	MODERATE	MODERATE
18	Kabupaten Tasikmalaya	MODERATE	LOW	LOW	MODERATE	MODERATE
19	Kota Bandung	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH
20	Kota Banjar	LOW	LOW	LOW	LOW	MODERATE
21	Kota Bekasi	LOW	MODERATE	MODERATE	HIGH	HIGH
22	Kota Bogor	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH
23	Kota Cimahi	MODERATE	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH
24	Kota Cirebon	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH
25	Kota Depok	MODERATE	MODERATE	LOW	MODERATE	MODERATE
26	Kota Sukabumi	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH
27	Kota Tasikmalaya	HIGH	MODERATE	MODERATE	HIGH	HIGH

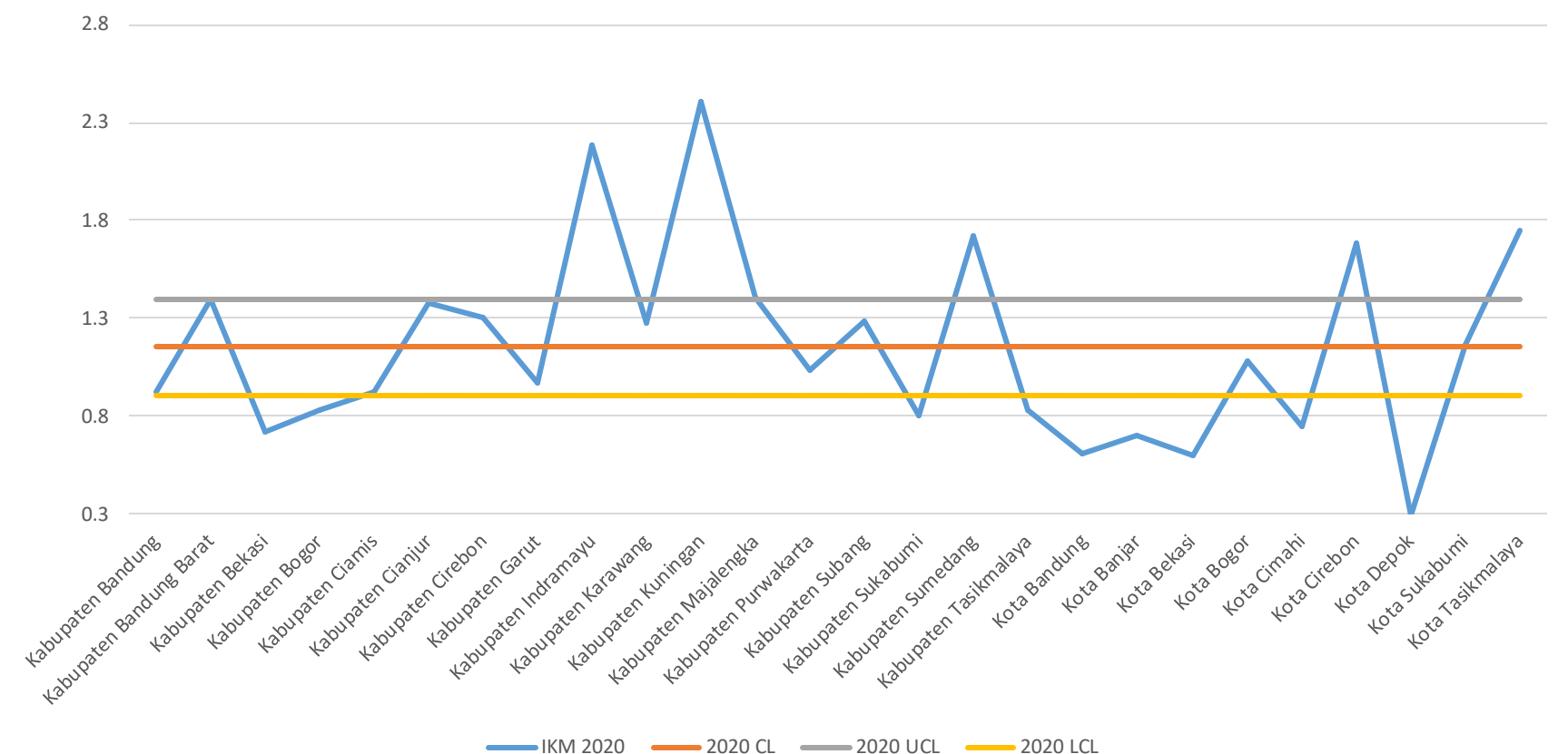
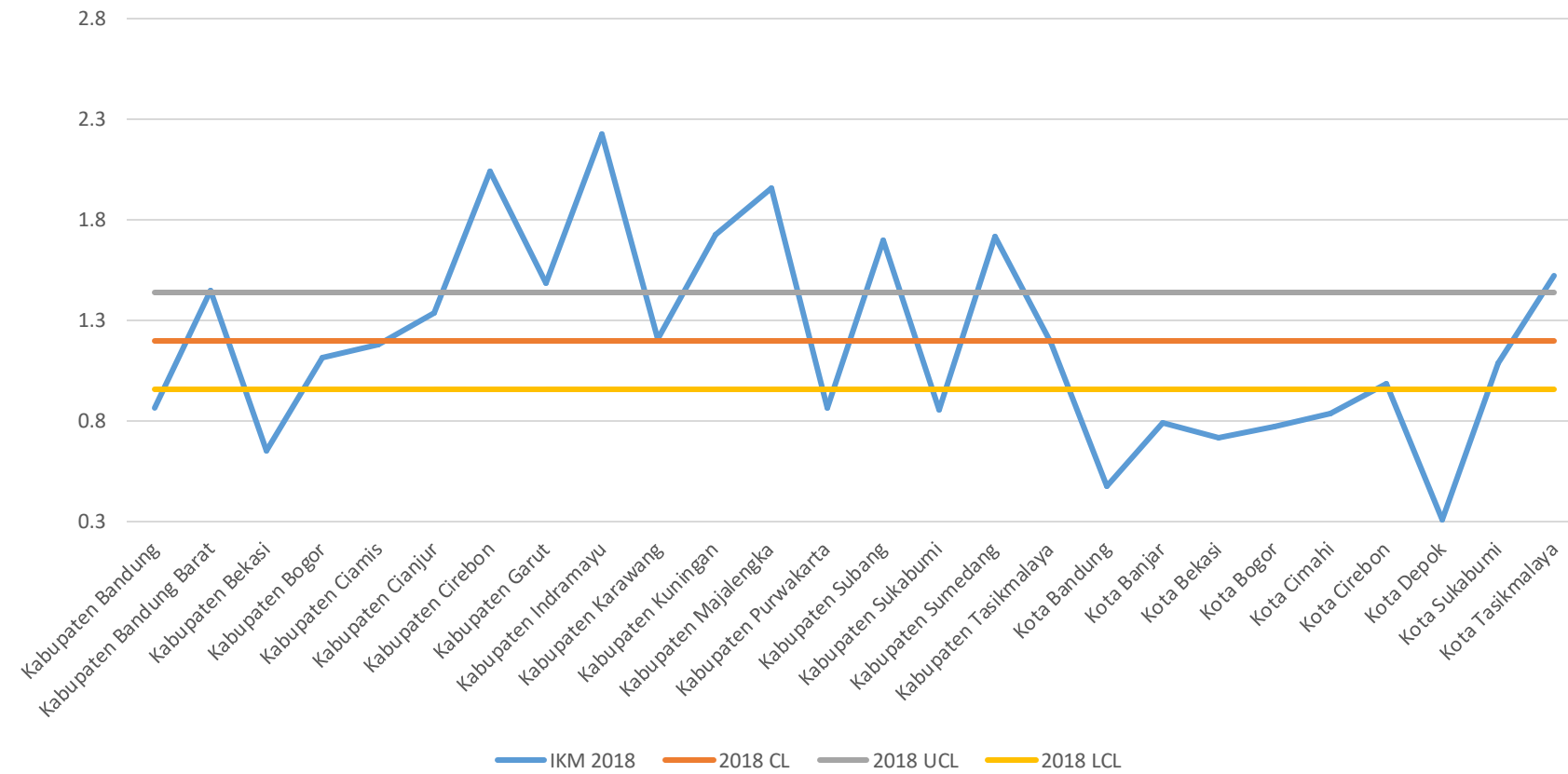


Gambar 40. Control Chart Gini Ratio (2022)

Analisis Variabel Ekonomi

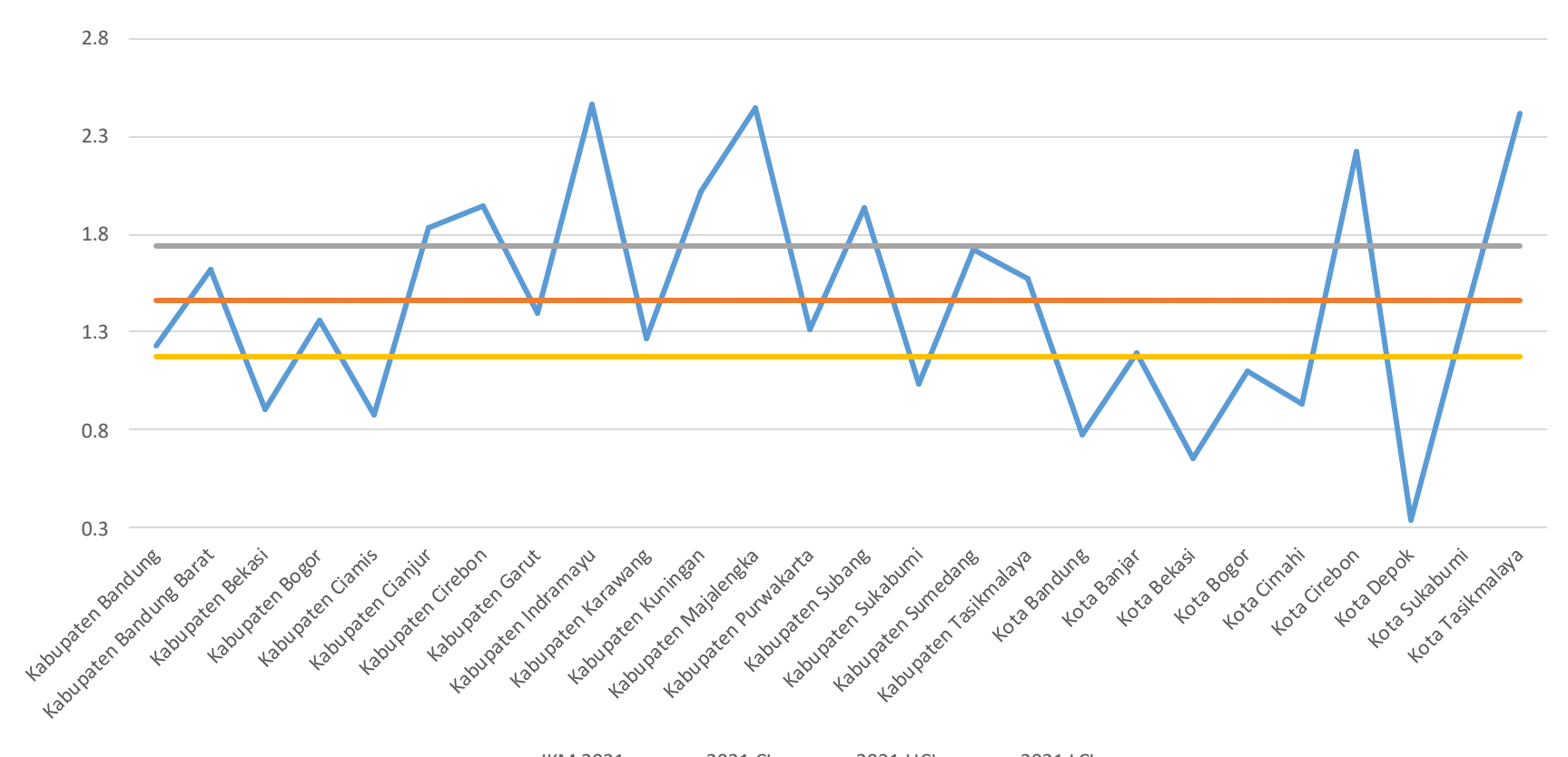
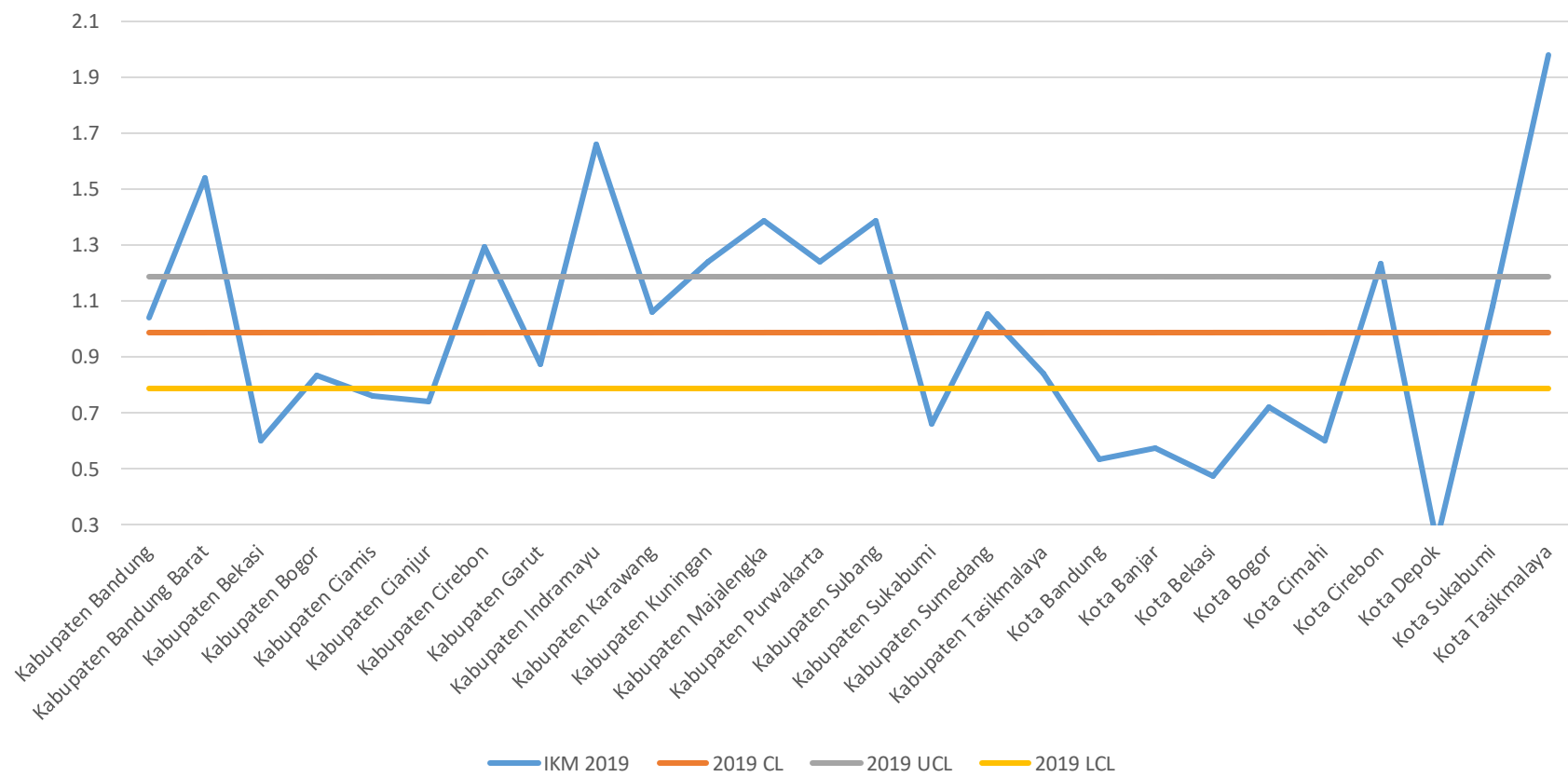
Indeks Kedalaman Kemiskinan

Sigma: 0.5



Gambar 41. Control Chart Indeks Kedalaman Kemiskinan (2018)

Gambar 43. Control Chart Indeks Kedalaman Kemiskinan (2020)

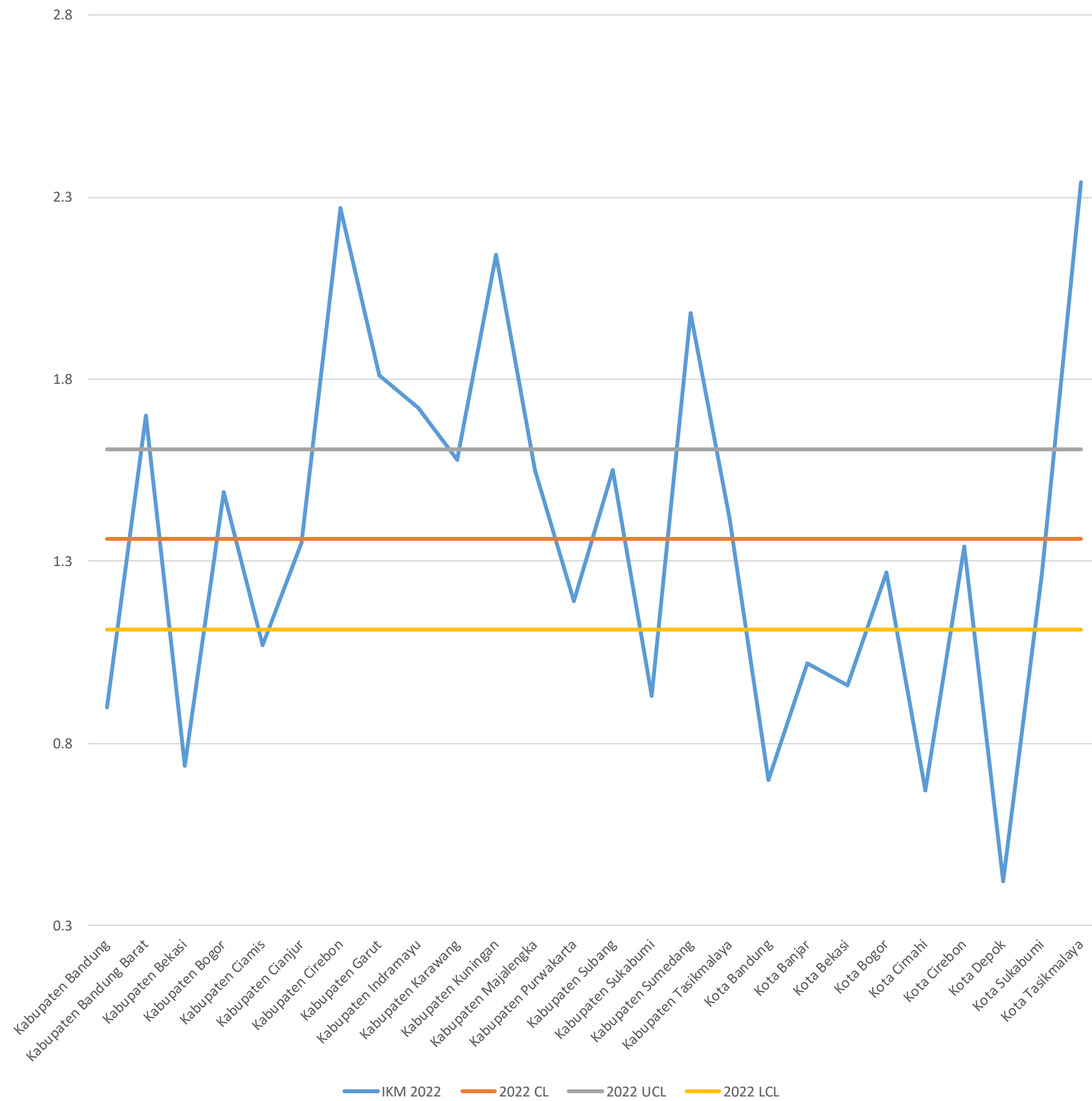


Gambar 42. Control Chart Indeks Kedalaman Kemiskinan (2019)

Gambar 44. Control Chart Indeks Kedalaman Kemiskinan (2021)

Tabel 19. Summary Hasil Analisis Variabel Indeks Kedalaman Kemiskinan

No	Kabupaten/Kota	Kategori IKM				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kabupaten Bandung	LOW	MODERATE	MODERATE	MODERATE	LOW
2	Kabupaten Bandung Barat	HIGH	HIGH	HIGH	MODERATE	HIGH
3	Kabupaten Bekasi	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW
4	Kabupaten Bogor	MODERATE	MODERATE	LOW	MODERATE	MODERATE
5	Kabupaten Ciamis	MODERATE	LOW	MODERATE	LOW	LOW
6	Kabupaten Cianjur	MODERATE	LOW	MODERATE	HIGH	MODERATE
7	Kabupaten Cirebon	HIGH	HIGH	MODERATE	HIGH	HIGH
8	Kabupaten Garut	HIGH	MODERATE	MODERATE	MODERATE	HIGH
9	Kabupaten Indramayu	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH
10	Kabupaten Karawang	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE
11	Kabupaten Kuningan	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH
12	Kabupaten Majalengka	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	MODERATE
13	Kabupaten Purwakarta	LOW	HIGH	MODERATE	MODERATE	MODERATE
14	Kabupaten Subang	HIGH	HIGH	MODERATE	HIGH	MODERATE
15	Kabupaten Sukabumi	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW
16	Kabupaten Sumedang	HIGH	MODERATE	HIGH	MODERATE	HIGH
17	Kabupaten Tasikmalaya	MODERATE	MODERATE	LOW	MODERATE	MODERATE
18	Kota Bandung	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW
19	Kota Banjar	LOW	LOW	LOW	MODERATE	LOW
20	Kota Bekasi	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW
21	Kota Bogor	LOW	LOW	MODERATE	LOW	MODERATE
22	Kota Cimahi	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW
23	Kota Cirebon	MODERATE	HIGH	HIGH	HIGH	MODERATE
24	Kota Depok	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW
25	Kota Sukabumi	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE
26	Kota Tasikmalaya	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH

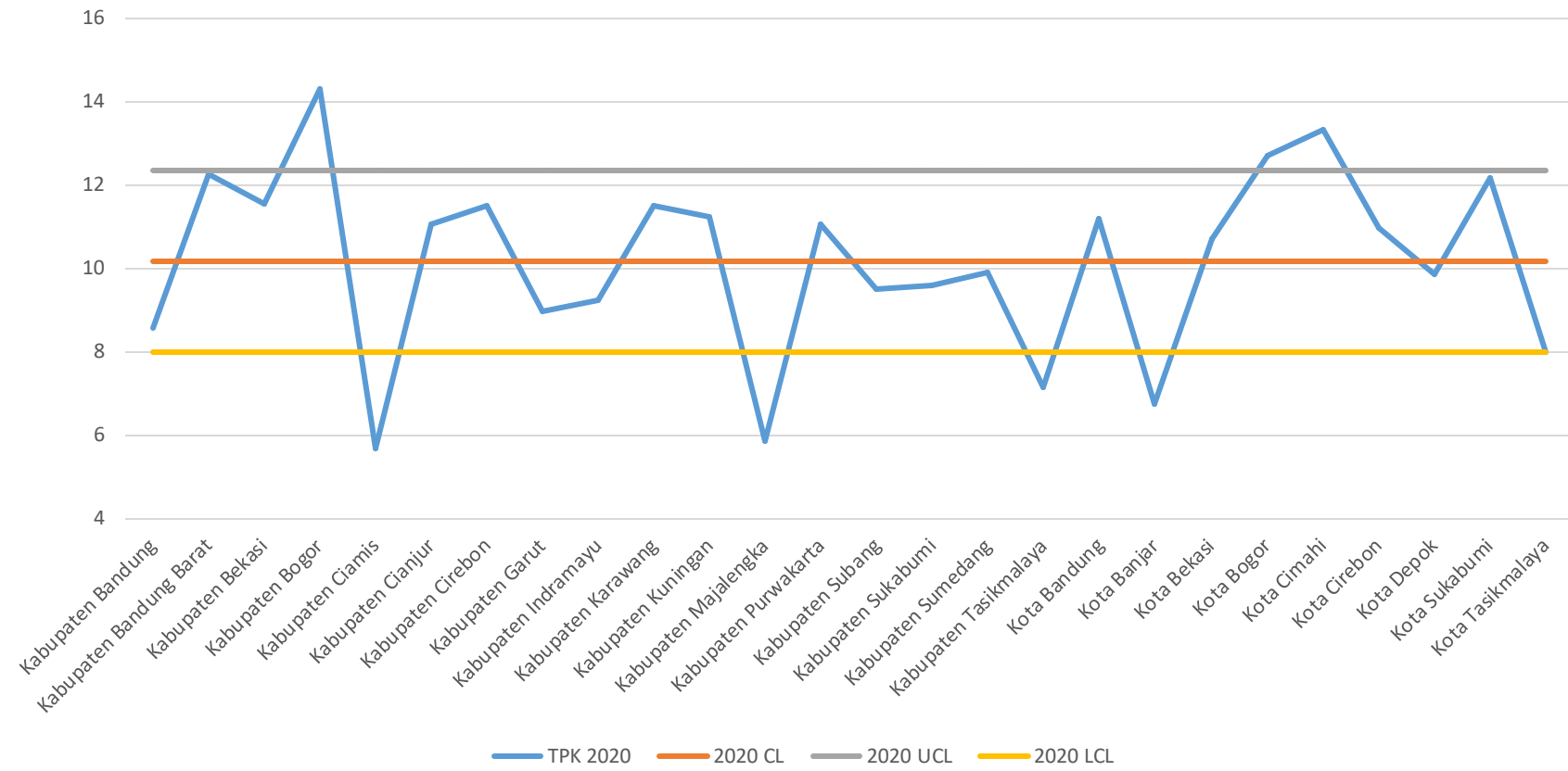
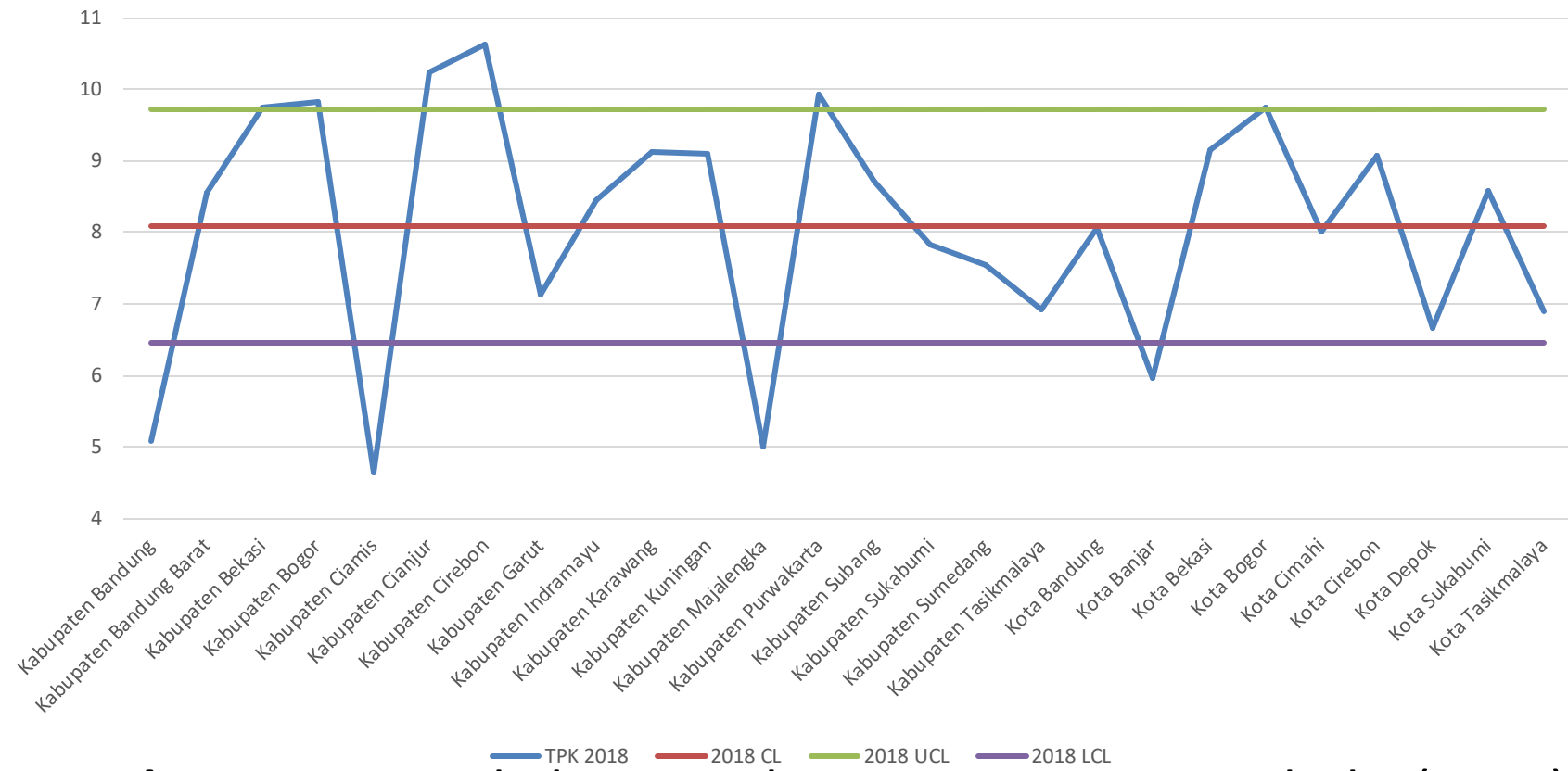


Gambar 45. Control Chart Indeks Kedalaman Kemiskinan (2022)

Analisis Variabel Ekonomi

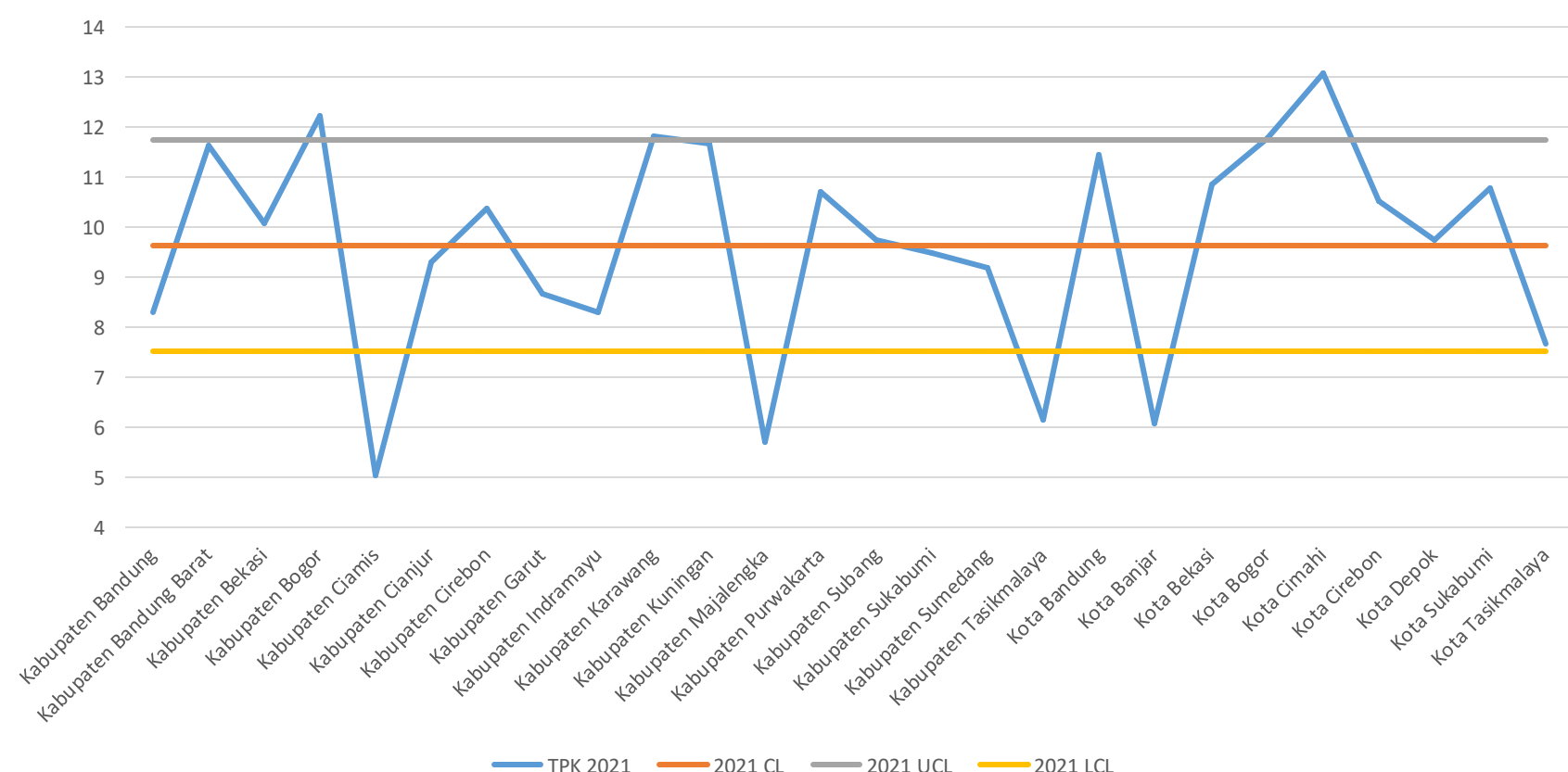
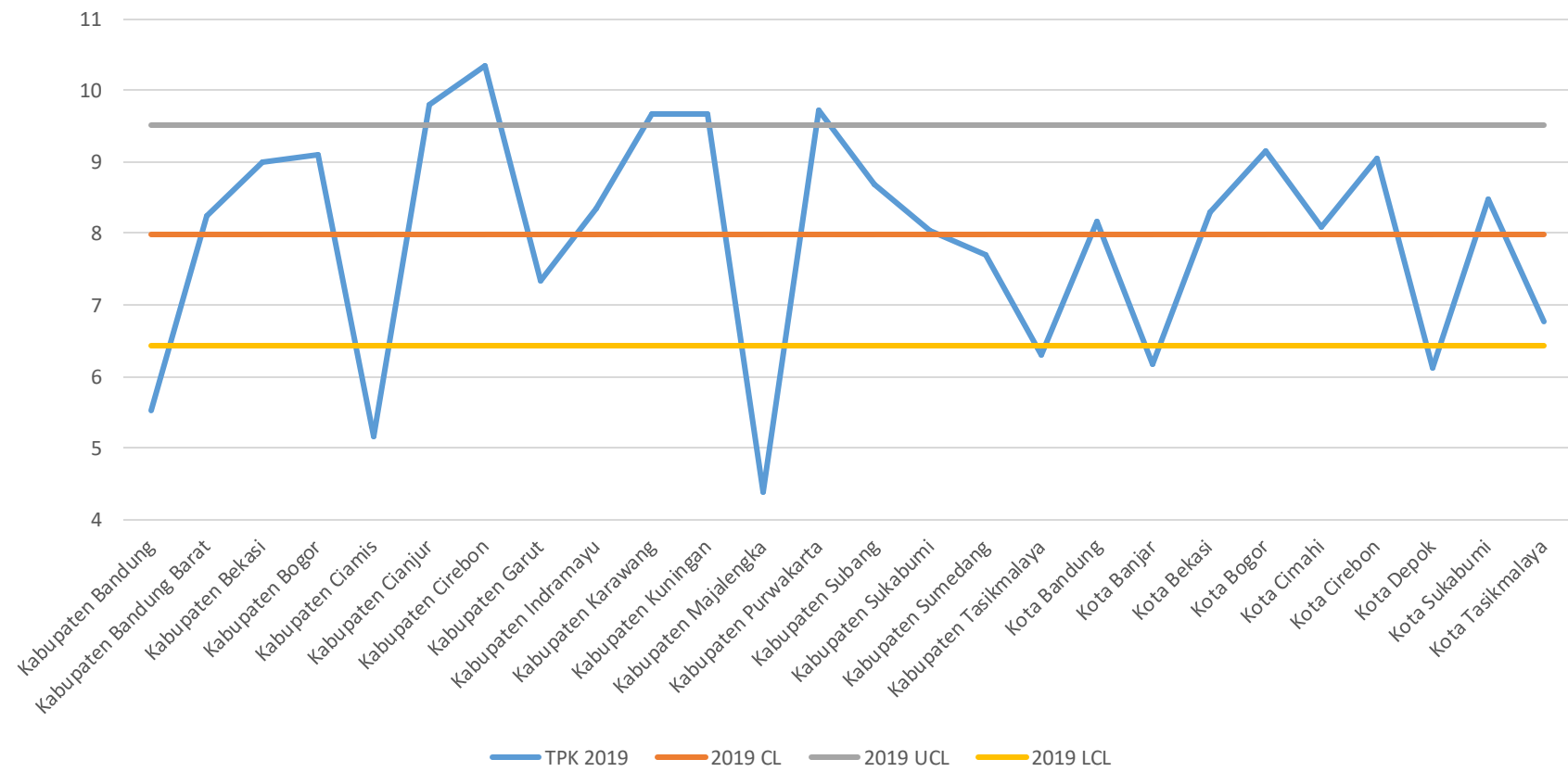
Tingkat Pengangguran Terbuka

Sigma: 1



Gambar 46. Control Chart Tingkat Pengangguran Terbuka (2018)

Gambar 48. Control Chart Tingkat Pengangguran Terbuka (2020)

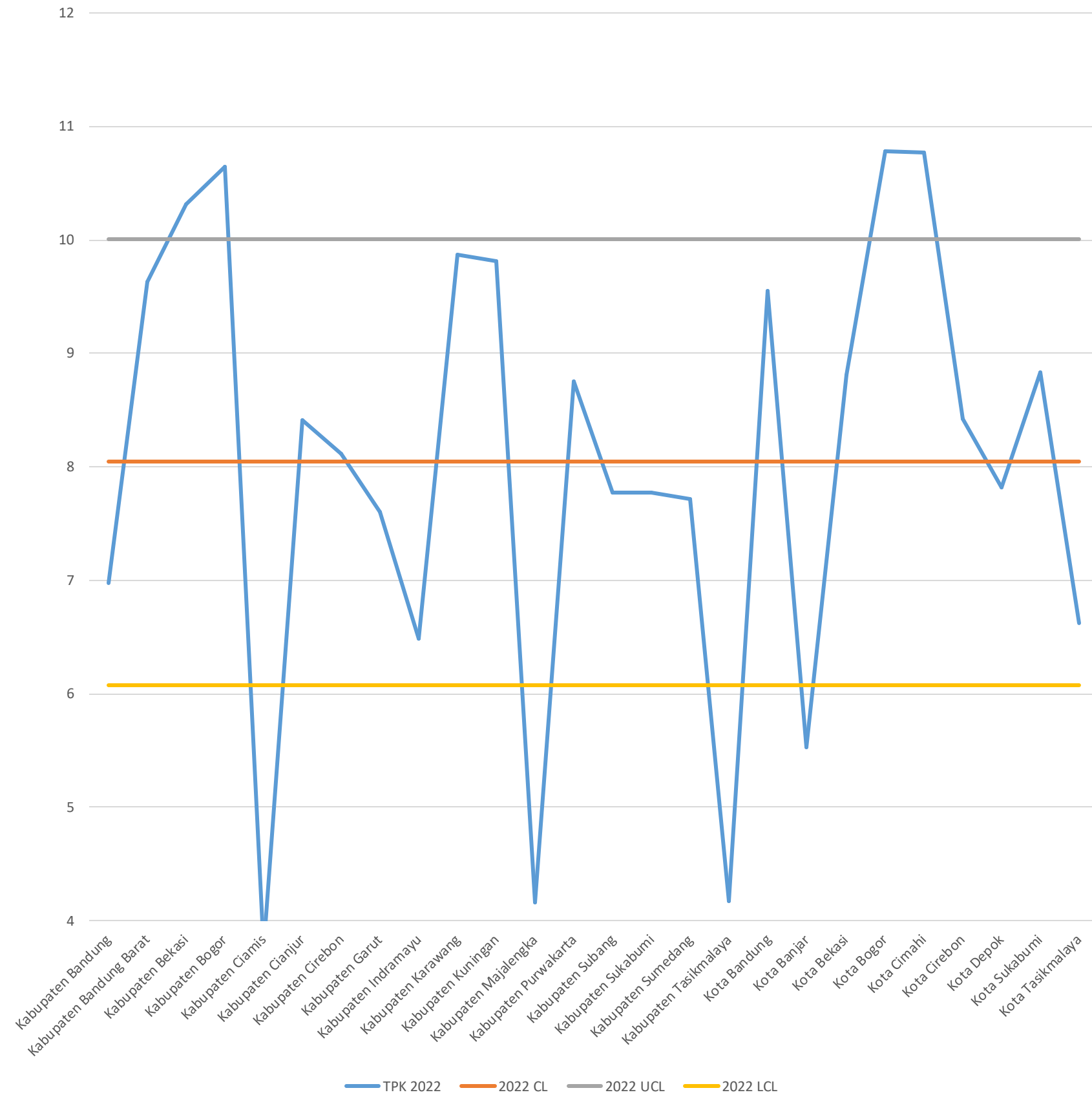


Gambar 47. Control Chart Tingkat Pengangguran Terbuka (2019)

Gambar 49. Control Chart Tingkat Pengangguran Terbuka (2021)

Tabel 20. Summary Hasil Analisis Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka

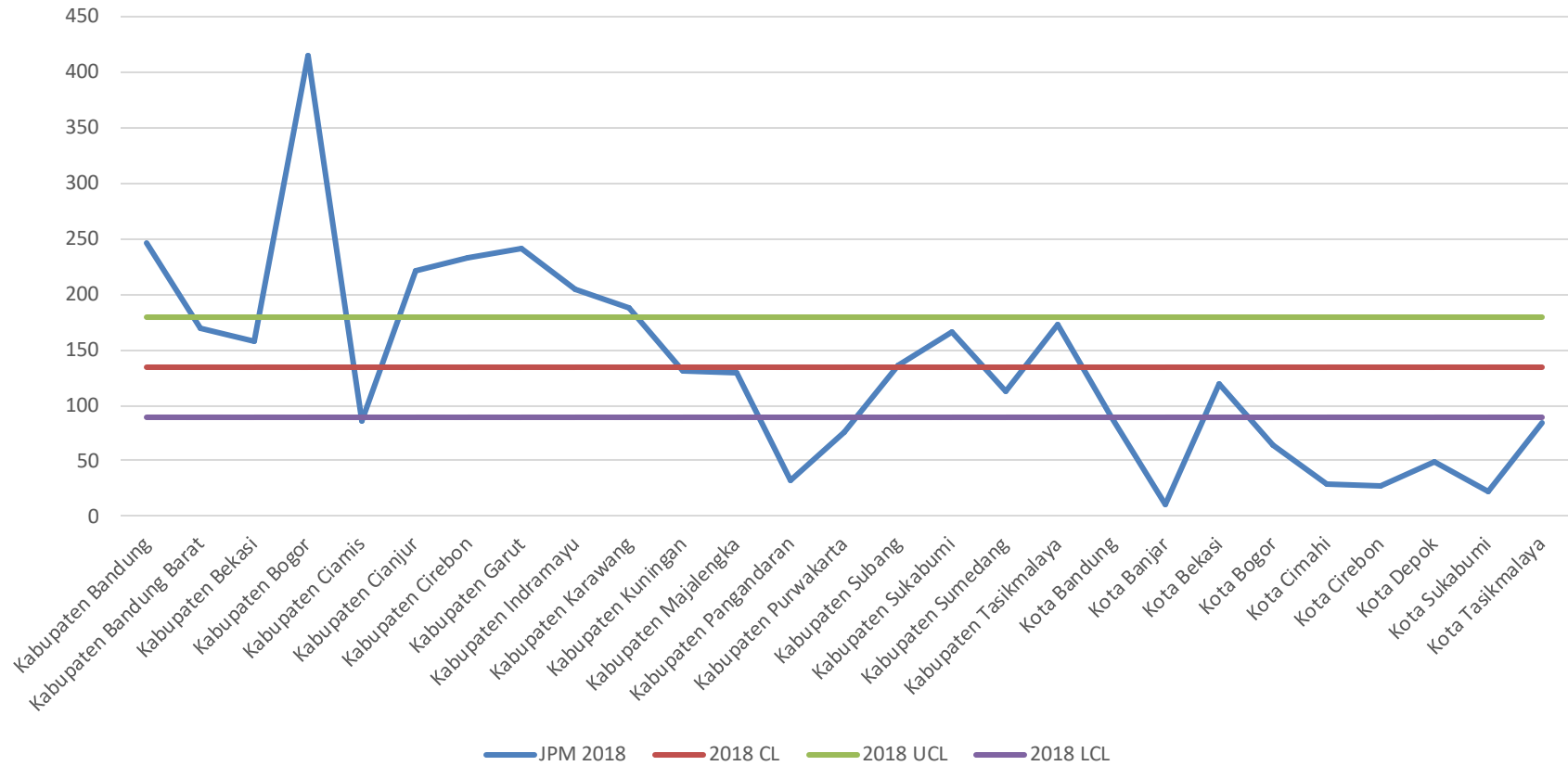
No	Kabupaten/Kota	Kategori TPT				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kabupaten Bandung	LOW	LOW	MODERATE	MODERATE	MODERATE
2	Kabupaten Bandung Barat	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE
3	Kabupaten Bekasi	HIGH	MODERATE	MODERATE	MODERATE	HIGH
4	Kabupaten Bogor	HIGH	MODERATE	HIGH	HIGH	HIGH
5	Kabupaten Ciamis	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW
6	Kabupaten Cianjur	HIGH	HIGH	MODERATE	MODERATE	MODERATE
7	Kabupaten Cirebon	HIGH	HIGH	MODERATE	MODERATE	MODERATE
8	Kabupaten Garut	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE
9	Kabupaten Indramayu	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE
10	Kabupaten Karawang	MODERATE	HIGH	MODERATE	HIGH	MODERATE
11	Kabupaten Kuningan	MODERATE	HIGH	MODERATE	MODERATE	MODERATE
12	Kabupaten Majalengka	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW
13	Kabupaten Purwakarta	HIGH	HIGH	MODERATE	MODERATE	MODERATE
14	Kabupaten Subang	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE
15	Kabupaten Sukabumi	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE
16	Kabupaten Sumedang	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE
17	Kabupaten Tasikmalaya	MODERATE	LOW	LOW	LOW	LOW
18	Kota Bandung	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE
19	Kota Banjar	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW
20	Kota Bekasi	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE
21	Kota Bogor	HIGH	MODERATE	HIGH	HIGH	HIGH
22	Kota Cimahi	MODERATE	MODERATE	HIGH	HIGH	HIGH
23	Kota Cirebon	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE
24	Kota Depok	MODERATE	LOW	MODERATE	MODERATE	MODERATE
25	Kota Sukabumi	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE
26	Kota Tasikmalaya	MODERATE	MODERATE	LOW	MODERATE	MODERATE



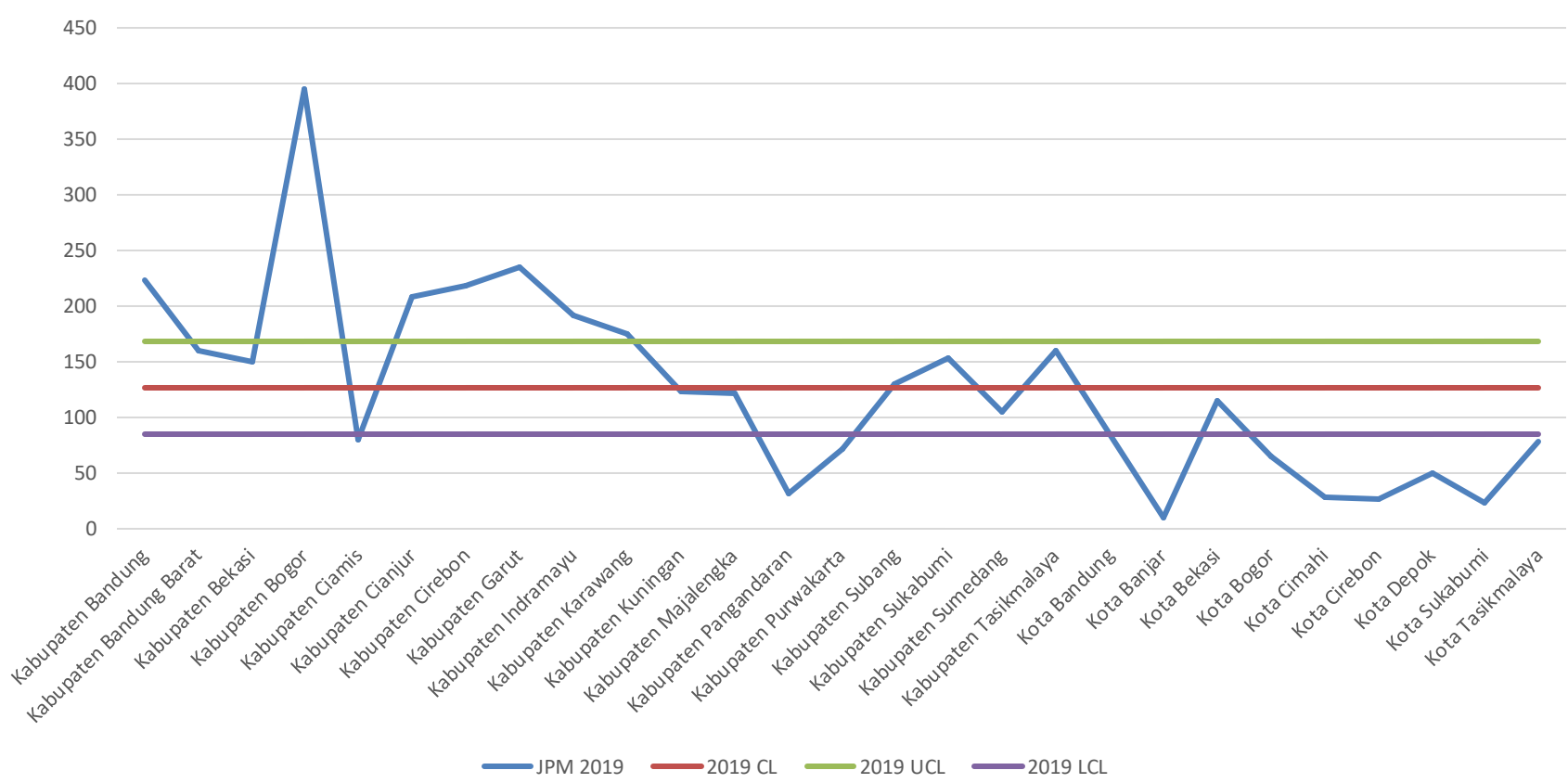
Gambar 50. Control Chart Tingkat Pengangguran Terbuka (2022)

Analisis Variabel Ekonomi

Jumlah Penduduk Miskin

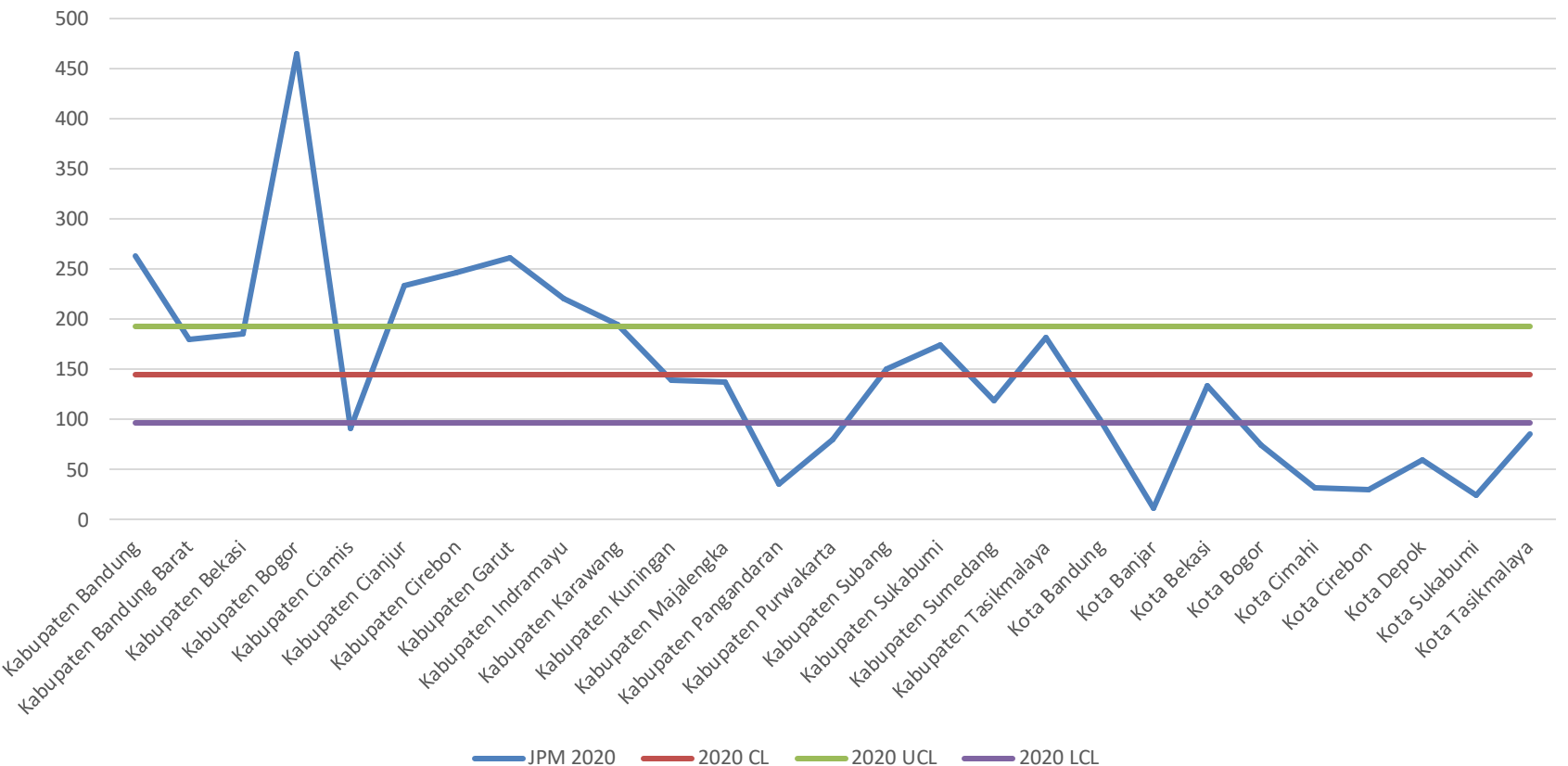


Gambar 51. Control Chart Jumlah Penduduk Miskin (2018)

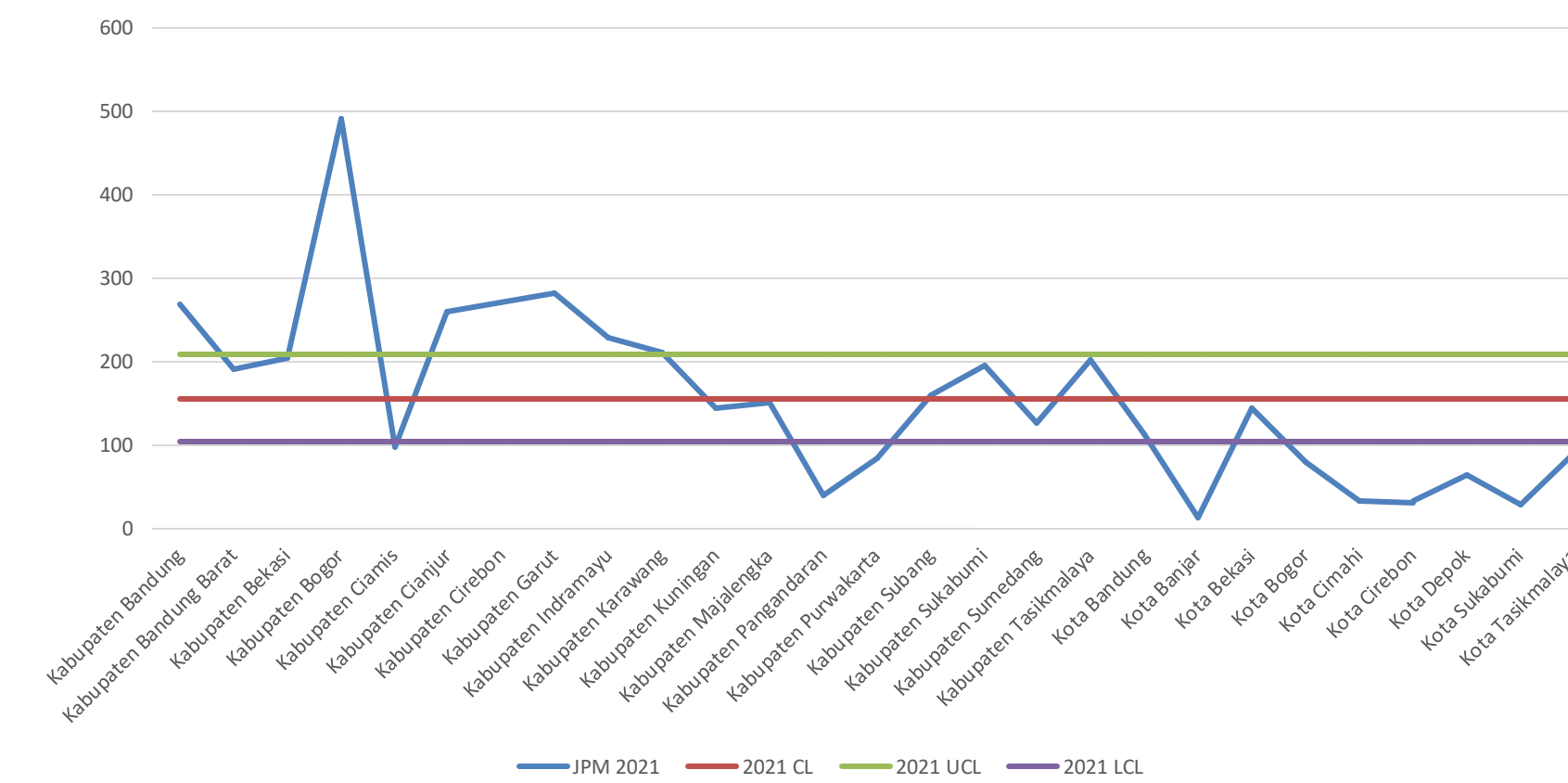


Gambar 52. Control Chart Jumlah Penduduk Miskin (2019)

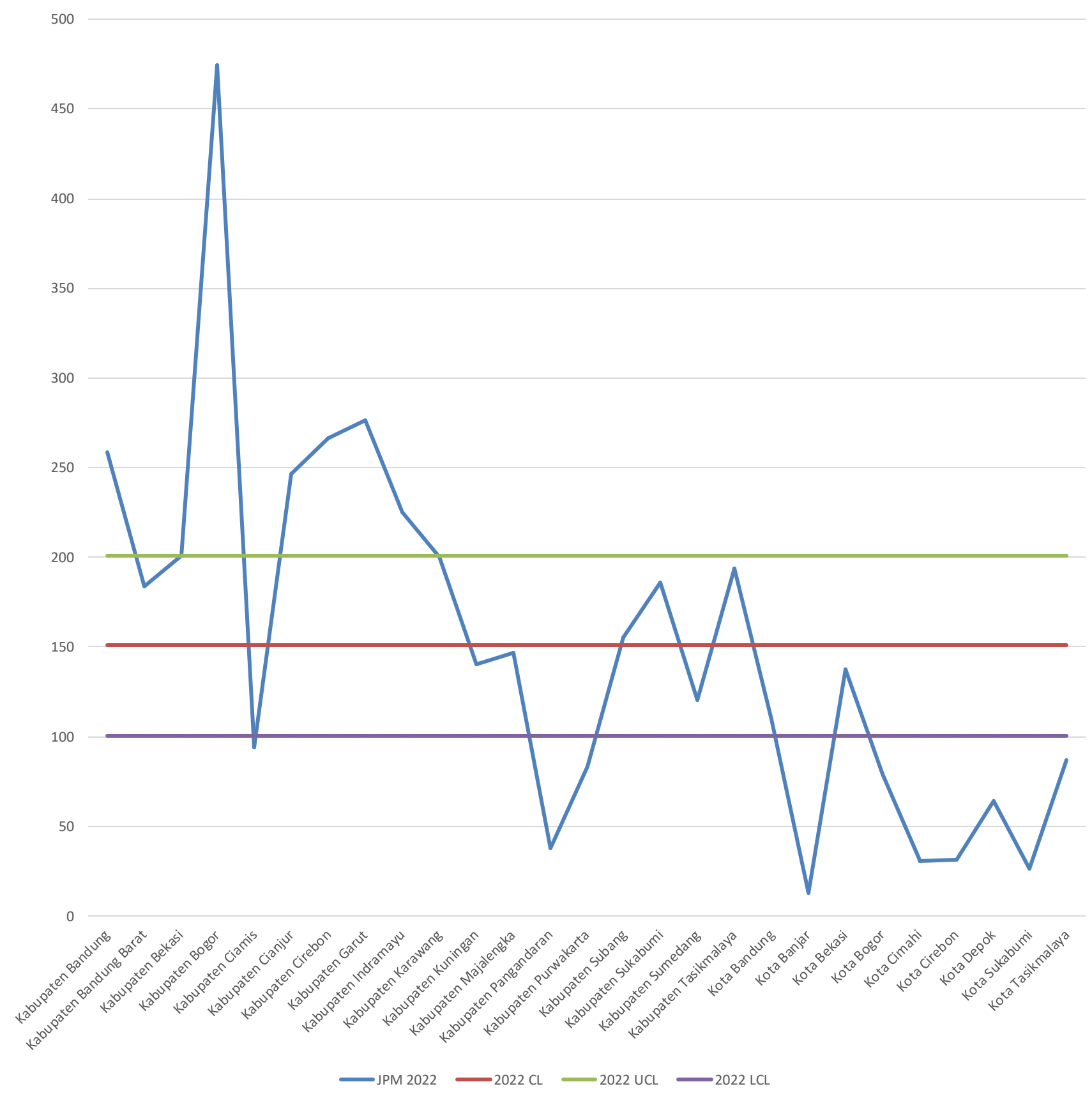
Sigma: 0.5



Gambar 53. Control Chart Jumlah Penduduk Miskin (2020)



Gambar 54. Control Chart Jumlah Penduduk Miskin (2021)



Gambar 55. Control Chart Jumlah Penduduk Miskin (2022)

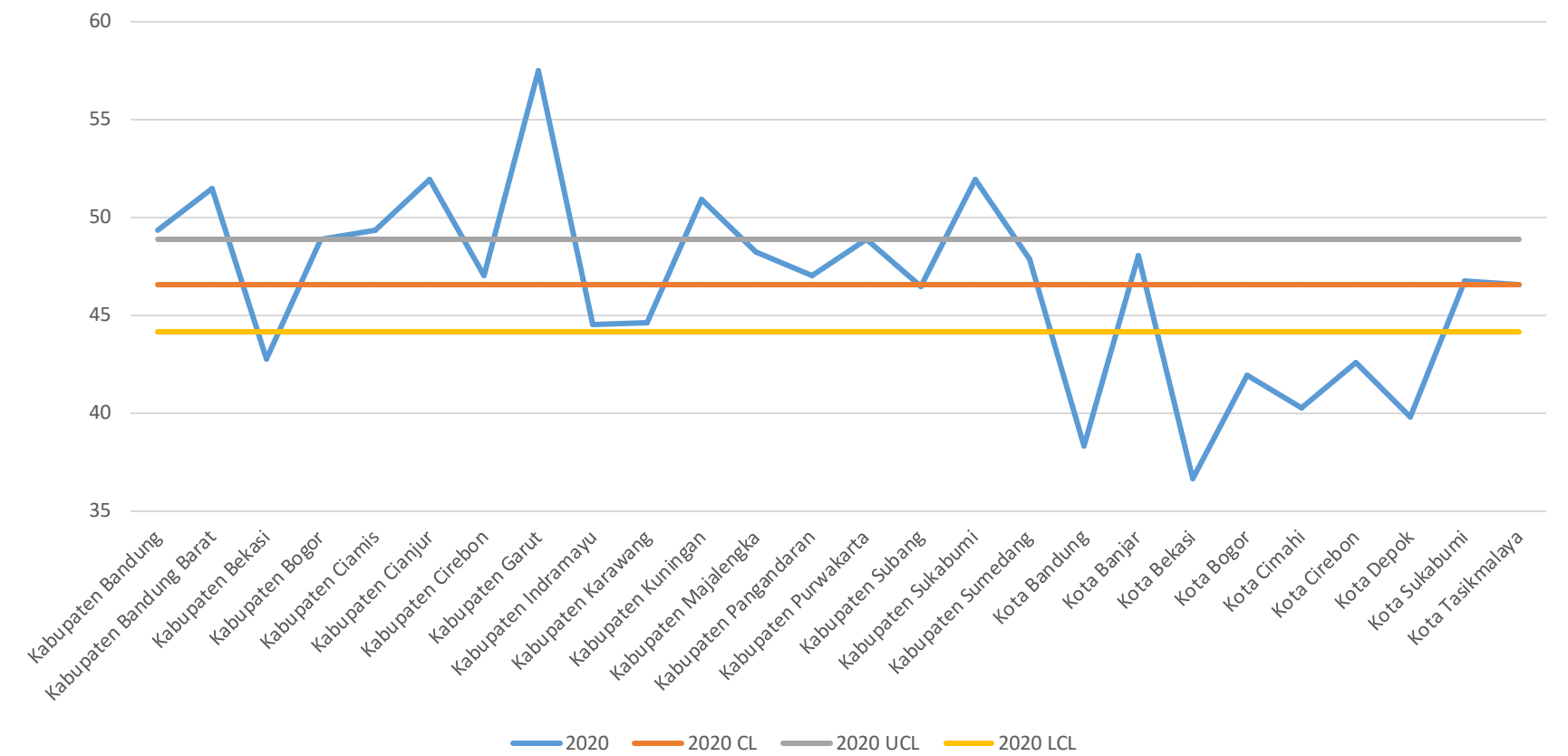
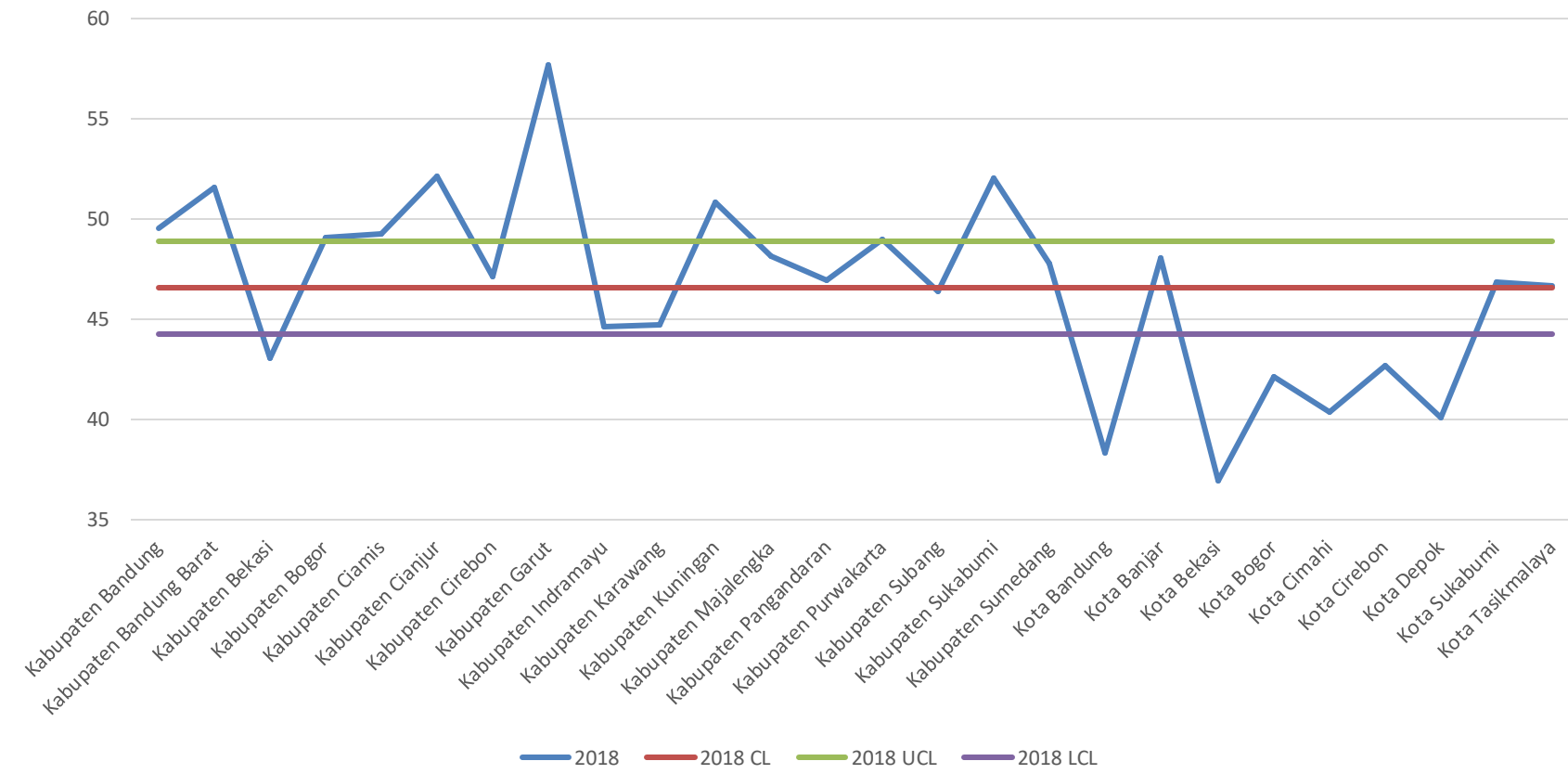
Tabel 21. Summary Hasil Analisis Variabel Jumlah Penduduk Miskin

No	Kota/Kabupaten	Kategori JPM				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kabupaten Bandung	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH
2	Kabupaten Bandung Barat	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE
3	Kabupaten Bekasi	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE	HIGH
4	Kabupaten Bogor	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH
5	Kabupaten Ciamis	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW
6	Kabupaten Cianjur	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH
7	Kabupaten Cirebon	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH
8	Kabupaten Garut	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH
9	Kabupaten Indramayu	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH
10	Kabupaten Karawang	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	MODERATE
11	Kabupaten Kuningan	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE
12	Kabupaten Majalengka	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE
13	Kabupaten Pangandaran	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW
14	Kabupaten Purwakarta	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW
15	Kabupaten Subang	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE
16	Kabupaten Sukabumi	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE
17	Kabupaten Sumedang	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE
18	Kabupaten Tasikmalaya	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE
19	Kota Bandung	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE
20	Kota Banjar	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW
21	Kota Bekasi	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE
22	Kota Bogor	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW
23	Kota Cimahi	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW
24	Kota Cirebon	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW
25	Kota Depok	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW
26	Kota Sukabumi	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW
27	Kota Tasikmalaya	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW

Analisis Variabel Ekonomi

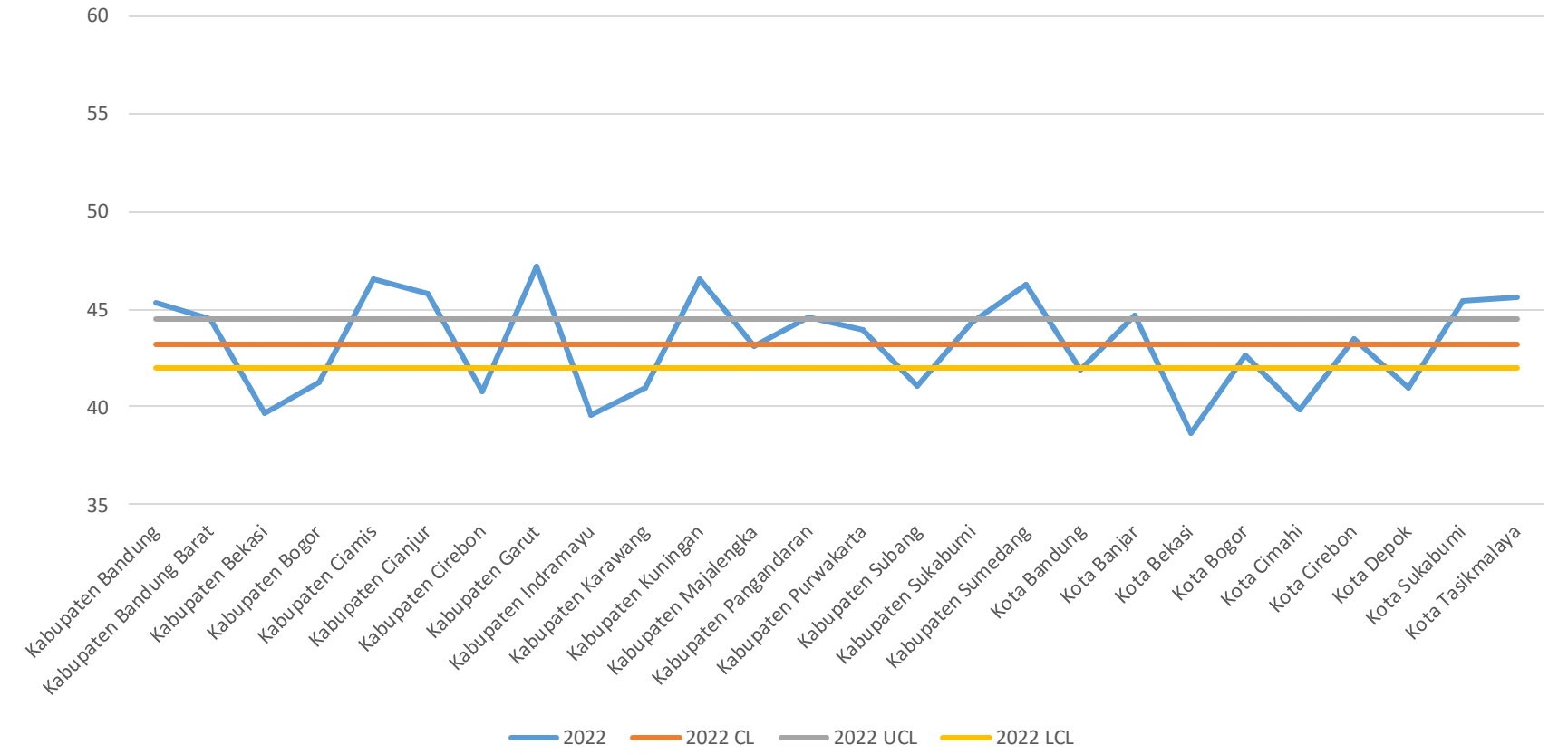
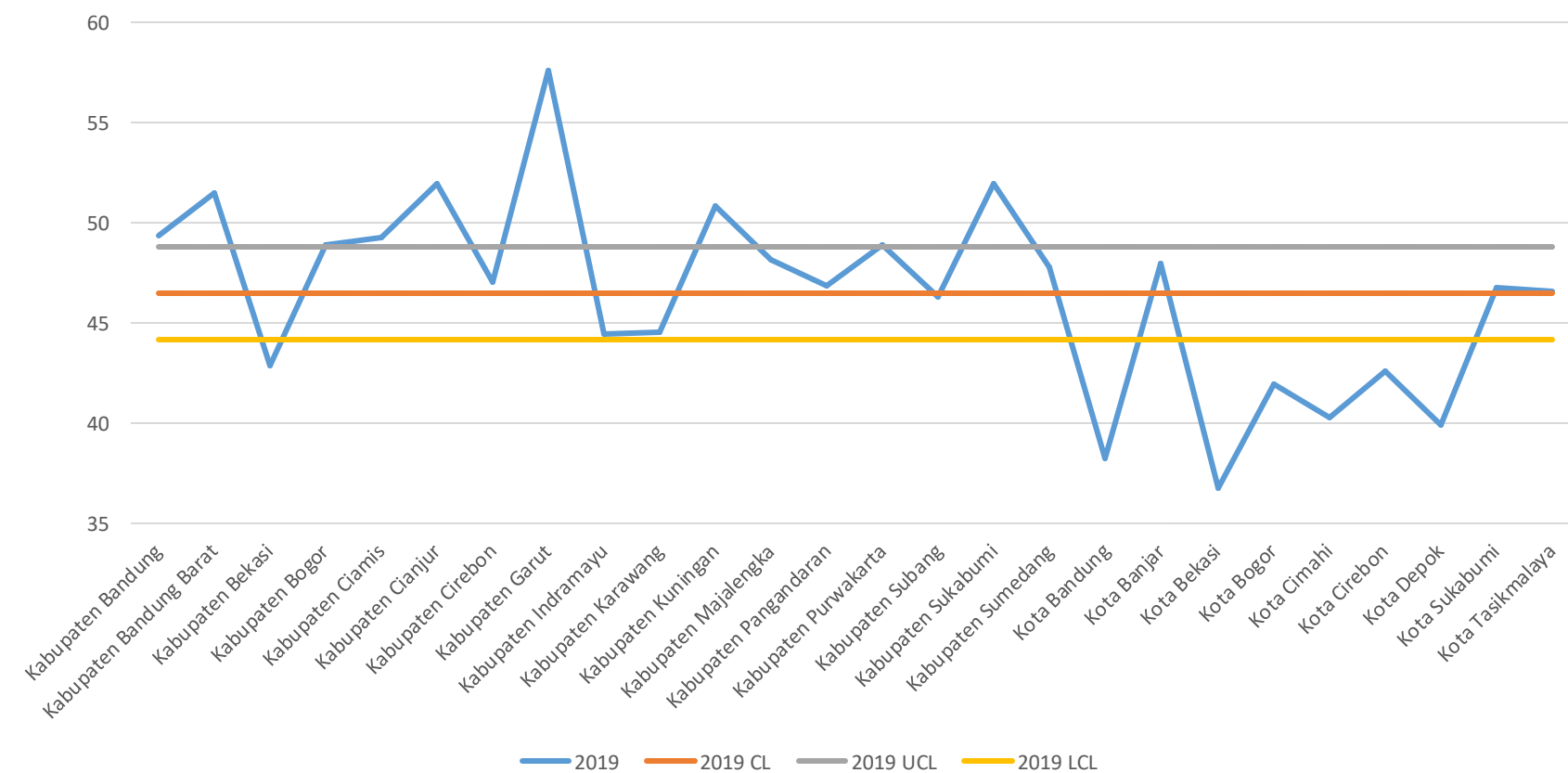
Angka Ketergantungan

Sigma: 0.5



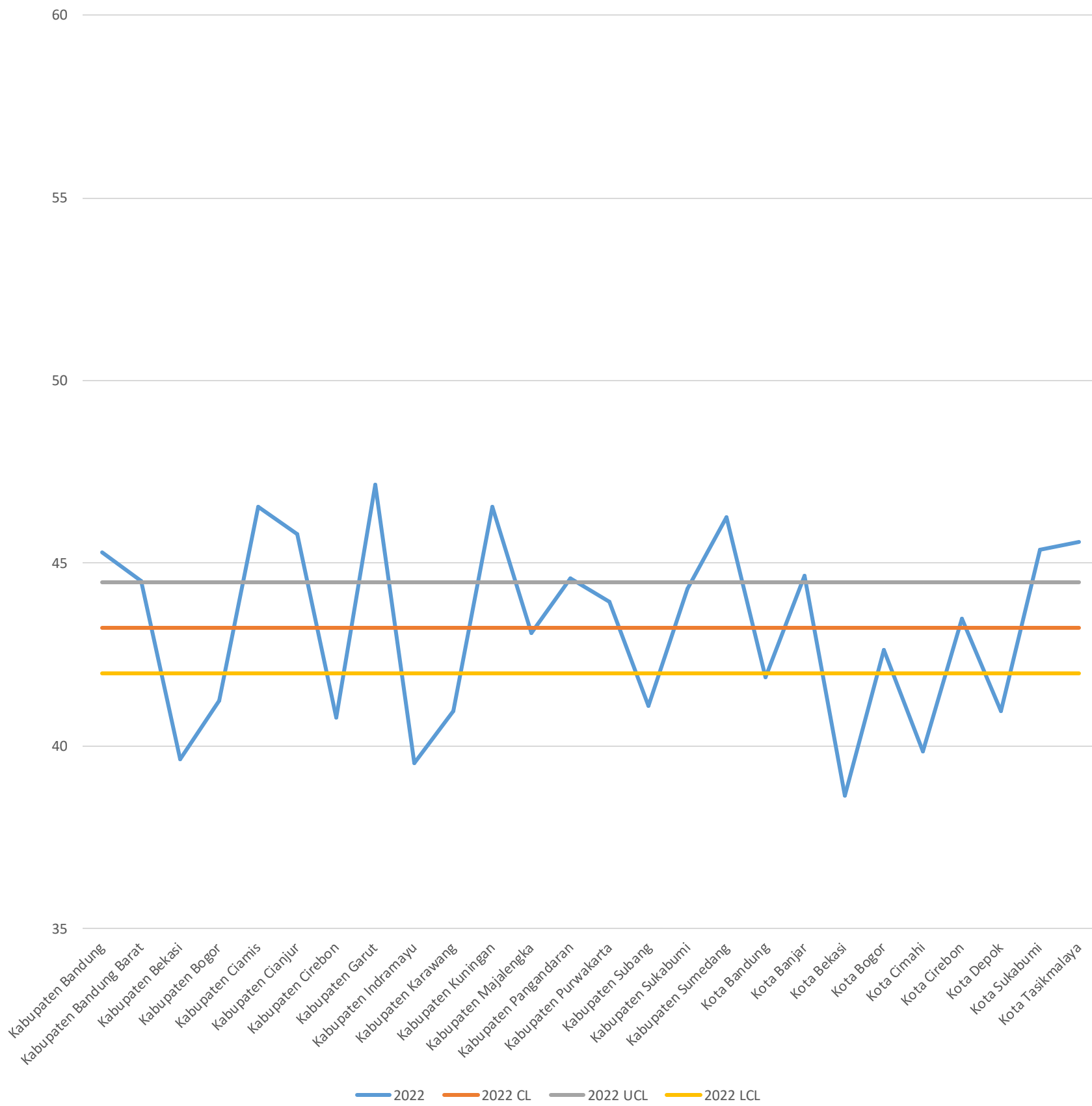
Gambar 56. Control Chart Angka Ketergantungan (2018)

Gambar 58. Control Chart Angka Ketergantungan (2020)



Gambar 57. Control Chart Angka Ketergantungan (2019)

Gambar 59. Control Chart Angka Ketergantungan (2021)



Gambar 60. Control Chart Angka Ketergantungan (2022)

Tabel 22. Summary Hasil Analisis Variabel Angka Ketergantungan

No	Kabupaten/Kota	Kategori Angka Ketergantungan			
		2018	2019	2020	2022
1	Kabupaten Bandung	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH
2	Kabupaten Bandung Barat	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH
3	Kabupaten Bekasi	HIGH	LOW	LOW	LOW
4	Kabupaten Bogor	HIGH	HIGH	HIGH	MODERATE
5	Kabupaten Ciamis	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH
6	Kabupaten Cianjur	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH
7	Kabupaten Cirebon	HIGH	HIGH	HIGH	MODERATE
8	Kabupaten Garut	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH
9	Kabupaten Indramayu	HIGH	HIGH	LOW	MODERATE
10	Kabupaten Karawang	HIGH	HIGH	LOW	MODERATE
11	Kabupaten Kuningan	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH
12	Kabupaten Majalengka	HIGH	HIGH	HIGH	MODERATE
13	Kabupaten Pangandaran	HIGH	HIGH	HIGH	MODERATE
14	Kabupaten Purwakarta	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH
15	Kabupaten Subang	HIGH	HIGH	LOW	MODERATE
16	Kabupaten Sukabumi	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH
17	Kabupaten Sumedang	HIGH	HIGH	HIGH	MODERATE
18	Kota Bandung	HIGH	LOW	LOW	LOW
19	Kota Banjar	HIGH	HIGH	HIGH	MODERATE
20	Kota Bekasi	HIGH	LOW	LOW	LOW
21	Kota Bogor	HIGH	LOW	LOW	LOW
22	Kota Cimahi	HIGH	LOW	LOW	LOW
23	Kota Cirebon	HIGH	LOW	LOW	LOW
24	Kota Depok	HIGH	LOW	LOW	LOW
25	Kota Sukabumi	HIGH	HIGH	HIGH	MODERATE
26	Kota Tasikmalaya	HIGH	HIGH	HIGH	MODERATE

Summary

Tabel 23. Summary Analisis Variabel Pendidikan dan Ekonomi

No	Kabupaten/Kota	Pendidikan (Modus)	Variabel Ekonomi (Bigger Better)					Variabel Ekonomi (Lower Better)				
			PDRB Konstan	PDRB Berlaku	IPM	PAK	AK	Gini Ratio	IKM	TPT	JPM	A. Ketergantungan
1	Kabupaten Bandung	HIGH	MODERATE	MODERATE	MODERATE	LOW	HIGH	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE	HIGH
2	Kabupaten Bandung Barat	MODERATE	LOW	LOW	LOW	LOW	MODERATE	MODERATE	HIGH	MODERATE	MODERATE	HIGH
3	Kabupaten Bekasi	MODERATE	HIGH	HIGH	HIGH	MODERATE	HIGH	MODERATE	LOW	MODERATE	HIGH	LOW
4	Kabupaten Bogor	HIGH	MODERATE	MODERATE	MODERATE	LOW	HIGH	MODERATE	MODERATE	HIGH	LOW	HIGH
5	Kabupaten Ciamis	LOW	LOW	LOW	MODERATE	HIGH	MODERATE	MODERATE	LOW	LOW	HIGH	HIGH
6	Kabupaten Cianjur	LOW	LOW	LOW	LOW	HIGH	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE	HIGH	HIGH
7	Kabupaten Cirebon	MODERATE	LOW	LOW	LOW	MODERATE	MODERATE	MODERATE	HIGH	MODERATE	HIGH	HIGH
8	Kabupaten Garut	MODERATE	LOW	LOW	LOW	LOW	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE	HIGH	HIGH
9	Kabupaten Indramayu	LOW	MODERATE	MODERATE	LOW	HIGH	MODERATE	LOW	HIGH	MODERATE	HIGH	LOW
10	Kabupaten Karawang	LOW	HIGH	HIGH	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE	LOW
11	Kabupaten Kuningan	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW	MODERATE	HIGH	MODERATE	MODERATE	HIGH
12	Kabupaten Majalengka	LOW	LOW	LOW	LOW	HIGH	MODERATE	MODERATE	HIGH	LOW	LOW	HIGH
13	Kabupaten Pangandaran	LOW	LOW	LOW	LOW	HIGH	LOW	LOW	-	-	LOW	-
14	Kabupaten Purwakarta	LOW	HIGH	HIGH	MODERATE	MODERATE	LOW	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE	HIGH
15	Kabupaten Subang	LOW	LOW	LOW	LOW	HIGH	MODERATE	MODERATE	HIGH	MODERATE	MODERATE	HIGH
16	Kabupaten Sukabumi	MODERATE	LOW	LOW	LOW	MODERATE	MODERATE	MODERATE	LOW	MODERATE	MODERATE	LOW
17	Kabupaten Sumedang	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE	HIGH	MODERATE	MODERATE	HIGH
18	Kabupaten Tasikmalaya	LOW	LOW	LOW	LOW	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE	LOW	MODERATE	HIGH
19	Kota Bandung	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	MODERATE	HIGH	HIGH	LOW	MODERATE	LOW	LOW
20	Kota Banjar	LOW	LOW	LOW	MODERATE	MODERATE	LOW	LOW	LOW	LOW	MODERATE	HIGH
21	Kota Bekasi	HIGH	MODERATE	MODERATE	HIGH	MODERATE	HIGH	MODERATE	LOW	MODERATE	LOW	LOW
22	Kota Bogor	HIGH	MODERATE	MODERATE	HIGH	LOW	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	LOW
23	Kota Cimahi	MODERATE	HIGH	HIGH	HIGH	LOW	LOW	MODERATE	LOW	HIGH	LOW	LOW
24	Kota Cirebon	LOW	HIGH	HIGH	HIGH	LOW	LOW	HIGH	HIGH	MODERATE	LOW	LOW
25	Kota Depok	MODERATE	MODERATE	MODERATE	HIGH	MODERATE	MODERATE	MODERATE	LOW	MODERATE	LOW	LOW
26	Kota Sukabumi	LOW	MODERATE	MODERATE	HIGH	LOW	LOW	HIGH	MODERATE	MODERATE	LOW	HIGH
27	Kota Tasikmalaya	LOW	MODERATE	MODERATE	MODERATE	MODERATE	LOW	MODERATE	HIGH	MODERATE	LOW	HIGH

Tabel 24. Identifikasi Variabel pembangunan yang berkorelasi dengan dominasi pendidikan

No	Kabupaten/Kota	Pendidikan (Modus)	Bigger Better			Smaller Better		
			PDRB KONSTAN	IPM	AK	IKM	JPM	Angka Ketergantun gan
1	Kabupaten Bandung	HIGH	MODERATE	MODERATE	HIGH	MODERATE	MODERATE	HIGH
4	Kabupaten Bogor	HIGH	MODERATE	MODERATE	HIGH	MODERATE	LOW	HIGH
19	Kota Bandung	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	LOW	LOW	LOW
21	Kota Bekasi	HIGH	MODERATE	HIGH	HIGH	LOW	LOW	LOW
22	Kota Bogor	HIGH	MODERATE	HIGH	LOW	LOW	LOW	LOW

KESIMPULAN

- Kualitas pendidikan SMA di Jawa Barat didominasi oleh 5 kabupaten- kota [$<20\%$] : Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Bekasi, dan Selama 5 tahun berturut-turut [2018-2022]. Selama itu, tidak terjadi pemerataan pendidikan di tingkat SMA atau terdapat disparitas kualitas pendidikan bahkan dominasi di level SMA di Jawa Barat.
- Jika 20% player menguasai 80% market terjadi asymmetrical market alias monopoli pasar alias pasar tidak sehat. Demikian pula kondisi mutu pendidikan di Jawa Barat..
- Para alumni SMA dari 22 kabupaten/kota memiliki akses yang rendah ke perguruan tinggi berkualitas. Hal ini mencerminkan adanya kesalahan paradigma, mengingat tidak ada perubahan signifikan selama bertahun-tahun. Sesuai prinsip Pareto ada 20% kabupaten Kota dengan kualitas SMA bermutu tinggi dan 80% hal sebaliknya, hal ini mencerminkan systematic error dari pembangunan mutu pendidikan SMA .
- Diperoleh fakta ilmiah bahwa saat ini SMA-SMA tidak serius mengantarkan siswanya ke perguruan tinggi bermutu. Ini dapat dianalogikan dengan partai politik yang tidak memiliki ambisi untuk meraih kursi di DPR. Oleh karena itu, jumlah kursi di DPR adalah The Ultimate indicator for party Quality. Demikian pula, jumlah kursi di perguruan tinggi berkualitas [IMU-SMA] menjadi Ultimate indicator for senior high school quality. Perguruan tinggi berkualitas ini disebut sebagai Highly Demanded University (HDU), yang mencakup universitas dengan peringkat tinggi [WUR] dan favorit.

REKOMENDASI MAKRO

1. Hasil kajian kesesuaian dominasi Pendidikan SMA dan dominasi variable ekonomi menunjukkan bahwa dominasi kursi di perguruan tinggi linier dengan dominasi PDRB harga konstan [Tabel 24].

Pemerintah Provinsi Jabar direkomendasikan untuk meningkatkan PDRB Di 22 Kab-Kota yang mutu SMA nya inferior agar disparitas mutu Pendidikan SMA di Jawa Barat dapat diperbaiki.

PDRB ternyata menentukan 'Kemampuan kota' dalam membiayai Pendidikan.

Hal ini berarti yang harus berperan dalam meningkatkan mutu Pendidikan bukan hanya Dinas Pendidikan, tetapi semua pihak yang berkontribusi pada PDRB.

Kata kuncinya adalah **Collective Responsibility**, ini merupakan paradigma baru dalam Pendidikan Dimana selama ini paradigmanya **'Sectoral Responsibility'**.

Daftar Kab-Kota dengan urgensi perbaikan tertinggi sebagai adalah berikut:

Kabupaten :

- Bandung Barat, Bekasi, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya,

Kota :

- Banjar, Cimahi, Cirebon, Depok, Sukabumi, Tasikmalaya

REKOMENDASI MAKRO

2. Hasil kajian kesesuaian dominasi Pendidikan SMA dan dominasi variable ekonomi menunjukkan bahwa dominasi kursi di perguruan tinggi linier dengan dominasi 7 variable ekonomi di bawah ini :

- a. PDRB Harga Konstan dan PDRB Harga Berlaku,
- b. Indeks Pembangunan Manusia,
- c. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja,
- d. Jumlah Angkatan Kerja,
- e. Indeks Kedalaman Kemiskinan
- f. Jumlah Penduduk Miskin,
- g. Angka Ketergantungan [beban ekonomi atau ketergantungan finansial yang harus ditanggung oleh populasi yang bekerja.]

Program-program yang bertujuan memperbaiki ke -7 variable di atas akan berpengaruh positif terhadap perbaikan disparitas mutu Pendidikan SMA di Jawa Barat. Maka upayakan perbaikan ke 7 variabel di atas sebelum benchmark ke 5 kab/ kota karena percuma dijadikan percontohan kalau ke 7 variabel tidak berubah

REKOMENDASI MAKRO

3. Melakukan Root Cause Analysis [RCA] disparitas mutu Pendidikan SMA di Jawa Barat. RCA difokuskan pada segala sesuatu yang berkaitan dengan Manajemen Pendidikan bersifat **engineerable** sehingga terbuka rekayasa sosial ekonomi atau manajerial untuk memperbaiki mutu pendidikan SMA di Jawa Barat. Hal tersebut mencakup : Guru, Sarana, Metode . Exclude Siswa karena dinilai eligible [tidak berarti bermutu]. Melakukan *benchmark ke 5 kota yang berada di atas UCL sebagai acuan* dalam meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan di Kab/kota

Atribut Guru:

Pendidikannya [Tingkat akademik, sertifikasi, pelatihan berkelanjutan],
Kesejahteraannya [Gaji, tunjangan, jaminan sosial, lingkungan kerja.], Pengalamannya [Lama mengajar, keterlibatan dalam penelitian, rekam jejak prestasi, kompetensi sosial]

Atribut Sarana: Kelengkapan [Ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, fasilitas olahraga, teknologi pembelajaran, internet],

Kondisinya [kualitas bangunan, Sistem keamanan sekolah, kebersihan lingkungan, ventilasi ruangan.]

Atribut Metode: Inovasinya [Penggunaan teknologi, model pembelajaran berbasis proyek, gamifikasi.],
Variasinya [Interaktifitas, studi kasus, blended learning, Adaptabilitas, Evaluasi dan Umpan Balik]

REKOMENDASI MAKRO

4. Mengukur Tingkat keberlanjutan siswa SMA ke perguruan tinggi.

Hal ini dilakukan dengan mengamati statistic $Y=L/S$

L= Jumlah Siswa yang melanjutkan ke perguruan tinggi

S= Jumlah siswa alumni SMA

Jika $Y=1$ maka Undang-undang Pendidikan SMA sudah terpenuhi

Jika $Y < 0.4$ maka UU pendidikan SMA masih belum terpenuhi.

REKOMENDASI MIKRO

5. Pemerintah Kab/Kota direkomendasikan untuk merancang distribusi PDRB yang memperhitungkan peningkatan manajemen Pendidikan dan menetapkan SMA mana saja yang harus diupgrade
6. Riset ini telah mengukur capability sekolah dalam memberikan kemampuan kepada siswa SMA di kabupaten kota untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi,. Selanjutnya perlu diketahui kapasitas SMA di kabupaten kota di Jabar dalam mendorong siswa SMA melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi



Follow up Research di 22 Kabupaten-Kota

Metrik kinerja IMU-SMA

1

Root Cause Analysis (RCA):
Mengapa 22 Kab inferior.
Fokus pada disparitas mutu pendidikan di SMA.

2

Metodologi:
Benchmarking top schools
Mengadakan FGD.
Perumusan konsensus penyebab inferioritas
Grouping hasil RCA

3

Desain Solusi per group of problem: Eliminasi akar masalah dalam berbagai aspek: metode SDM. Sarpras, Collab, Dukungan komunitas [control sosial, ortu,]

6

Full Scale up ke 22 kab-kota
SOP implementasi/grup Kab.
Implementasi total. Metrik Kinerja Sekolah (IMU-SMA)

5

Refine Desain:
peta jalan konkret
scalable flexible efektif
↑ IMU-SMA Kab.-Kota

4

Pilot Project di tiap grup: Uji coba desain Solusi. Tujuan: Meningkatkan penerimaan lulusan dari 2 menjadi 20 orang per SMA.
Time line Evaluasi efektivitas solusi

Daftar Pustaka

1. Safitri AO, Yuniarti VD, Rostika D. Upaya peningkatan pendidikan bermutu di Indonesia: Analisis pencapaian sustainable development goals (SDGs). *Jurnal Basicedu*. 2022 Jun 3;6(4):7096-106
2. Vito B, Krisnani H. Kesenjangan pendidikan desa dan kota. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*. 2015 Oct 1;2(2).
3. Levin HM. The economic payoff to investing in educational justice. *In Schools in Transition 2017* Jan 1 (pp. 161-188). Brill.
4. Cai D, Cheung KC, Sit PS, Leong MK. Examining the Impact of Students' Familiarity with Information and Communications Technology on Education Equity Using Data from Students in Four Provinces and Cities in China. *Chinese/English Journal of Educational Measurement and Evaluation | 教育测量与评估 双语季刊*. 2022;3(3):3.
5. Cahalan MW, Addison M, Brunt N, Patel PR, Perna LW. Indicators of Higher Education Equity in the United States: 2021 Historical Trend Report. Pell institute for the study of opportunity in higher education. 2021.
6. Kopnina H. Education for the future? Critical evaluation of education for sustainable development goals. *The Journal of Environmental Education*. 2020 Jul 3;51(4):280-91.
7. ASMA' Khoirunnisa', Firdaus Amruzain Satiranandi Wibowo, Kimiantini Kismiantini, <https://doi.org/10.21831/pspmm.v7i1.273>
8. M. Rahadianto, Anjar Dimara Sakti, Ketut Wikantika. <https://doi.org/10.24895/SNG.2020.0-0.1127>

Modified Pareto for disparity

Skala : 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 ukuran minoritas-mayoritas. Makin kecil makin monopoli, Break point 60%
Asumsi : resolusi 0.1, selisih di bawah 10% tidak menyebabkan perbedaan gejala sosial

0.1 artinya kurang dari 10% menguasai lebih dari 60%. 10% menguasai 80% terasa monopoli

0.2 artinya kurang dari 20% menguasai lebih dari 60%

0.3 artinya kurang dari 30% menguasai lebih dari 60%

0.4 artinya kurang dari 40% menguasai lebih dari 60%

0.5 artinya kurang dari 50% menguasai lebih dari 60%. 50% menguasai lebih dari 60% tidak bisa dipastikan terjadi monopoli [mungkin masih dalam fair trade]. antara 40-60 quasi-majority/minority, quasi artinya swing

titik belok minoritas - mayoritas : 0.4 - 0.6 di antara itu abu-abu, titik kritisnya 40-60, kurang dari 40% jelas minoritas lebih dari 60% jelas mayoritas, kurang dari 40% monopoli, lebih dari 60% fair
Jika digunakan skala likert hanya ada 3 keadaan monopolistic, floating, fair